

PETA SOSIAL EKONOMI UMMAT

Social Mapping



Cara mudah melakukan mapping

Peta Sosial Ekonomi Ummat

Sosial Mapping

**Edisi Buku Bahan Ajar
Dipakai Dilingkungan Sendiri**

**Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Parepare**

Kata Pengantar

Buku ini merupakan Buku Bahan Ajar Mata Kuliah Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare guna mengantarkan mahasiswa menguasai tehnik pemetaan sebagai mata kuliah yang membentuk keterampilan mahasiswa dalam mempersiapkan diri terlibat dalam proses pemabangunan masyarakat.

Buku bahan ajar ini disusun dan ditelaah oleh penanggungjawab mata kuliah sebagai acuan dalam proses pembelajaran yang terdiri dari 10 Bab dan dilengkapi dengan lampiran sebagai tambahan referensi dalam melakukan praktek baik dalam ruanga mapun studi di masyarakat dan diharapkan kerjasama dengan pemerintah setempat.

Berdasarkan Rencana Pembelajaran Semester, pada Bab I dalam buku ini dimulai pembahasan pemahaman awal tentang Apa itu pemetaan sosial, Tujuan Pemetaan Sosial, Jenis Pemetaan Sosial, Output Yang Diharapkan dalam proses pemetaan.

Pada Bab II, menjelaskan tentang: Pengertian Masalah Sosial, Akar Masalah Sosial di Indonesia dan Masalah Sosial yang Dihadapi Bangsa Indonesia. Hal ini penting untuk memberikan pemahaman substansi bagi mahasiswa bahwa pemetaan dilakukan berangkat dari masalah yang ada di masyarakat. Termasuk pada Bab II membahas masalah komiskinan sebagai masalah sosial disamping juga pemahaman tentang kemiskinan perempuan.

Peta Sosial ekonomi Ummat

Pada Bab IV, V dan VI berturut-turut mempelajari: Paradigma Pembangunan dan Masalah Gender dalam Developmentalisme, Pembangunan Partisipatif dan Modal Sosial (Sosial Capital). Hal ini penting karena sebelum dan setelah pemetaan sosial yang dilakukan pada akhirnya menjadi rangkaian yang tidak terpisahkan dari proses pengembangan masyarakat khususnya pada tahap perencanaan.

Pada bab akhir yaitu pada Bab VII, VIII, IX dan X, merupakan bab pengenalan teknis tentang pemetaan sosial. Pada proses pembeajaran akan dibahas tentang baik teori maupun praktek pemetaan berbagai teknik kajian khususnya teknik pemetaan pada Partisipatory Rural Apresial (PRA). Untuk memudahkan dalam pemahaman PRA maka dilakukan komparasi pengalaman dari teknik kajian oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di era pemerintahan Susilo Bambang Yodoyono sebagai bagian kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini.

Punulis

Abd. Wahidin

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I: Pengantar Pemetaan Sosial	1
Apa itu pemetaan sosial?	1
Tujuan Pemetaan Sosial	3
Jenis Pemetaan Sosial	6
Output Yang Diharapkan	6
BAB II: Masalah Sosial	8
Pengertian Masalah Sosial	9
Akar Masalah Sosial di Indonesia	16
Masalah Sosial yang Dihadapi Bangsa Indonesia	17

BAB III: Kemiskinan	20
Kemiskinan dalam perspektif PNPM Mandiri Perkotaan	20
Perempuan pada Konteks Kemiskinan	30
BAB IV: Pardigma Pembangunan dan Masalah Gender dalam Developmentalisme	36
Pardigma Pembangunan	36
Masalah Gender dalam Developmentalisme	45
BAB V: Pembangunan Partisipatif dan Modal Sosial (Sosial Capital)	54
Pembangunan Partisipatif	54
Modal Sosial (Sosial Capital)	63
BAB VI: Teknik dalam Assessment Kebutuhan dan Potensi Masyarakat	72
Kebutuhan Masyarakat	73
Studi Kepustakaan dan Metode Delphi sebagai Teknik Pengidentifikasian Masalah dan Potensi Masyarakat melalui Pendekatan Kuantitatif	79
Metode Delbecq sebagai Teknik Pengi- dentifikasian Masalah dan Potensi Masyarakat melalui Pendekatan Kualitatif	85
BAB VII: PRA sebagai Metode Pengidentifikasian Masalah dan Potensi Masyarakat secara Kualitatif	92
BAB VIII: Teknik dalam PRA	102
Matriks Prioritas Masalah	102
Pemetaan Partisipatoris (Participatory Mapping)	109
Membentuk kelompok diskusi	109

Alur Sejarah Masalah dan Perubahan di Masyarakat (Time-Line History)	113
Diagram Venn Hubungan Antarlembaga	114
Wawancara Individual	116
BAB IX: Mengenal Tehnik Pemetaan Swadaya dalam Program PNPM Mandiri Perkotaan	118
Pengantar	118
Tujuan	120
Keluaran	121
Penyelenggara	122
BAB X: Tahapan Pemetaan Swadaya dalam Program PNPM Mandiri Perkotaan	124
Tahap 1: Persiapan	124
Tahap 2: Pelaksanaan Kajian Tingkat Dusun/RW	132
Tahap 3: Lokakarya Kelurahan/Desa untuk Perumusan Masalah	133
Daftar Pustaka	214

Daftar Lampiran

Lampiran 1: Pemetaan Wilayah dan Sebaran Warga Miskin	142
Lampiran 2: Ranking Kemiskinan dan Transek Lingkungan	158
Lampiran 3: Kajian Ekonomi	168
Lampiran 4: Kelembagaan dan kepemimpinan	186
Lampiran 5: Kajian Pendidikan	196

BAB I

Pengantar Pemetaan Sosial

Apa itu pemetaan sosial?

Menurut LingkarLSM (2013) bahwa pemetaan sosial (*social mapping*) merupakan upaya mengidentifikasi dan memahami struktur sosial (sistem kelembagaan dan individu) tata hubungan antar lembaga dan atau individu pada lingkungan sosial tertentu. Pemetaan sosial dapat juga diartikan sebagai *social profiling* atau “pembuatan profil suatu masyarakat”. Identifikasi kelembagaan dan individu ini dilakukan secara akademik melalui suatu penelitian lapangan, yakni mengumpulkan data secara langsung, menginterpretasikannya dan menetapkan tata hubungan antara satu dengan lain satuan sosial dalam kawasan komunitas yang diteliti (Dody Prayogo,2003).

Identifikasi tata hubungan ini dapat dikaitkan dengan keberadaan pranata sebagai salah satu institusi di dalam kelembagaan sosial atau organisasi sosial dan atau sekitar komunitas yang dimaksud. Identifikasi tata hubungan inilah yang disebut dengan pemetaan atau mapping, yang memberikan gambaran posisi pranata terhadap lembaga lain di dalam komunitas tersebut, sekaligus memberi gambaran bagaimana sifat hubungan antara pranata dengan

lembaga-lembaga tersebut. Adapun tujuan utama membuat pemetaan sosial ada-lah diperolehnya program prioritas dan alokasi sumber dalam penguatan kelompok sosial masyarakat dari pengaruh budaya-budaya luar secara efisien, efektif dan berkelanjutan.

Pemetaan Sosial adalah satu metode visual yang menunjukkan lokasi relatif suatu komunitas atau kelompok yang dilakukan untuk menemukenali dan mendalami kondisi sosial komunitas tersebut. Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa *Social Mapping* adalah teknik untuk membuat gambar kondisi sosial ekonomi masyarakat, misalnya gambar posisi pemukiman, sumber-sumber mata pencaharian, jalan, pelayanan kesehatan dan sarana-sarana umum. Pemetaan sosial juga merupakan salah satu alat analisa sosial yang berarti pula alat dasar dan bantu dalam usaha kita untuk menempatkan dan memahami suatu masalah tertentu, pemahaman atas masalah diletakkan pada konteks realitas sosial jangkauannya relatif lebih luas dan cakupannya, diantaranya meliputi rentang waktu (biasa disebut dengan historical), struktur (kondisi atau keadaan sosial, ekonomi, politik, kultural), kaitan nilai, serta *space* (baik aras lokal-global).

Hasil gambaran ini merupakan peta umum sebuah lokasi yang menggambarkan keadaan masyarakat maupun lingkungan fisik, sehingga dapat digunakan untuk menganalisa dan mendalami bersama masyarakat untuk memunculkan topik-topik dan tema-tema tertentu.

Definisi lainnya pemetaan sosial merupakan satu kegiatan yang dilakukan untuk **menemukenali** kondisi sosial budaya masyarakat lokal atau disebut juga sebagai kegiatan orientasi sosial dan wilayah (Purnomo dan Sukarti).¹ Kondisi sosial budaya yang perlu

¹ Paparan dari Purnomo dan Sukarti dalam bentuk power point yang berjudul Pemetaan Sosial (Orientasi Sosial dan Wilayah),

ditemukenali dan atau perlu diorientasi adalah mencakup beberapa kondisi sebagai berikut :

1. Nilai-nilai apakah yang dianut oleh masyarakat secara dominan, yang mampu menggerakkan masyarakat.
2. Kekuatan-kekuatan sosial apakah yang mampu mendatangkan perubahan-perubahan sehingga masyarakat dapat berubah dari dalam diri mereka sendiri.
3. Seperti apa karakter dan karakteristik masyarakat, khususnya dalam menyikapi intervensi sosial, Seperti apakah pola informasi, komunikasi yang terjadi di tengah masyarakat, baik penyebaran informasi maupun dalam kerangka pembelajaran
4. Nilai-nilai apakah yang dianut oleh masyarakat secara dominan, yang mampu menggerakkan masyarakat.
5. Kekuatan-kekuatan sosial apakah yang mampu mendatangkan perubahan-perubahan sehingga masyarakat dapat berubah dari dalam diri mereka sendiri.
6. Seperti apa karakter dan karakteristik masyarakat, khususnya dalam menyikapi intervensi sosial, Seperti apakah pola informasi, komunikasi yang terjadi di tengah masyarakat, baik penyebaran informasi maupun dalam kerangka pembelajaran.

Tujuan Pemetaan Sosial

Menurut Purnomo dan Sukarti, tujuan pemetaan sosial yaitu:

1. Sebagai langkah awal pengenalan lokasi sasaran program dan pemahaman fasilitator terhadap kondisi masyarakat sasaran program.
2. Untuk mengetahui kondisi sosial masyarakat sasaran program
3. Sebagai dasar pendekatan dan metoda pelaksanaan program melalui sosialisasi dan pelatihan.
4. Sebagai dasar penyusunan rencana kerja yang bersifat taktis terhadap permasalahan yang dihadapi.
5. Sebagai acuan dasar untuk mengetahui terjadinya proses perubahan sikap dan perilaku pada masyarakat sasaran program.

Sedangkan menurut (Gemily, 2012) bahwa tujuan pemetaan social adalah:

1. Tersusunnya indikator bobot masalah dan jangkauan fasilitas pelayanan sosial dalam kegiatan penguatan.
2. Diperolehnya peta digitasi sebagai dasar pengembangan informasi untuk penguatan kelompok-kelompok sosial.
3. Diperolehnya peta-peta tematik dengan sistem informasi geografis (GIS), sehingga diketahui berbagai pengaruh budaya-budaya luar.
4. Tersusunnya prioritas rencana program penguatan berdasarkan jenis masalah dan satuan wilayah komunitas yang ada pengaruhnya dari budaya-budaya luar.

Peta Sosial ekonomi Ummat

5. Dapat ditentukan alokasi program prioritas untuk kegiatan penguatan.
6. Sebagai langkah awal pengenalan lokasi dan pemahaman terhadap kondisi masyarakat.
7. Untuk mengetahui kondisi sosial masyarakat.
8. Sebagai dasar pendekatan dan metoda pelaksanaan melalui sosialisasi dan pelatihan.
9. Sebagai dasar penyusunan rencana kerja yang bersifat taktis terhadap permasalahan yang dihadapi.
10. Sebagai acuan dasar untuk mengetahui terjadinya proses perubahan sikap dan perilaku pada masyarakat.

Dalam pada itu pemetaan sosial mempunyai manfaat praktis antara lain: pemetaan masalah sosial dan potensi/sumber sosial yang merupakan bagian dari analisis situasi dan analisis kebutuhan untuk kegiatan penguatan; gambaran dasar survei disajikan dalam bentuk struktur ruang/daerah lebih komukatif; pemantauan tentang perubahan tata ruang kondisi daerah suatu komunitas; Analisis prioritas masalah dan lokasi untuk perencanaan kegiatan penguatan. Sehingga pada dasarnya pemetaan sosial digunakan untuk:

- Menampilkan data tata letak komunitas, infrastruktur, kependudukan, etno-kelompok bahasa, pola kesehatan, kekayaan, dan sebagainya.
- Mengidentifikasi kelompok sosial yang berbeda menggunakan kriteria yang ditetapkan secara lokal dan menilai distribusi aset di seluruh kelompok social.
- Mendalami pengetahuan dan persepsi komunitas.
- Mengidentifikasi pengaruh dan kekuasaan yang bermain.

- Belajar tentang lembaga sosial dan pandangan komunitas yang berbeda terhadap lembaga-lembaga sosial tersebut.

Pemetaan social juga merupakan salah satu alat dalam pendekatan partisipatif seperti:

- Participatory Rural Appraisal (PRA)
- Kaji-Tindak Partisipatif (KTP)
- Participatory Research and Development (PRD)
- Rapid Rural Appraisal (RRA)
- Participatory Action Research (PAR)
- PPKP (Pemahaman Partisipatif Kondisi Pedesaan)
- Participatory Learning Methods (PLM)
- Metodologi Participatory Assessment (MPA)
- Dan lainnya.

Jenis Pemetaan Sosial

Social mapping sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja, asalkan tahu data apa yang akan dicari dan bagaimana mencarinya. Serta kemampuan komunikasi dan menggali data di lapangan. Untuk itu di pecahkan menjadi dua bentuk:

- INTERNAL; Social mapping yang dilakukan oleh pihak bagian dari lembaga itu sendiri, diantaranya oleh: *Person In Charge (PIC)*, *Community Development Officer*, Petugas Lapangan.
- INDEPENDENT; Social mapping yang dilakukan oleh pihak diluar dari lembaga itu sendiri . diantaranya oleh : Akademisi, LSM dan Lembaga penelitian.

Output Yang Diharapkan

1. **Data Demografi** : jumlah penduduk, komposisi penduduk menurut usia, gender, mata pencaharian, agama, pendidikan, dll.
2. **Data Geografi** : topografi, letak lokasi ditinjau dari aspek geografis, aksesibilitas lokasi, pengaruh lingkungan geografis terhadap kondisi sosial masyarakat, dll.
3. **Data psikografi** : nilai-nilai dan kepercayaan yang dianut, mitos, kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat, karakteristik masyarakat, pola hubungan sosial yang ada, motif yang menggerakkan tindakan masyarakat, pengalaman-pengalaman masyarakat terutama terkait dengan mitigasi bencana, pandangan, sikap, dan perilaku terhadap intervensi luar, kekuatan sosial yang paling berpengaruh, dll.
4. **Pola komunikasi** : media yang dikenal dan digunakan, bahasa, kemampuan baca tulis, orang yang dipercaya, informasi yang biasa dicari, tempat memperoleh informasi.

Daftar Pustaka

- Gemily, S. C. (2012). TUGAS MATA KULIAH SOSIOLOGI ANTROPOLOGI “PEMETAAN SOSIAL.” Retrieved from <http://syilgagemily.blogspot.com/2012/06/pemetaan-sosial.html>
- LingkarLSM. (2013). Apa Itu Pemetaan Sosial dan Apa Manfaatnya? Retrieved from <http://lingkarlsm.com/apa-itu-pemetaan-sosial-dan-apa-manfaatnya/>
- Purnomo, Dwi dan Sukarti, T. (n.d.). PEMETAAN SOSIAL (ORIENTASI SOSIAL DAN WILAYAH). Retrieved from https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj81MSkoLHdAhVFLI8KHRWpAXUQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fflabsistentmip.files.wordpress.com%2F2009%2F06%2Fpemetaan-sosial-orientasi-sosial-dan-wilayah.pptx&usg=AOvVaw2tHI4itIal_bHYMBsjXIcf

Peta Sosial ekonomi Ummat

BAB II

Masalah Sosial

Dijelaskan dalam buku “*Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat; Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*”, (Huraerah, 2008: bab1) bahwa sebagai makhluk sosial, dalam kehidupannya, manusia selalu dihadapkan pada berbagai masalah sosial. Sesungguhnya, masalah-masalah sosial merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari kehidupan manusia itu sendiri karena masalah-masalah sosial telah terwujud sebagai basil dari kebudayaan manusia itu sendiri, sebagai akibat dari hubungan-hubungannya dengan sesama manusia lainnya, dan juga sebagai akibat dari tingkah lakunya.

Masalah-masalah sosial yang dihadapi setiap masyarakat manusia tidaklah sama antara yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan-perbedaan yang ada berkenaan dengan masalah-masalah sosial yang dihadapi masing-masing masyarakat tersebut, secara garis besarnya, antara lain disebabkan oleh perbedaan tingkat perkembangan kebudayaan dan masyarakatnya, sifat kependudukannya, dan oleh keadaan lingkungan alam di mana masyarakat itu hidup.

Disiplin-disiplin ilmu pengetahuan yang tergolong sebagai ilmu-ilmu sosial mempunyai ruang lingkup studi mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial untuk dapat memahami secara mendalam mengenai hakikat masyarakat dan kebudayaan manusia. Yang membedakan antara satu disiplin dengan disiplin lainnya adalah penekanan perhatian dari masing-masing disiplin mengenai aspek-aspek tertentu dan cara-cara tertentu dalam pendekatannya untuk melihat, menganalisis, dan memahami masalah-masalah yang menjadi ruang lingkup perhatiannya (termasuk Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam IAIN Parepare).

Lebih lanjut, dalam masing-masing disiplin juga terdapat keanekaragaman dalam melihat dan mempelajari masyarakat manusia. Keanekaragaman ini terwujud karena para ahli dari disiplin ilmu pengetahuan yang bersangkutan telah menggunakan perspektif yang berbeda-beda dalam melihat dan mempelajari masyarakat manusia, dan juga karena para ahli dari disiplin ilmu pengetahuan yang sama tersebut telah menekankan perhatian mengenai aspek-aspek dan masalah-masalah yang tidak sama yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan yang menjadi perhatian studinya.

Pengertian Masalah Sosial

Masalah atau problema adalah perbedaan antara *das Sollen* (yang seharusnya, yang diinginkan, yang dicita-citakan, yang diharapkan) dengan *das Sein* (yang nyata, yang terjadi). Dengan kata lain, masalah adalah perbedaan antara yang ideal dan yang real. Contohnya, kita mencita-citakan masyarakat yang sejahtera, ternyata yang terjadi banyak masyarakat yang masih miskin. Kita menginginkan masyarakat yang cinta damai, yang terjadi malah masyarakat yang

sering berbuat kerusuhan/kekacauan. Kita mengharapkan sebuah masyarakat yang adil, ternyata menemukan masyarakat yang zalim, dsb. Pembahasan tentang masalah ini akan difokuskan pada masalah sosial (*social problem*).

Dalam perspektif profesi pekerjaan sosial, menurut Soetarso (2007) masalah sosial merupakan kondisi sosial yang dinilai orang sebagai kondisi yang tidak enak. Masalah atau tidaknya suatu kondisi sosial bergantung orang atau pihak yang memberikan penilaian. Suatu masalah sosial akan sangat sulit penanggulangannya kalau lebih banyak orang yang menilainya tidak sebagai masalah. Contohnya masalah pelacuran.

Kartini Kartono (1992: 1-2) berpandangan, yang disebut sebagai masalah sosial adalah:

- a. Semua bentuk tingkah laku yang melanggar atau memperkosakan adat-istiadat masyarakat (dan adat-istiadat tersebut diperlukan untuk menjamin kesejahteraan hidup bersama).
- b. Situasi sosial yang dianggap oleh sebagian besar dari warga masyarakat sebagai mengganggu, tidak dikehendaki, berbahaya dan merugikan orang banyak.

Parillo yang dikutip Soetomo (1995:4) menyatakan, untuk dapat memahami pengertian masalah sosial perlu memperhatikan empat komponen, yaitu:

- a. Masalah itu bertahan untuk suatu periode tertentu.
- b. Dirasakan dapat menyebabkan berbagai kerugian fisik atau mental, baik pada individu maupun masyarakat.
- c. Merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai atau standar sosial dari satu atau beberapa sendi kehidupan masyarakat.
- d. Menimbulkan kebutuhan akan pemecahan.

Robert K. Merton mendefinisikan masalah sosial dengan menyebut ciri-ciri pokok masalah sosial. Baginya, ciri-ciri masalah sosial itu adalah adanya "jurang perbedaan yang cukup signifikan antara standar-etandar sosial dengan kenyataan sosial". Oleh karena itu, menurut Merton masalah sosial selalu mengacu kepada suatu jurang antara harapan-harapan yang ada, baik pada seorang individu maupun suatu kelompok, dengan kenyataan-kenyataan mengenai kebutuhan-kebutuhan apa yang dapat dipenuhi, nilai-nilai, dan tujuan-tujuan apa yang bisa tercapai, bagaimana seseorang seharusnya bertindak, dan apa yang dapat diperoleh orang di dalam suatu masyarakat (AchliS, 1982: 27).

Menurut Horton dan Leslie dalam Suharto (2000), masalah sosial adalah suatu kondisi yang dirasakan bahwa orang tidak menyenangkan serta pemecahan aksi sosial secara kolektif. Dari definisi irii dapat disimpulkan, masalah sosial memiliki karakteristik sebagai berikut:

a. Kondisi yang dirasakan banyak orang.

Suatu masalah baru dapat dikatakan sebagai masalah sosial apabila kondisinya dirasakan oleh banyak orang. Dengan demikian, tidak ada batasan mengenai berapa jumlah orang yang harus merasakan masalah tersebut. Jika suatu masalah mendapat perhatian dan menjadi pembicaraan lebih dari satu orang, masalah tersebut adalah masalah sosial. Peran media massa sangat menentukan apakah masalah tertentu menjadi pembicaraan khalayak umum. Jika sejumlah artikel atau berita yang membahas suatu masalah muncul di media massa, masalah tersebut akan segera menarik perhatian orang. Kasus kriminalitas akhir-akhir ini sangat ramai diberitakan di koran maupun televisi. Kriminalitas adalah masalah sosial.

b. Kondisi yang dinilai tidak menyenangkan.

Menurut paham hedonisme, orang cenderung mengulang sesuatu yang menyenangkan dan menghindari sesuatu yang tidak menyenangkan. Orang senantiasa menghindari masalah, karena masalah selalu tidak menyenangkan. Penilaian masyarakat sangat penting dalam menentukan suatu kondisi sebagai masalah sosial. Suatu kondisi dapat dianggap sbagai masalah sosial oleh masyarakat tertentu tetapi tidak oleh masyarakat lainnya. Ukuran "baik" atau "buruk" sangat bergantung pada nilai atau norma yang dianut masyarakat. Penggunaan narkoba, minuman keras, homoseksual, bahkan bunuh diri adalah masalah sosial, apabila aturan-aturan umum. Tetapi pada masyarakat yang memandang penggunaan minuman keras, misalnya, sebagai sesuatu yang "wajar" dan "biasa", penggunaan whisky, Johny walker atau champagne bukanlah masalah sosial, meskipun dilakukan banyak orang.

c. Kondisi yang menuntut pemecahan

Suatu kondisi yang baik menyenangkan senantiasa menuntut pemecahan. Apabila seseorang merasa la par, akan segera dicarinya rumah makan. Apabila sakit kepala, ia akan segera pergi ke dokter atau membeli paramex. Umumnya, suatu kondisi dianggap perlu dipecahkan jika masyarakat merasa bahwa kondisi tersebut memang dapat dipecahkan. Pada waktu lalu, masalah kemiskinan tidak dikategorikan sebagai masalah sosial, karena waktu itu masyarakat menganggap kemiskinan sebagai sesuatu yang alamiah dan masyarakat belum memiliki kemampuan untuk memecahkannya. Sekarang, setelah masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menanggulangi kemiskinan, kemiskinan ramai diperbincangkan dan diseminarkan, karena dianggap masalah sosial.

- d. Pemecahan tersebut harus dilakukan melalui aksi sosial secara kolektif.*

Masalah sosial berbeda dengan individual. Masalah individual dapat diatasi secara individual, tetapi masalah sosial hanya dapat diatasi melalui rekayasa sosial seperti aksi sosial, kebijakan sosial atau perencanaan sosial, karena penyebab dan akibatnya bersifat multidimensional dan menyangkut banyak orang.

a. Masalah sosial dapat lebih dipahami dari dimensi-dimensi berikut ini

- a. Setiap masalah bersifat multidimensional dalam pengertian adanya jaringan faktor-faktor fisik, mental, dan sosial.
- b. Dimensi struktural dan klinis. Masalah sosial berdimanai struktural kalau faktor penyebabnya berakar pada struktur masyarakat, seperti masalah sosial yang terjadi di Indonesia. Dimensi klinis, kalau masalah sosial berakar pada kekurangan atau kelemahan pada diri individu.
- c. Dimensi absolut dan relatif, misalnya yang terjadi pada kemiskinan. Kemiskinan disebut absolut kalau indikator kemiskinannya berlaku di manapun juga di dunia ini, baik di negara maju maupun berkembang. Kemiskinan disebut relatif kalau indikatornya hanya berlaku di negara tertentu, misalnya miskin di Amerika serikat tetapi tidak miskin di Indonesia.

Ernest Burgess dalam Sumarnonugroho (1984: 11) berpendapat bahwa teori tentang masalah sosial dalam perkembangan sosiologi dapat dikelompokkan menjadi lima aspek, yaitu:

- a. Masalah sosial sebagai patologi organik individual

- b. Masalah sosial sebagai patologi social
- c. Masalah sosial sebagai disorganisasi personal dan social
- d. Masalah sosial sebagai konflik nilai
- e. Masalah sosial sebagai proses.

Sementara, Merton mengategorikan masalah sosial menurut yang lazimnya dapat diterima baik oleh para sosiolog maupun pekerja sosial, yaitu: pertama, masalah sosial yang digambarkan sebagai "disorganisasi sosial", dan golongan kedua, masalah sosial yang dapat dikategorikan sebagai "tingkah laku menyimpang". Disorganisasi sosial mengacu kepada ketidakwajaran atau kegagalan-kegagalan di dalam suatu sistem sosial yang terdiri atas status-status dan peranan-peranan yang berinterelasi, misalnya tujuan-tujuan kolektif dan tujuan-tujuan individual yang kurang dapat diwujudkan daripada yang seharusnya. Sedangkan tingkah laku yang menyimpang merujuk kepada tingkah laku yang secara signifikan telah bergeser dari norma-norma yang dibentuk bagi orang-orang menurut status sosial mereka masing-masing (Achlis, 1982: 27).

Sedangkan Soedjito S. mengklasifikasikan masalah sosial ke dalam dua bagian. *Pertama*, masalah sosial dengan reaksi berantai. Masalah sosial ini biasanya merupakan akibat dari masalah sosial sebelumnya, berinteraksi dengan faktor-faktor sebelumnya, lalu berkembang menjadi deret ukur. Contohnya, kemiskinan, penggunaan ganja dan morfin. Perkelahian dan kenakalan anak-anak juga merupakan contoh lain yang biasanya sering dilatarbelakangi sebelumnya oleh keadaan broken home. Masalah sosial ini sulit diatasi dan jika tidak dapat diatasi pada taraf dini, akan menjadi masalah sosial yang akut dan berdampak luas. *Kedua*, masalah sosial dengan reaksi jangka pendek. Biasanya jika masalah sosial yang pokok sudah

terataei, akibatnya tidak akan merembet kepada masalah sosial yang lainnya. Misalnya, jika ada kegagalan panen atau karena gunung berapi yang meletus ataupun banjir. Kegagalan panen biasanya dapat diatasi akibatnya, dengan dropping bahan makanan. Akan tetapi, jika bantuan tidak mencukupi atau terlambat, masalah ini merupakan timbulnya masalah seperti pada bagian pertama. Di dalam kategori ini termasuk juga penampungan orang-orangjompo. Biasanya jika masalah pokok sudah teratasi, akibatnya tidak akan merembet kepada yang lain (Soedjito S., 1985: 79-80).

Permasalahan sosial di Indonesia, seperti halnya di negara-negara lain, cenderung meningkatjumlah maupun kompleksitasnya. Masalah-masalah yang selama ini cukup kita kenal tetap saja berada di tengah-tengah kita, seperti: kemiskinan, ketunaan sosial, ketelantaran anak, kecacatan, kejahatan dan kenakalan. Masalah-masalah ini kerap kali juga disebut masalah sosial bandel (*persistent social problems*), karena keberadaanya kurang dipenuhi oleh proses perubahan dan perkembangan masyarakat serta teknologi. Selain masalah sosial tersebut berkembang pula masalah sosial "baru", seperti: penyalahgunaan bahan (narkoba), anak jalanan, dan daerah kumuh (Soetarso: 2007).

Masalah sosial, menurut Soetarso terbentuk oleh kombinasi faktor-faktor internal yang berasal dari dalam diri orang (ketidakmampuan, kecacatan, gangguanjiwa, daa sebagainya) dan faktor-faktor eksternal yang berasal dari lingkungan sosial (keluarga, sekolah, lingkungan tetangga, lingkungan kerja, dan sebagainya). Berat ringannya suatu masalah sosial yang dialami oleh penyandang kerap kali bergantung faktor-faktor penyebab yang dialaminya serta variabel-variabel di dalam dirinya, terutama persepsi, kebutuhan,

nilai, kemampuan, harapan, pengalaman dan perasaanya. Dalam kaitan ini dikenal adanya penyandang masalah ganda, baik individu maupun keluarga (Soetarao: 2007).

Kemudian, Soetarso lebih lanjut menguraikan, masalah sosial juga dapat memengaruhi warga masyarakat yang mengalami kerentanan, yaitu mereka yang karena keterbatasan dalam kehidupannya mudah terjerumus sehingga mengalami masalah sosial. Mereka ini antara lain anak dan remaja, khususnya yang urbanisan dengan pendidikan dan keterampilan terbatas, tenaga kerja perempuan di perusahaan atau industri, pekerja migran perempuan, pembantu rumah tangga, serta kepala rumah tangga perempuan yang bekerja. Masalah sosial juga memengaruhi kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan serta kehidupan bernegara, terutama karena terkurasnya sumber-sumber yang seharusnya dapat didayagunakan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat. Contoh, terjadinya berbagai bentuk kerusuhan sosial di Indonesia pada saat ini (Soetarso: 2007).

Akar Masalah Sosial di Indonesia

Akar masalah sosial di Indonesia yang saling berkaitan (Soetarso: 2007) adalah:

1. jumlah penduduk yang besar,
2. besarnya jumlah penduduk miskin,
3. tingkat pendidikan dan kesehatan bagian terbesar penduduk yang rendah, terutama gizi buruk yang dialami anak baduta dan balita
4. Kesenjangan yang lebar antara: Pemerintah dan masyarakat, Pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial, Pembangunan kota dan pembangunan desa,

Pembangunan di Jawa dan pembangunan di luar Jawa, Penduduk kaya dan penduduk miskin, Retorika dan fakta.

5. Pembangunan nasional yang sangat sentralistis di masa orde baru,
6. Fundamen ekonomi dan moneter yang sangat lemah
7. Kerusakan lingkungan hidup yang sangat parah, termasuk semakin habisnya hutan dan tambang,
8. Kerawanan terhadap bencana, baik karena peristiwa alam, perilaku manusia, dan kombinasi keduanya,
9. Kerusakan moral bangsa selama rezim orde baru,
10. Ketiadaan supremasi hukum,
11. Lemahnya penegakan HAM,
12. Sangat maraknya KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme)
13. Rendahnya kemampuan bangsa secara keseluruhan, termasuk ketidakmampuan menyediakan instruktur pembangunan (jalan, listrik, telepon, dan air).

Masalah Sosial yang Dihadapi Bangsa Indonesia

Beberapa masalah sosial yang dihadapi bangsa Indonesia yang cukup menonjol adalah sebagai berikut:

- a. Kemiskinan
- b. Pengangguran
- c. Kejahatan
- d. Kenakalan Anak dan Remaja
- e. Penyalahgunaan Narkoba
- f. Pornografi, Pornoaksi, dan Prostitusi
- g. Perjudian

Peta Sosial ekonomi Ummat

- h. Perkosaan
- i. Gangguan Kejiwaan,
- j. J. Masalah Bencana
- k. Keterlantaran Anak
- l. Lanjut Usia Terlantar
- m. Masalah Kecacatan
- n. Buruknya Jaminan Sosial
- o. Konflik Sosial
- p. Kerusuhan Sosial
- q. Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan
- r. Masalah Pengungsi
- s. Masalah HIV/ AIDS
- t. Masalah Diskriminasi dan Ketidakadilan
- u. Masalah Daerah Kumuh
- v. Kondisi Kesehatan Masyarakat yang Buruk
- w. Disharmonisasi Sosial
- x. Menurunnya Solidaritas Sosial
- y. Stres, Depresi, dan Bunuh Diri
- z. Disorganisasi Keluarga

Daftar Pustaka

Huraerah, A. (2008). *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat; Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Humaniora.

BAB III

Kemiskinan

Kemiskinan dalam perspektif PNPM Mandiri Perkotaan

- **Pasang Surut Angka Kemiskinan**

Suatu referensi dari buku “*Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kota*” pada PNPM Mandiri Perkotaan,¹ dijelaskan bahwa roda pembangunan Indonesia sejak tahun 1976 telah berhasil menurunkan angka kemiskinan setiap tahun. Namun setelah satu dekade, mendadak jumlah orang miskin meledak lagi pada tahun 1997-1999 akibat krisis ekonomi berkepanjangan. Perkiraan Bank Dunia (2004) sebanyak 114,8 juta jiwa (53,4%) memiliki pengeluaran di bawah garis kemiskinan yang dipatok sekitar US\$ 2 perkapita per hari

¹ Booklet yang disusun oleh Tim Program PNPM Mandiri Perkotaan yang merupakan buku bacaan untuk pemerintah daerah, masyarakat dan pendamping (fasilitator PNPM) dalam memahami potret kemiskinan di Indonesia.

dan sebagian besar lagi terancam untuk jatuh di bawahnya (lihat gambar).

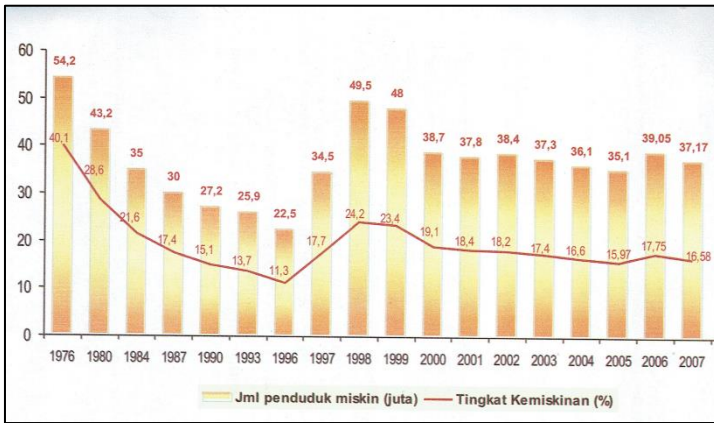
Menurut Gambar tersebut, pada tahun 2007, barisan penduduk miskin masih 16,6 % dari seluruh penduduk. Meski demikian sebenarnya keadaan sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan Jumlah terparah sebesar 24 % pada tahun 1998.

Faktor paling berpengaruh adalah stabilitas harga bahan makanan dan bahan bakar minyak (BBM). Terbukti kenaikan BBM dan Sembako di tahun 2006 membuat angka kemiskinan naik lagi. Tantangan yang sama diperkirakan muncul di tahun 2008, di tengah prediksi optimis untuk menurunkan angka kemiskinan.

Bila dihitung perbulan, hanya 36, 146 juta jiwa (16,66%) yang mampu makan tiga kali sehari. Padahal untuk tiga kali makan (2.100 kilo kalori) banyak keluarga harus mengabaikan dulu kebutuhan lain-lain seperti rumah, pendidikan, kesehatan, maupun transportasi. Apa artinya? Ternyata bekerja mati-matian hanya menghasilkan pendapatan sedikit yang hanya cukup buat makan seadanya sehingga menurunkan kualitas manusianya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2002 menempatkan Indonesia unggul dari Vietnam pada tingkat pendapatan, akses air bersih dan kecukupan gizi balita, namun tingkat pendidikan dan kesehatan lebih tertinggal. Selain itu ketidaksetaraan peran perempuan Indonesia juga lebih besar dibandingkan Thailand dan Filipina.

Gambar
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Indonesia 1976-2007

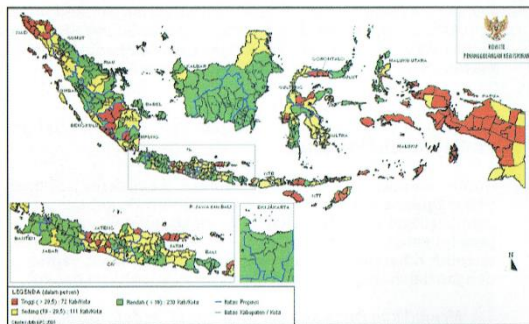


Sumber: PNPM Mandiri Perkotaan (Pronangkis Kota).

▪ **Persebaran Penduduk Miskin**

Penduduk Miskin Indonesia tersebar di berbagai wilayah sehingga menyebabkan ketimpangan. Menurut BPS, 70% lebih penduduk miskin berada di Jawa dan Bali karena lebih dari 60% tinggal di kawasan ini. Namun, persentase kemiskinan tertinggi terdapat di kawasan Timur. Berikut ini Peta kemiskinan di Indonesia.

Gambar
Prosentase Penduduk Miskin, berdasarkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) tiap Kota/Kab. Tahun 2003



Sumber: PNPM Mandiri Perkotaan (Pronangkis Kota).

▪ **Strategi Nasional Pembangunan Kemiskinan (SNPK)**

Negara-negara di dunia telah bermufakat mengurangi jumlah penduduk miskin hingga setengahnya pada tahun 2015 melalui penyepakatan Tujuan Pembangunan Millenium (Millennium Development Goal - MDGs). Komitmen tersebut menjadi dasar perjuangan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Seluruh pihak (*stake holders*) baik pemerintah, swasta dan masyarakat wajib bersama-sama meneguhkannya sebagai gerakan nasional, sebab terbebas dari kemiskinan adalah hak azasi semua anak manusia.

Indonesia mendorong pengarusutamaan (*mainstreaming*) kebijakan nasional agar benar-benar memenuhi hak warga miskin. Oleh sebab itu disusunlah Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) sebagai pedoman (*guidance*) yang memberi arah agar penanggulangan kemiskinan terintegrasi dan tidak berjalan sendiri-sendiri (sektoral).

▪ **Strategi Pengembangan Kapasitas Pemda dalam PNPM Mandiri Perkotaan**

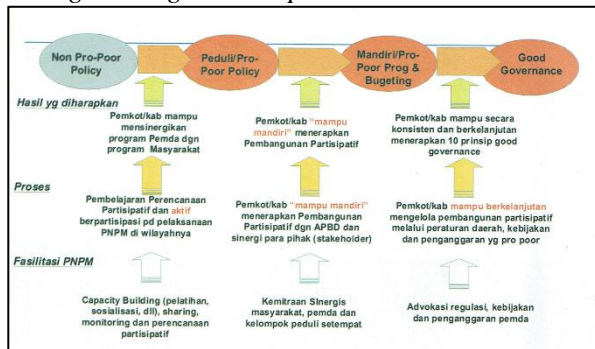
Untuk mendukung pengarusutamaan kebijakan nasional penanggulangan kemiskinan, PNPM Mandiri Perkotaan selain memberdayakan masyarakat juga mengoptimalkan peranan penuh Pemda Kota/Kab dan seluruh stake holders. Orientasi tersebut diharapkan tercapai secara bertahap (lihat gambar), dengan beberapa proses dan teknis fasilitasi sebagai berikut:

- a. Menjadikan Pemda Kota/Kab proaktif peduli dan memiliki kemampuan menyusun kebijakan yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro poor*). Kebijakan tersebut harus mencerminkan sinergi antara program Pemda dengan

program masyarakat. Sinergitas diperoleh melalui pembelajaran intensif terhadap proses perencanaan partisipatif PNPM di wilayahnya. Untuk menunjangnya PNPM melakukan penguatan kapasitas (Capacity Building) melalui kegiatan sosialisasi, komunikasi, pelatihan, sharing, monitoring maupun perencanaan partisipatif.

- b. Menjadikan Pemda Kota/Kab mandiri dalam menerapkan pembangunan partisipatif melalui sinergi penyusunan program dan penganggaran yang berpihak kepada masyarakat miskin. Pendampingan yang dilakukan oleh PNPM adalah menjembatani kemitraan sinergis antara masyarakat, pemda dan kelompok peduli setempat.
- c. Menjadikan Pemda Kota/Kab mampu mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* secara berkesinambungan melalui pengelolaan pembangunan partisipatif yang konsisten didukung dengan kebijakan dan penganggaran yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro poor*). Pendampingan yang dapat dilakukan oleh PNPM melalui advokasi regulasi, kebijakan dan penganggaran pemda.

Gambar
Strategi Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah



Sumber: PNPM Mandiri Perkotaan (Pronangki Kota).

▪ **Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)**

Mengingat pentingnya SNPK, maka dibentuk tim khusus dengan nama KPK (Komite Penanggulangan Kemiskinan) berdasarkan Keppres No. 124 tahun 2001 dan Keppres No. 8 tahun 2002, untuk merealisasikannya. Tak berapa lama KPK kemudian mengesahkan dokumen IPRSP (Interim Poverty Reduction Strategy Paper) sebagai 4 langkah panduan penyusunan dokumen strategi nasional penanggulangan kemiskinan, yang terdiri dari 1) kajian persoalan kemiskinan, 2) kaji ulang kebijakan dan program, 3) perumusan kebijakan dan program, serta 4) pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi.

Amanah UUD 1945 berupaya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Karenanya, visi (strategi) SNPK dalam menanggulangi kemiskinan adalah mewujudkan terpenuhinya hak-hak dasar yang menjamin harkat dan martabat warganegara, antara lain:

- a. Perluasan kesempatan masyarakat, laki-laki maupun perempuan, dalam memenuhi hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup berkelanjutan,
- b. Penguatan kelembagaan masyarakat untuk menggerakkan partisipasi dalam pengambilan keputusan,

- c. Peningkatan kapasitas masyarakat miskin, Perlindungan Sosial kepada kelompok rentan (perempuan, orang jompo, cacat, anak terlantar, fakir miskin),
- d. Mengembangkan kerjasama internasional dan kemitraan Global.

- **Kedudukan SNPK**

SNPK merupakan dokumen Strategi, Kebijakan dan Rencana Aksi guna mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan. SNPK tidak berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2004-2009 dan Rencana Kerja Pemerintah yang telah disusun.

Di tingkat Propinsi, Kabupaten dan Kota, SNPK menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) dengan memperhatikan karakteristik kemiskinan lokal tiap daerah.

- **Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)**

Setiap Propinsi dan Kota/Kabupaten harus memiliki Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) untuk 'menerjemahkan' SNPK. Berlakunya otonomi daerah, menjadikan kota/kabupaten berposisi strategis dalam penanggulangan kemiskinan karena kedekatannya dengan karakteristik persoalan kemiskinan di wilayahnya masing-masing. SPKD Kota/Kabupaten berperan dalam:

1. Sinkronisasi vertikal dalam upaya penanggulangan kemiskinan dengan SPKD Propinsi dan SNPK
2. Sinkronisasi horizontal dengan SPKD Kota/Kabupaten lain untuk mengatasi berbagai persoalan serupa.

Sebagai pedoman, SPKD memudahkan kota/kabupaten untuk memasukkan agenda penanggulangan kemiskinan dalam program perimbangan yang didanai APBD. Untuk mengaitkan SPKD dengan APBD maka setiap kota/kabupaten perlu menyusun dokumen Pronangkis (Program Penanggulangan Kemiskinan) kota/kabupaten.

- **Integrasi SPKD dengan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Sebagai dokumen pengarah kebijakan penanggul_anga~ kemiskinan, SPKD tidak berdiri sendiri, melainkan stnerqts dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), RKPDP (Rencana Kerja Pembangunan Daerah), dan RAPBD (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), mengacu pada dokumen perencanaan nasional. Dengan demikian kebijakan daerah dan alokasi anggaran diharapkan searah untuk menanggulangi kemiskinan. Disini posisi SPKD sesuai dengan UU No 25/2004 dan UU no 17 /2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan, yaitu menerjemahkan RPJMD dengan tetap mengedepankan karakteristik lokal.

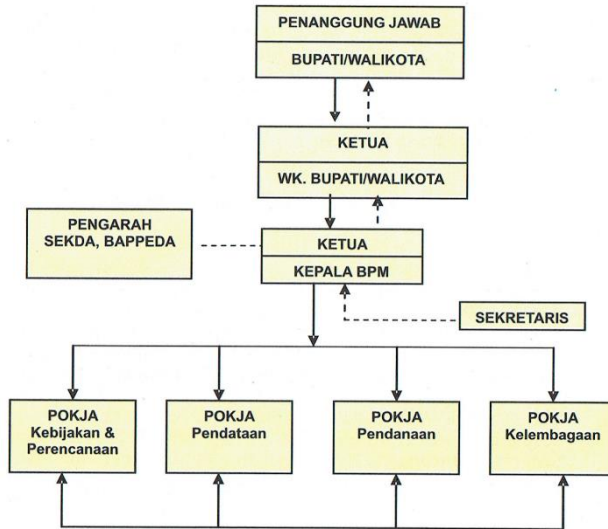
- **Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)**

1. Struktur dan Penanggung jawab TKPKD SNPK adalah produk KPK. Di daerah strategi tersebut dibuat oleh TKPKD dan disebut dengan SPKD.

Sebagai Tim lintas sektoral, TKPKD adalah wadah bagi para pelaku untuk berkoordinasi agar strategi, kebijakan, program, dan kegiatan penanggulangan kemiskinan tersinkronisasi. Sinkronisasi penanggulangan kemiskinan di tingkat Kota/Kabupaten dipertanggungjawabkan TKPKD kepada Bupati/Walikota.

Masa depan kesejahteraan rakyat miskin Kota/Kabupaten berada di pundak TKPKD. Sebab tupoksi TKPKD yang paling strategis adalah memfasilitasi perumusan SPKD, yang dibuat bersama dalam forum antar dinas yang disebut dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Forum tersebut wajib melibatkan juga komponen masyarakat, LSM, dunia usaha, akademisi bahkan jurnalis agar keterwakilan publik terjaga. Selain itu, demi menunjang koordinasi lintas sektor maka ditempatkan wakil kepala daerah sebagai coordinator TKPKD.

Gambar
Struktur Tim Koordinasi Penanggulangan Daerah (TKPKD)



Sumber: PNPM Mandiri Perkotaan (Pronangkis Kota).

2. Aktivitas TKPKD dan Hasil Yang Diharapkan
Keberadaan TKPKD terdapat di tingkat Propinsi dan di tingkat Kota/kabupaten. Lingkup aktivitasnya dapat dibagi dalam tiga bagian, yaitu Perencanaan, Koordinasi dan Pelaporan (Tabel).

Tabel
Mekanisme Aktivitas TKPKD

Tahap	Mekanisme Pelaksanaan
1. Perencanaan	
Semua satkeholders dilibatkan dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan dilakukan melalui Musyawarah, dengan memperhatikan skala prioritas dan kondisi lokal Hasilnya didokumentasikan
2. Koordinasi	
a. Koordinasi TKPKD	minimal 2 kali setahun atau sesuai dengan kebutuhan.
b. Koordinasi antar POKJA	minimal 3 bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan.
c. Koordinasi internal POKJA	minimal 2 bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
d. Koordinasi dengan stakeholders dan masyarakat	Hasil koordinasi dibawa ke dalam konsultasi publik, kunjungan kerja, lokakarya, dengar pendapat dengan legislatif, pengembangan labsite (laboratorium percontohan) bersama. ⁶
3. Pelaporan	
TKPKD Kabupaten/ Kota melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada TKPK Provinsi secara berkala	<ul style="list-style-type: none"> minimal 3 bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan. Hasil kegiatan di publikasikan kepada masyarakat

Sumber: PNM Mandiri Perkotaan (Pronangkis Kota)

Perempuan pada Konteks Kemiskinan

Dalam buku “*DIMENSI KEHIDUPAN PEREMPUAN Refleksi Pengalaman dan Kajian tentang Perempuan dan Permasalahannya*” yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Potensi Perempuan (LP3 KNPI Propinsi Sulsel, 2010: 25-35), Samsang menyebutkan bahwa kemiskinan bukan fenomena musiman yang serta-merta muncul begitu saja, tetapi telah berproses panjang bahkan menyatu dengan kehidupan perempuan. Kemiskinan membuat perempuan sulit membangun komunikasi dengan warga sekitar dan aparat pemerintah. Mereka merasa diri tidak pantas terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan memberikan pendapat atau menyuarakan aspirasinya dalam berbagai pertemuan. Kemiskinan perempuan dipengaruhi oleh faktor seperti tradisi, jender dengan implikasi yang kompleks dan negatif pada status kesehatan dan pendidikan perempuan.

Tingginya angka kematian ibu adalah salah satu bukti nyata tentang gawatnya kemiskinan dan status kesehatan perempuan. Angka putus sekolah anak perempuan setelah sekolah dasar masih tetap lebih tinggi dibandingkan dengan anak laki-laki, karena dalam keluarga miskin yang terdorong keluar dari jalur pendidikan formal biasanya adalah anak perempuan lebih dahulu, dan hal ini mengakibatkan terpusatnya pekerja perempuan di sektor yang rendah pendidikan, rendah ketrampilan dan rendah upah.

Berdasarkan hasil penelitian Susenas jumlah perempuan umur 10 tahun keatas yang belum atau tidak pernah sekolah dua kali jumlah laki-laki (11,56 % : 5,43 %). Kesemuanya secara tersendiri maupun bersama-sama menggambarkan bahwa kemiskinan masih melekat dan akrab dengan perempuan.

Profil perempuan digambarkan sebagai manusia yang harus hidup dalam situasi dilematis. Di satu sisi, perempuan dituntut untuk berperan di semua sektor, namun di lain sisi muncul tuntutan agar perempuan tidak melupakan "kodrat"nya sebagai perempuan. Tuntutan demikian membuat perempuan memikul beban yang berat (*double burden*). Peran perempuan yang dikonstruksi oleh sosial-budaya masyarakat dalam kodrat, dibiarkan maknanya menjadi suatu yang menempel pada perempuan dan menjadi citra diri perempuan. Citra tersebut akhirnya oleh pemerintah dilembagakan dalam program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) melalui Panca Dharma Wanita, pemerintah telah membakukan konsep perempuan ke dalam lima peran. Pertama, perempuan adalah istri pendamping suami. Kedua, perempuan adalah ibu pendidik dan pembina generasi muda. Ketiga, pengatur ekonomi rumah tangga. Keempat, sebagai pencari nafkah tambahan. Kelima, sebagai anggota masyarakat, terutama organisasi wanita, badan sosial, atau lainnya yang menyumbang pada masyarakat.

Dalam realitas kehidupan, kodrat bukan nilai yang perempuan hayati dan peran ganda bukan hal yang baru. Sejak kecil perempuan terdidik untuk mampu bertahan hidup dan menghidupi keluarganya dengan bekerja. Pembangunan (industrialisasi) memiskinkan perempuan, mesin dan tenaga kerja terampil menyingkirkan tenaga perempuan dari pekerjaannya. Dalam dunia kerja, hampir sebagian besar perempuan masih kurang memiliki keterampilan. Lagi pula perempuan dibatasi oleh nilai-nilai kultural mengenai jenis pekerjaan yang boleh digeluti. Berbeda dengan kaum lelaki yang bebas memperoleh pekerjaan dan pendidikan untuk menunjang pekerjaannya. Padahal perempuan khususnya perempuan yang miskin

merupakan tenaga kerja utama, sama dengan laki-laki dalam keluargamereka. Pada kenyataannya, perempuan selalu diposisikan sebagai pencari nafkah tambahan.

Kemiskinan akan sulit dikurangi jika tidak menghilangkan diskriminasi gender. Membiarkan kebodohan, kemiskinan dan kesakitan perempuan sama artinya dengan mempersiapkan generasi yang bodoh dan miskin. Tanpa kesetaraan gender, kemiskinan dan keterbelakangan tidak mungkin dapat diatasi sepenuhnya.

Bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang memiskinkan perempuan adalah sebagai berikut:

- Marjinalisasi (peminggiran) ekonomi

Salah satu bentuk peminggiran ekonomi perempuan adalah lemahnya kesempatan perempuan terhadap sumber-sumber ekonomi seperti tanah, kredit dan pasar.

- Subordinasi (penomorduaan)

Subordinasi terhadap perempuan bermakna pada perempuan tidak memiliki peluang untuk mengambil keputusan bahkan yang menyangkut dirinya. Perempuan diharuskan tunduk pada keputusan yang diambil oleh laki-laki.

- Beban kerja berlebih.

Dalam satu masyarakat peran dibagi menjadi produktif, reproduktif, memelihara masyarakat, dan politik masyarakat. Perempuan umumnya memiliki tiga peran yang lebih dominan yaitu produktif, reproduktif, dan memelihara masyarakat. Sementara peran politik dalam masyarakat lebih dominan laki-laki. Perempuan menanggung dua jenis pekerjaan yang berat, reproduktif dan produktif, sementara laki-laki hanya produktif dan sedikit reproduktif. Akibat beban pekerjaan yang berat ini,

perempuan tidak memiliki waktu untuk membicarakan hal-hal di luar rutinitasnya seperti membaca koran, mendengarkan informasi atau hadir dalam pertemuan masyarakat.

- **Cap-cap negatif (stereotipe)**

Perempuan sering digambarkan pada bentuk-bentuk yang belum tentu benar, seperti sering digambarkan emosional, lemah, tidak mampu memimpin dan tidak rasional, sehingga menutup kesempatan perempuan diberbagai bidang baik ekonomi, politik maupun budaya. Di beberapa tempat bahkan kelahiran anak perempuan seringkali tidak diharapkan karena dianggap tidak mampu bekerja produktif dan membantu perekonomian keluarga.

- **Kekerasan**

Bentuk kekerasan dapat berupa fisik maupun psikologis seperti perkosaan, serangan fisik, pelacuran, pornografi, dan pelecehan seksual. Kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah yang kompleks, terjadi karena sebuah konstruksi sosial dan seringkali dibudayakan dalam masyarakat. Perempuan menjadi rentan terhadap tindak kekerasan karena posisinya yang timpang dalam masyarakat dan institusi perkawinan baik secara ekonomi, sosial, politik, maupun emosional.

Daftar Pustaka

- LP3 KNPI Propinsi Sulsel. (2010). *DIMENSI KEHIDUPAN PEREMPUAN Refleksi Pengalaman dan Kajian tentang Perempuan dan Permasalahannya.*
- PNPM Mandiri Perkotaan. *Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kota.*

BAB IV

Pardigma Pembangunan dan Masalah Gender dalam Developmentalisme

Pardigma Pembangunan

Parwoto (PNPM Mandiri Perkotaan: 6-10) dalam *Modul Dasar Komunitas: Tantangan Penanggulangan Kemiskinan*¹ menjelaskan bahwa kata paradigma berasal dari Yunani, semula lebih merupakan istilah ilmiah dan sekarang lebih lazim digunakan dengan arti model, teori dasar, persepsi, asumsi atau kerangka acuan. Dalam bahasa sehari-hari paradigma juga disebut sebagai “cara kita memandang dunia”, bukan dalam arti visual tetapi lebih dalam arti mempersepsi, mengerti atau menafsirkan (Stephen R Covey. 7 Kebiasaan Manusia yang Sangat Efektif).

¹ PNPM Mandiri Perkotaan, yaitu Program Nasional Pemeberdayaan Masyarakat – Mandiri Perkotaan di zaman pemerintahan SBY mulai tahun 2007 sebagai kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan. Sekarang, program ini bertransformasi menjadi Program Kota Tanpa Kumuh (Program KOTAKU) pada pemerintahan Jokowi.

▪ **Pengantar**

Lebih lanjut “paradigma” adalah kumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir seseorang sebagai titik tolak pandangan seseorang. Konsekwensinya paradigma ini juga akan membentuk citra subyektif seseorang mengenai realita dan akhirnya akan menentukan bagaimana seseorang menanggapi realita.

Paradigma adalah sumber dari sikap dan perilaku seseorang, berkenaan dengan tindakan mempersepsi, memahami dan menafsirkan sesuatu hal. Dengan kata lain manakala seseorang menguraikan sesuatu yang dilihat atau dialami, sebenarnya orang tersebut sedang menguraikan pandangannya/anggapannya mengenai hal tersebut atau sebenarnya dia sedang menjabarkan dirinya sendiri, citra subyektifnya, persepsinya, pandangannya yang dilandasi oleh paradigmanya. Penafsiran masing-masing orang tentang sesuatu hal menggambarkan pengalaman orang tersebut sebelumnya.

Semakin sadar seseorang akan paradigmanya yang dipengaruhi oleh pengalaman hidupnya, maka semakin orang tersebut bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang terjadi akibat paradigma yang dianutnya. Dia akan makin terbuka dan terus menguji paradigmanya berdasarkan realita baru yang ditemuinya, mendengarkan orang lain dan bersikap terbuka terhadap persepsi orang lain, sehingga mendapatkan gambaran yang lebih besar dan pandangan yang lebih obyektif sehingga yang terjadi kemudian adalah penguatan atau justeru perubahan paradigma.

Perubahan paradigma menggerakkan seseorang untuk beralih dari satu cara pandang ke cara pandang yang lain. Perubahan

paradigma bersifat kuat. Paradigma seseorang, terlepas dari benar atau salah, adalah sumber dari sikap dan perilakunya, yang akhirnya akan menjadi sumber dari hubungan orang tersebut dengan orang lain.

Hampir setiap terobosan penting di dalam berbagai bidang kehidupan, pada mulanya merupakan pemutusan dengan tradisi, cara berpikir dan paradigma yang lama. Perlu juga selalu diingat bahwa tidak semua perubahan paradigma memiliki arah positif dan tidak semua perubahan paradigma terjadi seketika.

▪ **Pergeseran Paradigma Pembangunan**

Secara singkat dan sederhana terjadinya pergeseran paradigma global didunia ini dapat diuraikan sebagai berikut di bawah ini:

i. Paradigma Ekonomi

Paradigma ekonomi merupakan yang paling tua dan paling dominan dalam menentukan pembangunan. Hal ini disebabkan oleh pengertian ekonomi itu sendiri sebagai “mengatur rumah tangga sendiri” yang dapat dipahami sebagai upaya mengatur kesejahteraan keluarga, komunitas dan bangsa dalam skala yang lebih luas. Pada awalnya (ekonomi klasik) paradigma ini menekankan pertumbuhan dan melihat pembangunan sebagai pembangunan ekonomi (*development economic development*) sehingga ukuran keberhasilan pembangunan adalah pertumbuhan produksi barang dan jasa secara nasional (Produksi Nasional Bruto/Gross National Product). Makin tinggi pertumbuhannya makin berhasil pembangunan suatu bangsa/negara. Paradigma ini juga menekankan perlunya

kebebasan, pemupukan modal dan pembagian kerja (spesialisasi). Kelompok yang tidak puas dengan paradigma ini kemudian melaku pembaruan yang kemudian dikenal dgn Neo Ekonomi yang lebih menekankan pada pemerataan dgn mengukur berapa % dari PNB/GNP diraih oleh penduduk miskin. Meskipun paradigma neo-ekonomi ini masih sangat jelas dipengaruhi nilai-nilai ekonomi klasik, tetapi ada beberapa perbedaan yang fundamental dalam indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur pembangunan dan makna pertumbuhan itu sendiri. Paradigma neo-ekonomi menggunakan indikator dalam mengukur pembangunan sebagai berkurangnya kemiskinan, pengangguran dan berkurangnya kesenjangan. Masih dalam paradigma ekonomi ini muncul juga pandangan (ekonomi politik neo klasik) yang melihat hubungan antara masyarakat maju (kapitalis) dengan masyarakat yang belum maju (pra kapitalis) yang melahirkan eksploitasi dari masyarakat maju kepada masyarakat belum maju sehingga yang terjadi adalah keterbelakangan (*underdevelopment*) dari masyarakat yg belum maju. Meskipun sudah banyak perubahan dalam paradigma ekonomi tetapi perkara utamanya tetap pertumbuhan dan pemerataan dipercayakan melalui mekanisme penetesan (*trickle down effect*).

ii. *Paradigma Kesejahteraan Sosial*

Pada awalnya paradigma kesejahteraan social ini melihat pembangunan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Indikator pembangunan diukur dari pemenuhan kebutuhan dasar, seperti antara lain MASOL (*Minimum Acceptable*

Standard of Living) yang dikembangkan oleh Doh Joon Chien atau PQLI (*Physical Quality Life Index*) yang sedikit lebih maju dengan mengukur harapan hidup, kematian bayi dan melek huruf sampai dengan yang lebih canggih yang melihat pembangunan sebagai upaya terencana untuk memenuhi kebutuhan sosial yang lebih tinggi, bukan berapa banyak, tetapi berapa baik, bukan kualitas barang tetapi kualitas hidup seperti antara lain keadilan, pemerataan, peningkatan budaya, kedamaian, dsb. (Bauer, 1966; Conyers, 1986). Meskipun telah terjadi banyak perkembangan tetapi perkara utama paradigma ini masih tetap pemenuhan kebutuhan hidup sehingga sering dikritik “mendudukkan masyarakat sebagai obyek bantuan” (Freire, 1984).

iii. *Paradigma Pembangunan Manusia*

Melihat pembangunan sebagai pembangunan manusia untuk mampu berbuat dan menciptakan sejarahnya sendiri. Manusia sebagai fokus utama dan sumber utama pembangunan (Korten). Penghormatan terhadap martabat manusia, pembebasan manusia dari dominasi teknologi (*Illich*), pembebasan manusia dari dominasi pasar (*Ramos*), pembangunan manusia; kelangsungan hidup, kehormatan dan kebebasan (*Goulet*), pembebasan manusia dari dominasi manusia lain melalui proses penyadaran diri (*Freire*). Fokus pembangunan bukan lagi pada ekonomi, social atau teknologi melainkan pada manusia itu sendiri.

... a sense of self worth and a personal capacity for actively participating in life's important decision ...

... social development become the liberation of human being and community from passive recipients towards a developed, active citizenry, capable of participating in in choice about community issues (Thomas, 1984).

Penganut-penganut teori ini adalah Ivan Illich, Denis Goulet, Mahbub ul Haq, Freire, Guerreiro Ramos, David Korten, dsb. Pergeseran paradigma seperti tersebut di atas bergerak dari paradigma ekonomi ke paradigma kesejahteraan sosial akhirnya ke paradigma pemanusiaan. Pembangunan menurut kedua paradigma terdahulu (ekonomi dan kesejahteraan sosial) adalah pembangunan yang berkiblat ke manusia, sedangkan pembangunan menurut paradigma pemanusiaan adalah pembangunan manusia itu sendiri untuk menjadi manusia yang utuh dan merdeka atau secara ekonomi produktif dan secara sosial efektif (Soedjatmoko).

▪ **Pergeseran Paradigma Pembangunan di Indonesia**

Pergeseran paradigma global tersebut juga terjadi di Indonesia, dari Repelita ke Repelita sampai ke Propenas.

i. Repelita 1 (1979-1974)

Kita baru saja lepas dari musibah nasional G 30 S sehingga nuansa yang dominan mempengaruhi paradigma pembangunan adalah keamanan dimana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan stabilitas, sehingga Trilogi Pembangunan dimulai dari Stabilitas, Pertumbuhan dan baru Pemerataan. Peran utama pemerintah adalah menciptakan suasana aman dan stabil.

ii. Repelita 2 (1974-1979)

Pada waktu itu suasana sudah cukup tenang dan stabil sehingga mulai berkembanglah paradigma ekonomi untuk memperbesar kue pembangunan dengan meningkatkan pertumbuhan. Trilogi Pembangunan dengan serta merta diubah urutannya dari Stabilitas, Pertumbuhan dan Pemerataan menjadi Pertumbuhan, Stabilitas dan Pemerataan. Dengan menerapkan pendekatan pertumbuhan ini berarti prioritas pembangunan diberikan kepada kegiatan-kegiatan yang dianggap dapat menjamin terjadinya pertumbuhan, termasuk prioritas pilihan model dan pelaku pembangunan yang akhirnya jatuh ke sector formal yang dianggap paling mampu menjadi mitra pemerintah dalam menciptakan pertumbuhan. Pada masa inilah merupakan masa kebangkitan sector formal dengan konsekuensi logis terpinggirkannya sector informal baik kegiatannya maupun pelakunya dengan akibat turutannya dari proses marjinalisasi ini adalah kesenjangan dan keterbelakangan. Pintu terjadinya kemiskinan structural terbuka lebar.

iii. Repelita 3 (1979-1984) s/d Repelita 5 (1989-1994)

Berangkat dari situasi menganganya jurang kesenjangan, keterbelakangan dan munculnya banyak OKB (orang kaya baru) dan diwarnai dengan banyak protes maka Repelita 3 dirumuskan dengan landasan paradigma yang jauh berbeda yaitu “kesejahteraan sosial” dalam rangka menutup jurang kesenjangan dan keterbelakangan sebagai upaya koreksi terhadap kesalahan pembangunan di masa sebelumnya. Pendekatan yang digunakan adalah “pemerataan”, sehingga dengan serta merta Trilogi Pembangunan urutannya juga

diubah dari Pertumbuhan, Stabilitas dan Pemerataan menjadi Pemerataan, Pertumbuhan dan Stabilitas. Muncullah waktu itu “8 Jalur Pemerataan” yang harus dianut oleh semua instansi dalam mengajukan anggaran biaya pembangunan. Dalam prakteknya pemerataan ini lebih diartikan sebagai pemerataan pembangunan dan pemerataan hasil pembangunan dalam bentuk pelayanan kebutuhan dasar, air bersih, SD Inpres, dsb, dimana masyarakat didudukkan sebagai penerima manfaat yang pasif (obyek bantuan, Freire, 1984). Untuk mengurangi ketimpangan ini kemudian dimunculkan upaya untuk menggalakkan lagi partisipasi masyarakat melalui instruksi Menteri Dalam Negeri dan diterapkannya mekanisme perencanaan dari bawah yang dikenal sebagai P5D. Dalam prakteknya semua gagasan yang indah ini tidak diterapkan sepenuh hati. Malah pergeseran paradigma ini tidak pernah secara sistematis dibahas apa pengaruhnya terhadap pembangunan daerah, posisi masyarakat dan perubahan peran para pelaku pembangunan. Akibatnya alih-alih mengurangi kesenjangan yang terjadi justru; (i) pemerataan terbatas pada apa yang disebut pemerataan pembangunan dan hasil pembangunan, (ii) merebaknya semangat “project oriented” yang melanda semua pelaku pembangunan, sehingga tupoksi tidak jalan karena tidak ada proyek dan tumbuhnya para konsultan maupun kontraktor yang bermental ABS (asal babak senang), (iii) merebaknya semangat apatisisme dari masyarakat sebagai penerima manfaat proyek, masyarakat menjadi pasif tinggal menunggu saja, (iv) yang sangat

menyedihkan adalah justeru kesenjangan makin melebar karena justeru yang menikmati pembangunan adalah pelaku pembangunan (kaum elit) dan bukan pemanfaat (rakyat jelata). Situasi tersebut menunjukkan bahwa yang sangat parah terpengaruh dengan model pembangunan repelita demi repelita dalam masa PJP I adalah mentalitas manusianya, terjadi proses pembodohan, dehumanisasi dan luntarnya nilai-nilai luhur universal (demoralisasi). Marjinalisasi makin keras dan keterbelakangan makin nyata.

iv. *Awal PJP II dan Masa Reformasi dgn Propenas (1999-2004).*

Hal tersebut di atas yang terjadi selama masa PJP I juga disadari dan dilakukan koreksi pada masa pembangunan jangka panjang kedua. Pada waktu Repelita 6 (1994-1999). Kesadaran akan akibat-akibat negatif dari model pembangunan sebelumnya telah membawa model pembangunan yang sangat lain yang dilandasi “paradigma pembangunan manusia” melalui pendekatan pemberdayaan. Dimana urutan prioritas Trilogi Pembangunan tetap Pemerataan, Pertumbuhan dan Stabilitas hanya maknanya berubah dari pemerataan hasil pembangunan menjadi pemerataan kesempatan membangun. Sayangnya penerapan paradigma ini dalam model-model pembangunan kurang dihayati dan kurang tulus dilaksanakan. Setelah pergantian pemerintahan maka Repelita tidak diberlakukan lagi dan disusunlah Propenas (Program Pembangunan Nasional) 1999-2004 dengan tujuan jangka panjangnya adalah : “Terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai,

demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan teknologi, serta memiliki etos kerja yang tinggi dan berdisiplin”.

Prioritas Pembangunan ditetapkan sebagai berikut: 1) Membangun sistem politik yang demokratis serta mempertahankan persatuan dan kesatuan 2) Mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik 3) Mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan yang berdasarkan system ekonomi kerakyatan 4) Membangun kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan ketahanan budaya 5) Meningkatkan pembangunan daerah.

Dari judul prioritas pembangunan yang dicanangkan melalui Propenas jelas prioritas pembangunan manusia menjadi kabur atau melemah padahal persoalan utama yang kita hadapi sebenarnya adalah adanya krisis moral dan kepemimpinan yang mampu menjadi teladan pelaku moral. Disisi lain secara umum terlihat pengaruh paradigma ekonomi dan kesejahteraan social sangat kuat, mungkin ini adalah dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan, tetapi jelas tanpa pembangunan manusia dari aspek kritis manusia tidak mungkin dicapai prioritas pembangunan di atas sebab

semuanya itu memerlukan pelaku yang memiliki komitmen moral yang tinggi yang mampu menjadi teladan bagi sesama.

Masalah Gender dalam Developmentalisme

Masalah gender dalam developmentalisme (Fakih, 2000: 99-94) bahwa developmentalisme juga menghasilkan pelanggaran penindasan perempuan di Dunia Ketiga. *Women in Development* (WID) sebagai bagian utama developmentalisme dirancang untuk mendorong keterlibatan kaum perempuan dalam pembangunan, dan tidak mempersoalkan manifestasi ketidakadilan dan diskriminasi gender. Oleh karena itu program WID lebih mengakibatkan pengekanan dan penjinakkan, ketimbang pembebasan, kaum perempuan di Dunia Ketiga. Tanpa mempertanyakan masalah gender, upaya-upaya program dan pembangunan perempuan apa pun tidak akan berhasil memunculkan masalah utama kaum perempuan.

Ada beberapa kajian yang telah dilakukan tentang isu dan masalah perempuan di Dunia Ketiga. Beberapa peneliti memfokuskan kepada perspektif ekonomi dan politik serta menggunakan analisis kelas untuk memahami marginalisasi, subordinasi, kekerasan dan penindasan kaum perempuan di Dunia Ketiga (Stamp, 1989; Boserup, 1970). Peneliti lain menggunakan kerangka kerja alternatif untuk memahami perempuan dan isu-isu di Dunia Ketiga, misalnya kerangka kerja diskursus dan produksi pengetahuan (Mueller, 1987); kerangka kerja dominasi kultural yang berkaitan dengan isu kealaman dan lingkungan (Shiva, 1989); maupun banyak perspektif feminis lainnya.

Tetapi beberapa di antara peneliti itu, sejauh penulis ketahui, benar-benar melihat isu perempuan dengan menggunakan analisis

dialektis atau overdeterminis. Karena masalah perempuan di Dunia Ketiga tidak sederhana maka dibutuhkan pendekatan yang komprehensif. Alasan penggunaan pendekatan dialektis atau overdeterminisme dalam menilai isu perempuan adalah untuk menghindari penyederhanaan yang berlebihan dalam memahami masalah perempuan dan guna menjauhi pendekatan esensialis dan reduksionis. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan dialektika adalah bahwa permasalahan perempuan tidak dapat dipahami hanya dengan dan melalui satu perspektif, misalnya analisis kelas atau ekonomi, tetapi membutuhkan analisis ekonomi-politik, dominasi kultural, penindasan politik, ketidakadilan gender dan kerusakan alam yang saling terkait dan overdeterminasi.

Untuk memahami dominasi terhadap perempuan di Dunia Ketiga, bagian ini akan memusatkan analisis kepada konsep "*Women in Development*" (WID). Alasan mendudukan WID sebagai sasaran analisis didasarkan pada asumsi bahwa seseorang tidak dapat memahami isu-isu perempuan Dunia Ketiga, tanpa mempertimbangkan agenda WID. Memandang isu-isu perempuan dalam Pembangunan dengan menggunakan perspektif dialektis berarti menggunakan analisis politik, ekonomi, sosial dan alam untuk melihat pembangunan. Dengan kata lain, studi ini memandang isu perempuan dalam konteks Pembangunan dari beberapa lensa, misalnya dengan menggunakan analisis kelas ekonomi Marxian, analisis kekuasaan dan diskursus Foucaultian, analisis hegemoni kultural dan politik Gramscian dan analisis Ekofeminisme maupun analisis feminis lainnya. Analisis ini, tidak mewujud secara independen, tetapi saling terkait.

Titik berat perhatian bagian ini adalah dominasi perempuan dan hubungannya dengan konsep WID, yang mengasumsikan bahwa WID adalah bagian dari Developmentalisme. Sementara Pembangunan menjadi "agama baru" bagi berjuta-juta rakyat, WID juga menjadi "satu-satunya" kebijakan resmi yang berkenaan dengan perempuan di sebagian besar bangsa Dunia Ketiga. Kebijakan ini memberi janji-janji kepada berjuta-juta perempuan di Dunia Ketiga. WID dimulai pada awal 1970an ketika ada peningkatan tekanan yang diletakkan pada peran perempuan dalam pembangunan ekonomi internasional. Diskursus WID dimulai ketika pemerintah AS *mengumumkan the Percy Amendment* bagi Undang-undang Bantuan Luar Negeri 1973 yang menetapkan perhatian khusus kepada perempuan dalam program Pembangunan internasional. Amandemen AS ini mempengaruhi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada 1974 ketika PBB menetapkan Dasawarsa Perempuan (1976-1985). Departemen WID dalam *Agency for International Development* (AID) juga dibentuk pada 1974, dan sejak itu banyak pengetahuan, kebijakan, sumber daya dan informasi yang diciptakan dan dimasukkan ke dalam kehidupan berjuta-juta perempuan bangsa Dunia Ketiga. WID adalah jawaban bagi kritik-kritik yang ditujukan kepada Developmentalisme ketika Developmentalisme didakwa telah mengabaikan perempuan dalam proses Pembangunan.

Bagaimana Developmentalisme, khususnya Revolusi Hijau, melanggengkan peran dan posisi ketertindasan perempuan di Dunia Ketiga? Beberapa studi mengungkapkan bahwa kaum perempuan di kawasan pedesaan telah menjadi korban Revolusi Hijau. Contohnya, secara tradisional kaum perempuan di Jawa memiliki peran penting dalam produksi pangan, khususnya selama masa pemanenan. Masa

pemanenan sebagai ketja yang sangat intensif dari seluruh kegiatan pertanian, memerlukan pasokan buruh dalam jumlah banyak pada periode yang terkonsentrasi itu. Kebanyakan perempuan, terutama dalam rumah tangga yang lebih miskin, mendukung keluarganya dengan menyerahkan dirinya sendiri guna melakukan pemanenan dan kerja pertanian lainnya. Beberapa kajian melaporkan bahwa, pada umumnya, dalam rumah tangga tenniskin kaum perempuan memberi sumbangan relatif paling besar kepada subsistensi, dan sumbangan mereka diakui oleh seluruh anggota keluarga dengan sangat eksplisit. Peran perempuan merupakan hal krusial bagi produksi beras, bukan saja dalam hal jam kerja, tetapi juga dalam hal intensitas dan pengaturan waktu pada periode kegiatan tersibuk. Tetapi, sejak Revolusi Hijau, yang secara sistematis memakai tipe padi baru dan teknologi baru yang diperkenalkan oleh program itu, telah mengubah peran dan kerja perempuan di pedesaan Jawa. Meskipun input buruh perempuan dari seluruh buruh per hektar lebih besar ketimbang buruh laki-laki, program Revolusi Hijau telah mengganti peran perempuan dengan teknologi yang dikontrol oleh kaum laki-laki.

Banyak analisis Marxian tentang posisi perempuan memusatkan perhatiannya kepada posisi perempuan yang lebih dikaitkan dengan sistem ekonomi, ketimbang menekankan perhatian pada hubungan gender antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini, perempuan dianggap sebagai bagian dari kelas buruh, yang berarti secara konsisten menempatkan perempuan dalam hubungannya dengan laki-laki di bawah hubungan buruh dengan modal. Penulis akan menggunakan lagi program Revolusi Hijau sebagai studi kasus untuk menjelaskan pendekatan ini.

Pengenalan perekonomian uang tunai (*cash economy*), dan pengejaran kepastian individu melalui akumulasi kekayaan materi yang dikembangkan oleh Revolusi Hijau disalurkan melalui kaum laki-laki. Pola umum program Revolusi Hijau adalah membantu keluarga petani melalui "kepala rumah tangga" yang diklasifikasikan sebagai laki-laki, sekali pun secara fisik ia tidak ada di rumah. Program Revolusi Hijau jarang sekali memasukkan perempuan dalam pelatihan produksi beras, meskipun faktanya menunjukkan bahwa input kerja dalam produksi beras disumbangkan oleh perempuan. Kaum perempuan acapkali bertanggung jawab atas pemeliharaan babi dan ayam di halaman belakang, tetapi mereka tidak diakui sebagai pemelihara peternakan. Meski faktanya sangat diketahui bahwa kaum perempuan secara aktif terlibat dalam keputusan yang mempengaruhi pertanian, dan hampir selalu menguasai pemasaran hasil-hasil pertanian, mereka tidak pernah menjadi sasaran utama program-program Revolusi Hijau. Melalui Revolusi Hijau, petani (laki-laki) Jawa masuk ke dalam cara produksi kapitalis, dan hubungan ini mempengaruhi hubungannya dengan istrinya. Dalam proses hubungan kelas fundamental ini, pemilik tanah atau petani kapitalis mengambil nilai lebih dan membagikan sebagian nilai lebih itu kepada kelas menengah perantara lainnya seperti negara (pajak), bankir, tuan tanah dan lain-lain. Para petani tak bertanah lalu pulang ke rumah dan menyerahkan sebagian upahnya kepada istrinya. Hubungan antara petani tak bertanah dan perempuan berlangsung dalam cara produksi feodalistik yaitu, dengan kata lain, petani tak bertanah membeli perempuan untuk melayani keluarganya.

Dampak lain terhadap perempuan yang diakibatkan oleh hubungan kapitalis di kawasan pedesaan adalah penghapusan hak

mereka atas tanah di pedesaan negara-negara Dunia Ketiga. Boserup menjelaskan, bahwa di Asia Selatan, pemerintahan kolonial dan pascakolonial secara jelas mengalihkan hak-hak tanah perempuan kepada laki-laki seperti yang teramati di Afrika. Di kalangan keluarga matrilineal di Malaya masa kolonial, misalnya, banyak tanah yang secara tradisional diwariskan dari ibu kepada anak perempuannya.

Bahkan setelah WID diperkenalkan, perempuan pedesaan di negeri-negeri Dunia Ketiga justru terjerat oleh dunia kapitalis internasional. Mies (1986) mengusulkan bahwa WID harus dipandang sebagai satu komponen dalam pembagian kerja yang kompleks dan hirarkis yang mengatur kerja internasional, komoditas, dan pasar modal dalam tata dunia kapitalis." Di sini perempuan dianggap memiliki peran reproduktif dalam kelas buruh. Keberadaan proses kelas utama dalam cara produksi kapitalis juga memerlukan pasokan buruh murah. Dengan demikian, dalam konteks ini, WID memobilisasi kaum perempuan dalam pertanian pedesaan kapitalis maupun pasar dan produksi pangan internasional: Akhirnya, masalah eksploitasi perempuan di Dunia Ketiga tidak berdiri sendiri. Masalah itu berkaitan dengan masalah politik, kultural dan psikologis lainnya. Ini mengingatkan penulis pada apa yang dikatakan Mao Zedong tentang kaum perempuan Afrika. Ia menyatakan bahwa kaum perempuan Afrika memanggul enam gunung di punggungnya: pertama dan kedua adalah penindasannya oleh neokolonialisme dan struktur tradisional; ketiga adalah keterbelakangannya, keempat adalah seorang laki-laki, kelima adalah warna kulit ras: dan keenam adalah, tidak kurang pentingnya, dirinya sendiri. Perempuan menderita karena citra gender yang negatif, dari zaman yang menginternalisasikan ideologi patriarki dan birarei gender.

Penerapan WID secara luas di Dunia Ketiga, memperlihatkan dominasi paradigma Pembangunan Barat, yakni Modernisasi. WID sebagai bagian dari Pembangunan, mampu menciptakan konsep realitas bagi perempuan yang dipecah di semua masyarakat dalam seluruh kelembagaan dan kehidupan pribadinya. Dalam konteks Pembarigunan, WID kemudian digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan hegemoni kapitalis kepada masyarakat yang lebih luas di Dunia Ketiga. Modernisasi menekankan peran penting keluarga dalam penyebaran hegemoni kapitalis. Keluarga ditempatkan dalam kerangka hubungan sosial, politik, ekonomi, dan kultural yang memperkuat tata dunia kapitalis.

WID sebagai bentuk pengetahuan tentang perempuan Dunia Ketiga, juga diciptakan melalui organisasi sosial diskursus Pembangunan sebagai bagian dari projek untuk membawa penduduk baru di bawah aturan disiplin kapitalis maju. Dalam konteks ini, tampak bahwa pengetahuan dan diskursus menjadi alat dominasi. Diskursus dan pengetahuan WID tentang perempuan tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan untuk mengubah nasib berjuta-juta perempuan. Gagasan fungsionalisme dan positivisme dalam WID membuka kemungkinan bagi program WID untuk menguasai dan menghancurkan peluang cara perempuan untuk mengetahui. Pendidikan formal dan nonformal dikendalikan oleh tipe pengetahuan dominan untuk membentuk kesadaran rakyat. WID sebagai pengetahuan baru, muncul sebagai diskursus yang sangat berpengaruh. Mueller (1987) mengidentifikasi hubungan pengetahuan antara profesional pembangunan di Barat dan perempuan di Dunia Ketiga ini sebagai hubungan imperialisme.

Daftar Pustaka

Fakih, M. (2000). *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi di Dunia LSM Indonesia* (2nd ed.). Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR (Anggota IKAPI).

PNPM Mandiri Perkotaan. (n.d.). MODUL DASAR Komunitas: Tantangan Penanggulangan Kemiskinan. Retrieved from <http://kotaku.pu.go.id>

BAB VI

Teknik dalam Assessment Kebutuhan dan Potensi Masyarakat

Dalam buku *“Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat”* oleh Adi (2008: 323-340) suatu kutipan *Many of the things we do each day, we do by habit. Success in life takes effort but it is not difficult and complicated. It is just a matter of knowing what you want, determining how to get it, and making habit of doing these things that you need to do, (Ralph Marstone)*. Bahwa kutipan di diatas ini menggambarkan pentingnya kita mengetahui apa yang akan kita lakukan sebagai salah satu unsur untuk mencapai kesuksesan. Proses assessment adalah suatu tahap dalam pengembangan masyarakat yang membantu pelaku perubahan

untuk mengetahui apa yang ingin mereka lakukan (*knowing what they want to do*) berdasarkan pada pengetahuan tentang kondisi apa yang sudah mereka capai saat ini.

Oleh karena itu, proses assessment menjadi suatu tahapan yang tidak terpisahkan dalam suatu proses pengembangan masyarakat karena assessment adalah suatu proses pengidentifikasian kebutuhan (termasuk di dalamnya masalah yang dirasakan masyarakat) serta potensi yang ada pada masyarakat. Ada ber-bagai alasan mengapa *community worker* mela-kukan assessment, antara lain karena:

1. akan memulai suatu program baru;
2. akan memperluas suatu program yang ada ke area yang bani;
3. akan memulai suatu kerja sama dengan rekanan yang baru; dan
4. akan melakukan perubahan arah dari program yang ada sehingga diperlukan suatu tujuan dan data base yang baru.

Upaya mengumpulkan data dari masyarakat merupakan hal yang sangat diperlukan karena *community worker* belum tentu mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat karena masyarakat itu bersifat dinamis. Begitu pula dengan data tentang potensi dan kebutuhan masyarakat yang dapat berubah dari bulan ke bulan dan dari hari ke hari.

Terkait dengan kebutuhan masyarakat, di bawah ini akan dibahas secara ringkas tentang topik ini secara singkat karena kebutuhan masyarakat adalah topik yang sangat penting dan tidak bisa dilepaskan dalam pembahasan pengembangan masyarakat sebagai bagian dari intervensi komunitas yang mengandalkan masukan data dari masyarakat.

Kebutuhan Masyarakat

Konsep "kebutuhan" menjadi salah satu usur penting dalam pembahasan ini karena proses pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh suatu human service organization haruslah memperhatikan usulan dari komunitas sasaran agar dapat memberikan layanan yang tepat dan dibutuhkan. Akan tetapi, masalah dapat terjadi bila usulan yang diberikan masyarakat ternyata bukan kebutuhan (needs), tetapi keinginan (wants) mereka. Ware dan Goodin (1990:1) membedakan antara konsep kebutuhan dan keinginan, melalui gambaran singkat sebagai berikut: seorang yang menderita anoreksia nervosa (gangguan kejiwaan yang menyebabkan individu tidak makan atau bila terpaksa makan, ia akan berusaha sedapat mungkin untuk mengeluarkan makanan tersebut, misalnya dengan muntahkannya) sebenarnya mempunyai kebutuhan akan makanan, tetapi ia tidak menginginkannya.

Begitu pula pada anak-anak yang hidup di perkotaan, kehadiran rumah "ding-dong" sering kali dijadikan bagian dari kehidupan mereka dan seolah-olah menjadi kebutuhan mereka. Dalam bentuk, yang lebih sederhana adalah kehadiran "rental Play Station" yang merasuki sampai ke gang-gang di ibukota. Kehadiran rental *Play Station* maupun Ding-Dong bagi anak-anak dan remaja tidak jarang justru menguras kantong mereka sehingga hal yang menjadi pertanyaan apakah bermain *Play Station* dan Ding-Dong merupakan kebutuhan mereka ataukah hanya suatu keinginan yang kemudian dieksploitir, dengan kersas tertentu sehingga seolah-olah menjadi bagian dari kehidupan mereka, oleh pihak-pihak tertentu. Keberadaan rental *play station* di beberapa daerah kumuh, tidak jarang juga menjadi pemerasan terselubung bagi para anak jalanan ataupun anak-

anak yang tinggal di lingkungan kumuh. Mereka biasanya menggunakan uang hasil kerjanya untuk bermain games sehingga tanpa terasa uang tersebut terserap untuk games tersebut. Bahkan, ada anak jalanan yang bisa menghabiskan uang lebih dari Rp10.000,00-Rp30.000,00 untuk bermain *play station* ataupun ding-dong.

Goodin (1990:12-29) melihat bahwa kebutuhan tidaklah selalu bersifat absolut. Ia berpandangan bahwa kebutuhan mempunyai dua komponen yang perlu diperhatikan karena kedua komponen ini berpengaruh dalam pendefinisian kebutuhan; yaitu: prioritas; dan kerelatifan.

Terkait dengan prioritas, pihak yang memiliki otoritas (*authority*) sering kali harus mengarahkan bila terjadi konflik antara memuaskan keinginan masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Bila terjadi hal ini, *community worker* harus sedapat mungkin berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan bukannya keinginan masyarakat. Misalnya, *community worker* harus mengkaji dengan saksama masukan dari komunitas petani di suatu daerah yang menyatakan bahwa mereka membutuhkan fasilitas MCK sebagai upaya untuk mengatasi kemiskinan yang ada di daerah mereka, ataukah sebaiknya mereka memusatkan diri pada perbaikan sarana irigasi, bibit, dan penyuluhan penggunaan bibit unggul? Di sini *community worker* harus dapat dan berusaha membedakan yang mana sebenarnya yang menjadi kebutuhan masyarakat. Selain itu, *community worker* (dalam proses *assessment*) harus dapat melihat dan membantu masyarakat untuk mengenali secara lebih tepat manakah yang sebenarnya lebih penting untuk komunitas tersebut. Hal ini sebaiknya dilakukan dengan cara diskusi sehingga terjadi proses penentuan prioritas masalah oleh masyarakat berdasarkan

perkembangan pengetahuan dan kesadaran mereka sendiri sehingga bukan karena paksaan atau instruksi dari pelaku perubahan (*change agent*).

Komponen berikutnya dari kebutuhan adalah kerelatifan dari kebutuhan itu sendiri. Goodin melihat kebutuhan sering kali lebih bersifat relatif daripada absolut. Pihak yang meyakini bahwa kebutuhan itu banyak pula yang bersifat absolut melihat bahwa kebutuhan akan sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (perumahan) merupakan kebutuhan yang absolut. Lebih dalam dari sekadar menggeneralisasikan kebutuhan menjadi kebutuhan sandang, pangan, dan papan, Goodin melihat bahwa kebutuhan itu bersifat relatif dan sangat tergantung dengan unsur waktu, tempat, dan lingkungan sosial. Misalnya, kebutuhan akan pakaian pada tempat yang berbeda akan berbeda pula kebutuhannya. Bila seseorang berada di wilayah yang panas, pakaian yang dibutuhkan adalah pakaian yang lebih tipis bila dibandingkan dengan mereka yang melakukan ekspedisi ke kutub utara, di mana mereka membutuhkan jaket tebal yang dapat menahan dingin. Begitu pula dengan pangan, meskipun setiap orang dikatakan membutuhkan makanan, tetapi kebutuhan kalori yang diperlukan untuk dikonsumsi setiap hari dari seorang atlet binaraga tentunya akan berbeda dengan kebutuhan kalori dari atlet catur.

Dari contoh di atas terlihat bahwa kebutuhan yang tadinya kelihatan seperti sesuatu yang absolut bila diperdalam lagi akan dapat terlihat komponen kerelatifannya. Karena kebutuhan bersifat relatif dan masyarakat juga dinamis, suatu *human service organization* dituntut untuk selalu memperbarui atau mengkaji ulang kebutuhan dari komunitas yang berada di wilayah kerja mereka karena dengan

berjalannya waktu dan perubahan lingkungan sosial (kondisi sosial ekonomi), kebutuhan suatu kelompok masyarakat dapat saja terjadi perubahan. Oleh karena itu, guna dapat memberikan layanan yang tidak ketinggalan zaman (*up-to-date*), pihak agen perubahan diharapkan dapat mengkaji ulang kebutuhan komunitas di wilayah kerjanya secara periodik. Hal ini diperlukan agar komunitas di wilayah kerjanya dapat merasakan adanya perhatian dan keseriusan dari agen perubahan terhadap mereka.

Tentunya dapat dibayangkan bila suatu organisasi pelayanad masyarakat hanya memberikan bantuan pakaian, pangan dah rekreasi secara insidental pada saat-saat tertentu saja, seperti pada bulan Ramadhan, hari raya Idul Adha (kurban), dan sebagainya. Organisasi seperti ini nantinya akan terlihat seperti organisasi amal (*charitative*) saja yang kurang memerhatikan unsue pengembangan komunitas di wilayah kerjanya. Oleh karena itulah pengkajian kebutuhan dapat berguna bukan saja untuk komunitas sasaran, tetapi juga untuk

Di samping tipologi yang dikembangkan Goodin dalarn melihat kebutuhan dari segi absolut dan relatifnya, kebutuhan masyarakat juga dapat dilihat dari tipologi yang lain. Salah satu yang sudah digunakan secara konvensional adalah tipologi dari Bradshaw (1972), dalam Kettner (1990), dan Ife (2002). Tipologi ini membagi kebutuhan menjadi empat bentuk atau kategori, yaitu:

- a. Kebutuhan normatif (*normative need*), yaitu kebutuhan yang didefinisikan oleh mereka (sekelompok orang) yang memiliki otoritas dan disesuaikan dengan standar ataupun norma yang ada. Misalnya, garis kemiskinan.

- b. Kebutuhan yang dipersepsikan (*perceived need*) atau dikenal juga dengan nama kebutuhan yang dirasakan (*felt need*). Ife (2002:62) menggunakan istilah kebutuhan yang dirasakan untuk menjelaskan pandangan Bradshaw yang dikemukakan oleh Kettner (1990:49) sebagai kebutuhan yang dipersepsikan. *Perceived* ataupun *felt need* ini merupakan kebutuhan yang dipikirkan harus mereka dapatkan ataupun kebutuhan yang dirasakan oleh komunitas sasaran. Di sini kebutuhankebutuhan ini baru mereka pikirkan dan rasakan, tetapi belum diekspresikan sebagai tuntutan ataupun upaya-upaya nyata. Hal ini biasanya dapat terlihat dari hasil pengumpulan data pada komunitas sasaran.
- c. Kebutuhan yang diekspresikan (*expressed need*) merupakan kebutuhan yang diungkapkan oleh komunitas sasaran dan mencari berbagai layanan (*services*) untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ife (2002:63) melihat bahwa kebutuhan yang diekspresikan juga merupakan kebutuhan yang dirasakan. Akan tetapi, dalam kebutuhan yang diekspresikan terlihat adanya upaya dari komunitas sasaran untuk rmemenuhi kebutuhan tersebut dengan mencari berbagai layanan yang ada, misalnya pada komunitas petani di pedalaman, mereka memunculkan tuntutan pada pemerintah daerah agar prasarana jalan yang masih seperti kubangan di waktu hujan yang ada di daerah mereka dapat segera diaspal agar mereka dapat menjual produk pertanian mereka ke pasar. Di sini terlihat bahwa kebutuhan yang diekspresikan adalah juga kebutuhan yang dirasakan, akan tetapi tidak selalu kebutuhan yang dirasakan merupakan kebutuhan yang diekspresikan.

- d. Kategori terakhir adalah kebutuhan yang oleh Kettner (1990:50) disebut dengan nama kebutuhan relatif (*relative need*), sedangkan Ife (2002:62) menyebutnya dengan nama kebutuhan komparatif (*comparative need*). Pengertian kebutuhan relatif ini pada dasarnya menekankan bahwa kebutuhan itu tidak berawal dari asumsi akan sudah adanya standar yang diinginkan terhadap layanan tertentu. Akan tetapi, kebutuhan relatif lebih terfokus pada kesenjangan antara jenis layanan yang diberikan pada satu komunitas dengan komunitas di area yang berbeda. Misalnya, standar layanan pendidikan dasar untuk komunitas yang diberikan di Pontianak mempunyai kesenjangan dengan layanan yang sama dengan layanan pendidikan dasar yang diberikan di Jakarta. Berdasarkan hasil komparatif (perbandingan) bentuk layanan tersebut, terlihat kebutuhan komparatif apa yang diperlukan oleh komunitas di Pontianak.

Dari berbagai kategori kebutuhan tersebut terlihat bahwa kebutuhan dalam masyarakat bukan hanya berawal dari satu cara pandang. Ada berbagai cara pandang yang dapat saling melengkapi dan membantu untuk memahami kebutuhan masyarakat. Begitu pula yang terkait dengan upaya untuk mendapatkan atau menggali data tentang kebutuhan masyarakat.

Penggalan data tentang kebutuhan masyarakat dapat dilakukan secara kuantitatif misalnya dengan menyebarkan kuesioner ke komunitas sasaran. Akan tetapi, dapat pula dilakukan secara kualitatif, misalnya melalui proses diskusi, wawancara individual yang tidak terstruktur (*unstructured interview*) ataupun wawancara semiterstruktur (*semistructured interview*). Salah satu bentuk yang

cukup terkait dengan perencanaan partisipatoris adalah dengan melakukan pengumpulan data melalui metode participatory rural appraisal.

Studi Kepustakaan dan Metode Delphi sebagai Teknik Pengidentifikasian Masalah dan Potensi Masyarakat melalui Pendekatan Kuantitatif

Terkait dengan pengidentifikasian masalah, yang sering kali juga merupakan kebutuhan yang dirasakan (*felt needs*) dan kebutuhan yang dikspresikan (*expressed needs*), ada beberapa strategi yang dapat dan biasa digunakan oleh community worker secara khusus ataupun organisasi pelayanan masyarakat secara umum. Salah satu teknik untuk mengidentifikasikan kebutuhan secara kuantitatif adalah dengan menggunakan studi kepustakaan ataupun metode Delphi (Green dan Kreuter, 1987).

▪ **Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan merupakan salah satu dari metode untuk mengidentifikasikan masalah yang mungkin paling sering digunakan dalam langkah awal untuk mengidentifikasikan suatu masalah dan juga paling dikenal oleh para peneliti maupun praktisi yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial. Studi kepustakaan ini dapat dilakukan antara lain dengan menelusuri data statistik yang dimiliki oleh suatu instansi, departemen ataupun sumber-sumber lainnya. Berdasarkan data statistik ini petugas (dalam hal ini *community worker*) mulai menganalisis data tersebut berdasarkan indikator-indikator tertentu. Misalnya, dalam mengidentifikasikan apakah di suatu wilayah terdapat masalah yang terkait dengan kesehatan atau tidak, petugas dapat

melihat beberapa indikator kesehatan yang sudah standar, seperti data statistik angka kematian bayi; berat badan bayi lahir ringan; persentase jenis penyakit yang berkembang dalam suatu wilayah; dan lain sebagainya. Melalui cara ini nantinya dapat diidentifikasi masalah apa yang ada dalam masyarakat tersebut. Selain itu, studi kepustakaan ini dapat pula digunakan untuk melihat kondisi sosial dan ekonomi suatu masyarakat. Misalnya, dengan menganalisis pendapatan, penghasilan, pemilikan barang, jumlah pengeluaran per minggu, angka rata-rata tabungan per wilayah, dan lain sebagainya. Di samping itu, suatu studi kepustakaan bisa juga diambil dari beberapa penelitian kualitatif yang membahas mengenai berbagai proyek yang dikerjakan pada suatu komunitas atau dapat pula melihat pada suatu studi yang membahas adat dan kebiasaan masyarakat di suatu daerah. Studi kualitatif sering kali dapat memberikan gambaran yang lebih mendetail mengenai apa yang terjadi pada suatu masyarakat, dibandingkan dengan studi kuantitatif yang berdasarkan fungsinya memang diarahkan pada upaya memetakan suatu fenomena sosial.

- **Metode Delphi**

Metode ini menggunakan serangkaian kuesioner sebagai alat untuk mengidentifikasi masalah ataupun kebutuhan. Metode ini dikembangkan oleh Linstone dan Turoff, tetapi Gilmore lebih lanjut meringkaskan metode tersebut, sebagai berikut:

a. Definisikan isu yang akan dibahas

Tim utama (pelaksana) harus mengembangkan isu bahasan utama secara jelas dan tegas. Misalnya, "Kebutuhan untuk

mengidentifikasi kendala-kendala utama yang terkait dengan pengembangan kesehatan masyarakat di daerah X."

b. Tentukan siapa saja yang akan dijadikan partisipan dalam penelitian atau pengidentifikasian ini

Tim assessment utama harus memilih dan menentukan pihak-pihak mana saja yang akan dikirim kuesioner. Pihak yang dijadikan narasumber (partisipan) dalam penelitian ini haruslah orang-orang yang ahli atau memahami bidang tersebut. Kemudian kontaklah para partisipan untuk meminta kesediaan mereka untuk menjadi narasumber dalam penelitian/proses pengidentifikasian masalah ini.

c. Mengembangkan kuesioner pertama

Kuesioner ini, seperti juga kuesioner dalam suatu penelitian, haruslah diberikan pengantar yang jelas akan isu sentral yang akan dibahas dalam kuesioner ini, serta tujuan dari diadakannya proses pengidentifikasian ataupun penelitian ini. Hal ini perlu dilakukan karena proses pengidentifikasian ini dilakukan dengan surat menyurat dan bukan dengan tatap muka langsung dengan responden. Pertanyaan yang diberikan dalam kuesioner sebaiknya dalam format yang "terbuka tetapi terarah" (*open-ended*). Misalnya, "Tolong tuliskan pada lembar isian (form) yang telah disediakan atau kendala apa yang paling utama yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat di daerah X." Untuk memberikan jawaban pertanyaan ini, para partisipan sebaiknya diberikan batas akhir (deadline) kurang lebih selama dua minggu untuk mengembalikan lembar jawaban yang telah mereka isi. Batas

akhir ini perlu diberikan agar proses pengidentifikasian ini tidak berjalan berlarut-larut.

d. Kembangkan kuesioner kedua

Dari berbagai jawaban yang masuk, bentuklah kategorikategori untuk menampung kesemua jawaban yang ada. List jawaban yang baru ini nantinya akan dikembangkan sebagai kuesioner kedua. Misalnya, dari keseluruhan kuesioner yang masuk kembali setelah dibentuk kategori baru ternyata masih terdapat tujuhbelas kategori jawaban, maka ketujuhbelas jawaban tersebutlah yang akan ditanyakan kembali kepada para narasumber (partisipan) untuk diberikan nilai guna mengetahui peringkat dari masing-masing kategori, contoh:

▪ Instruksi:

Berdasarkan hasil jawaban kuesioner terdahulu, kami telah mendapatkan seratus sepuluh jawaban. Dari jawaban tersebut, kami telah mengompilasinya menjadi tujuhbelas kategori. Dari ketujuhbelas kategori tersebut tolong pilih tujuh kategori jawaban yang Anda rasa sebagai kendala utama yang menghambat pengembangan masyarakat di daerah X. Pada tiap-tiap kategori pilihlah kendala yang paling utama dan berilah nilai 7, dan nilai 1 bagi yang paling kurang penting untuk dibahas, lalu tolong berilah komentar terhadap ketujuhbelas kategori jawaban yang ada pada bagian yang telah disediakan.

▪ Kendala-kendala yang menghambat pengembangan kesehatan masyarakat di daerah X.

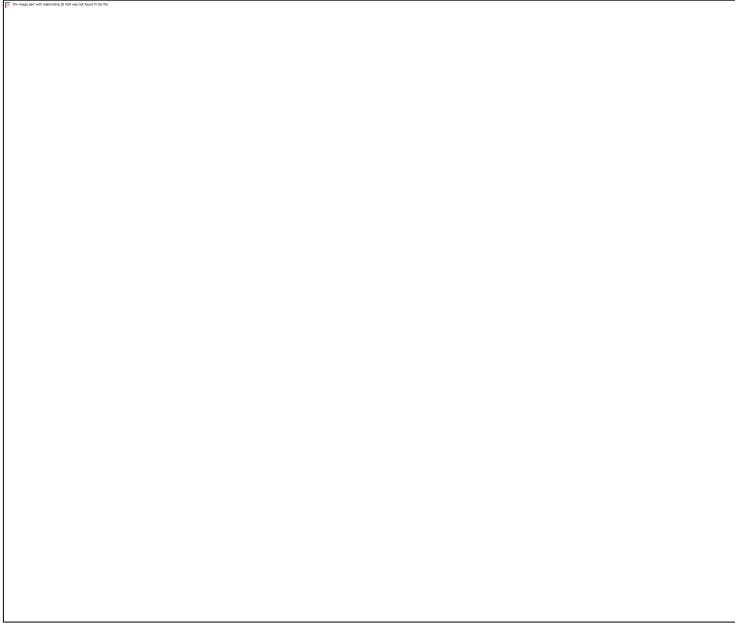
Ketika mengirimkan kuesioner ini, jangan lupa memberikan batas akhir (deadline) kapan jawaban harus masuk, misalnya tiga minggu setelah kuesioner tersebut dikirimkan oleh tim pengidentifikasi masalah.

Kategori Kendala	Nilai	Komentar
1. Kesulitan mencapai pusat layanan kesehatan		
2. Kondisi ekonomi keluarga		
.....		
17. Masalah keluarga		

e. *Kembangkan kuesioner ketiga*

Nilai-nilai dari jawaban pada kuesioner kedua dijumlahkan untuk tiap-tiap kategori, begitu pula komentar masing-masing kategori. Hasil penjumlahan ini dimasukkan ke kolom 'pilihan terakhir'. Informasi ini diperlukan dalam mengembangkan kuesioner ketiga dan juga dalam menentukan 'pilihan terakhir'. Contoh:

- 1) Instruksi: "Di bawah ini Bapak/Ibu dapat melihat hasil kalkulasi dari kuesioner kedua, dan kami mengharapkan agar Bapak/Ibu dapat memasukkan pilihan terakhir Bapak/Ibu dari lembar di bawah ini (7 = yang paling penting, 1 = yang paling kurang penting).
- 2) Kendala-kendala yang menghambat pengembangan kesehatan masyarakat di daerah X.



f. Analisis Akhir

Dari hasil kuesioner ketiga di atas, hasil pilihan terakhir tersebut dijumlahkan guna mendapatkan gambaran kendala apa yang dirasakan banyak menghambat proses pengembangan kesehatan masyarakat di daerah X. Meskipun secara teoretis dimungkinkan untuk mengembangkan kuesioner keempat bila diperlukan, tetapi dari tiga kuesioner biasanya data yang didapat sudah dapat dianalisis dan menjangkau kebutuhan umum yang dirasakan masyarakat di suatu daerah tertentu.

Dari hal di atas, terlihat bahwa metode Delphi ini mempunyai keuntungan dalam luas area yang diliput. Karena dengan bentuk komunikasi surat menyurat, tim peneliti dapat menjangkau partisipan ataupun pakar di daerah yang berbeda (tidak harus dari daerah yang sedang

diidentifikasi). Di samping itu teknik ini diharapkan dapat meningkatkan keobjektifan karena dapat menggunakan partisipan yang bervariasi, yang belum tentu saling mengenal satu dengan lainnya sehingga pandangan partisipan yang satu diharapkan tidak dipengaruhi oleh partisipan yang lain.

Metode Delbecq sebagai Teknik Pengidentifikasi Masalah dan Potensi Masyarakat melalui Pendekatan Kualitatif

Salah satu metode untuk melakukan assessment melalui pendekatan kualitatif adalah dengan metode Delbecq. Berbeda dengan metode Delphi yang menekankan pada prinsip-prinsip kuantitatif, seperti objektivitas, keterandalan dan keabsahan jawaban, metode Delbecq mempunyai kelebihan dalam hal adanya interaksi antarpartisipan. Perbedaan asumsi dasar antara metode Delphi dan metode Delbecq ini, serupa dengan perbedaan asumsi dasar dari pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif di mana pihak pertama mengandalkan pada keobjektifan data, sedangkan pihak berikutnya melihat kesubjektifan data itu justru yang akan dapat menggambarkan realitas yang sebenarnya dari suatu masyarakat.

Proses Kelompok Setara (Nominal Group Process) atau Metode Delbecq

Nominal Group Process ini lebih dikenal dengan nama metode Delbecq (meskipun yang mengembangkannya adalah Van de Ven dan Delbecq, tetapi nama yang terakhirlah yang sering digunakan terkait dengan metode ini). Metode ini dianggap lebih efisien dan efektif daripada Metode Delphi atau juga dikenal dengan nama Teknik

Delphi (*Delphi Technique*) dalam menjangkau informasi mengenai masalah dan membuat peringkat ataupun prioritas masalah dari suatu komunitas lokal. Meskipun demikian, perlu diingatkan pula bahwa metode Delbecq bukanlah suatu metode atau teknik untuk memecahkan atau mengatasi masalah, tetapi metode ini lebih merupakan metode untuk mengidentifikasi dan menyusun kerangka prioritas masalah yang harus diatasi oleh masyarakat dan *community workers*. Tahapan yang dikembangkan dalam metode ini antara lain:

- a) Mengatur agar dalam setiap pertemuan jumlah peserta tidak melebihi delapan orang. Pengaturan kelompok yang berjumlah antara 6 - 8 orang sangat diperlukan karena bila jumlah peserta lebih dari tujuh atau kurang dari enam orang dikhawatirkan interaksi antarpeserta tidak dapat terjadi secara optimal.

Para peserta dalam pertemuan ini sebaiknya diseleksi terlebih dahulu, yaitu mereka yang mengetahui mengenai komunitas mereka. Oleh karena itu, peserta dalam nominal group process ini adalah perwakilan dari masyarakat, entah itu dari pihak pengurus RT, RW, wakil ibu-ibu, wakil perempuan, wakil warga yang belum bekerja, tetapi mengetahui perkembangan daerah tersebut, dan sebagainya. Karena para peserta merupakan perwakilan, perlu dipertimbangkan untuk memperoleh perwakilan dari unsur negatif dan positif dalam masyarakat (misalnya, kelompok yang miskin; kelompok yang memiliki kapital; dan lain sebagainya). Untuk mendapatkan hasil yang optimal, pertemuan nominal group process dapat dilakukan beberapa kali, tetapi terhadap peserta yang berbeda (perwakilan warga masyarakat yang lain). Bila hal ini dilakukan, perlu dipertimbangkan untuk membuat suatu

pertemuan terakhir untuk mengambil kesimpulan dari prioritas yang telah coba dirumuskan sebelumnya. Untuk keefektifan diskusi ini, moderator diskusi mengatur kursi pertemuan dalam bentuk lingkaran, atau setengah lingkaran.

- b) Sediakan selembar kertas dan ajukan satu pertanyaan saja. Akan lebih baik bila pertanyaan tersebut dapat dituliskan di papan tulis, flip-chart atau media lainnya agar semua peserta dapat melihatnya. Pertanyaan yang akan diajukan dalam pertemuan ini haruslah sesuai dengan tujuan pertemuan. Misalnya, "Menurut Anda, apakah masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat di desa ini?" Atau dapat pula digunakan pertanyaan yang lain, seperti 'Apakah tiga masalah utama yang dihadapi desa Anda saat ini?' Dalam pertemuan ini ada baiknya bila *community worker* yang juga sekaligus merupakan pengarah pertemuan (*group leader* atau moderator diskusi) tersebut mempersiapkan pula pertanyaan alternatif guna mengantisipasi kalau-kalau pertanyaan yang diajukan tidak dimengerti oleh para peserta.
- c) Berikan kesempatan pada masing-masing peserta untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Jawaban dari para peserta tersebut dapat dituliskan di lembar kertas yang sudah disediakan. Bila waktu yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan ini belum mencukupi maka moderator diskusi dapat menambahkan sekitar lima menit agar para peserta dapat menjawab pertanyaan tersebut. Sangat penting diingat bahwa dalam menjawab pertanyaan tersebut mereka mengerjakan sendiri tanpa berkata-kata dengan peserta yang lain. Tuliskan jawaban dari masing-masing peserta pada papan tulis atau flip-chart yang sudah disediakan.

d) Mulailah proses pencatatan jawaban peserta

Pertama-tama salah seorang partisipan diminta untuk membacakan jawaban yang ia berikan, kemudian dilanjutkan dengan partisipan berikutnya. Selama partisipan membacakan jawaban mereka, moderator diskusi menuliskan jawaban partisipan di papan tulis ataupun flip-chart. Setiap jawaban diberikan nomor (1, 2, 3, ... dan seterusnya). Proses ini dilakukan berulang-ulang hingga seluruh jawaban partisipan terliput. Selama proses pencatatan ini, proses diskusi belum dilakukan.

e) Klarifikasi jawaban partisipan

Beri kesempatan kepada masing-masing partisipan untuk mengklarifikasikan jawaban dari partisipan yang lain. Pada tahap ini masing-masing partisipan dapat menanyakan berbagai pertanyaan seperti 'Apa yang sebenarnya ia maksud dengan jawaban di atas?', 'Alasan apa yang menyebabkan ia memberikan jawaban tersebut', dan "seberapa penting hal tersebut?" Meskipun dernikian, fase ini bukanlah fase untuk berargumentasi ataupun melakukan lobby, tetapi fase ini lebih menitikberatkan pada pengklarifikasian jawaban para partisipan yang dirasakan kurang jelas. Oleh karena itu, moderator diskusi harus mengarahkan secara tegas dan lugas proses pengklarifikasian ini agar tidak terjadi adu argumentasi ataupun lobby dalam fase ini.

f) Laksanakan pemungutan suara pertama

Dari keseluruhan jawaban partisipan yang telah ditulis di papan ataupun flip-chart, masing-masing partisipan diminta untuk memilih sekitar tujuh jawaban (misalnya no. 9, 14, dan sebagainya) yang mereka anggap paling penting, kemudian dilakukan pemberian nilai, di mana yang dianggap paling penting

diberikan nilai tujuh, sedangkan yang paling tidak penting diberikan nilai satu. Setelah itu, moderator diskusi mencatat dan menjumlahkan nilai peringkat yang diberikan masing-masing partisipan sehingga terlihat urutan prioritas dari jawaban secara keseluruhan. Jawaban (item) dengan nilai terbesar merupakan peringkat utama, begitu pula sebaliknya.

g) Diskusikan hasil pemungutan suara pertama

Diskusi pada fase ini tetap perlu dilakukan guna memperjelas jawaban-jawaban yang terpilih dalam kelompok peringkat utama. Pengklarifikasian dan penjelasan ulang mengenai beberapa jawaban tertentu diperlukan guna mempertegas dan meyakini pilihan jawaban tersebut agar dalam pemilihan terakhir para partisipan sudah sepaham mengenai apa yang dimaksud dari masing-masing jawaban.

h) Laksanakan proses pemilihan suara yang terakhir

Dalam tahap ini ada dua prosedur yang dapat dilakukan: (a) seperti yang telah dilakukan dalam proses pemilihan suara pertama, pilihlah nomor jawaban (items) tertentu yang dianggap paling penting untuk dibahas lalu susunlah peringkat dari yang paling penting sampai yang kurang penting; atau (b) dari jawaban pemilihan suara pertama, misalnya saja pada pemilihan pertama didapat tujuh jawaban utama. Pilihlah nomor jawaban (*item*) yang dianggap paling penting, kemudian berilah nilai sepuluh untuk jawaban yang paling penting dan nilai nol untuk jawaban yang kurang penting. Kemudian buatlah angka rata-rata untuk tiap jawaban yang berada di antara kedua kutub tersebut.

i) Kalkulasikan pemilihan suara secara keseluruhan

Mengingat mungkin ada beberapa kelompok yang terdiri dari 6 - 8 partisipan, maka perlu dilakukan pemilihan suara secara total. Pertama-tama, setiap jawaban (item) dari masing-masing kelompok disatukan dan diatur dalam satu kategori baru (bila memungkinkan). Kemudian dilakukan penghitungan suara berdasarkan hasil peringkat ataupun rata-rata jawaban dari masing-masing kelompok. Kategori jawaban yang mendapat nilai yang paling tinggi akan menjadi prioritas utama untuk dibahas.

Daftar Pustaka

Adi, Isbandi R. (2008). *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

BAB VII

PRA sebagai Metode Pengidentifikasian Masalah dan Potensi Masyarakat secara Kualitatif

Dalam buku “*Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat*” oleh Adi (2008: 341-349), Participatory Rural Appraisal (PRA) merupakan salah satu bentuk tertentu dari penelitian kualitatif yang digunakan untuk mendapat pemahaman yang mendalam tentang situasi komunitas. PRA adalah suatu proses di mana komunitas akan menganalisis situasi yang mereka hadapi dan mengambil keputusan tentang bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan yang ada. Selain itu, PRA juga dikenal sebagai metode dan pendekatan pembelajaran mengenai kondisi dan kehidupan komunitas dari, dengan, dan untuk masyarakat sendiri.

Karena PRA merupakan metode *assessment* yang berupaya mengoptimalkan aspirasi masyarakat, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan ketika *community worker* melakukan PRA. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1. Prinsip mengutamakan mereka yang kurang beruntung atau terabaikan. Dari prinsip ini diharapkan pelaku perubahan sebagai *community worker* akan dapat mengetahui cara pandang dan kondisi sebenarnya dari mereka yang berada pada kondisi yang kurang diuntungkan. Pandangan dari mereka yang dianggap kurang beruntung ataupun terabaikan dapat pula digunakan

Dari prinsip ini diharapkan pelaku perubahan sebagai *community worker* akan dapat mengetahui cara pandang dan kondisi sebenarnya dalam suatu masyarakat dari sudut pandang mereka yang berada pada kondisi yang kurang diuntungkan

sebagai alat untuk mengecek apakah data-data yang diberikan para elite masyarakat (baik itu tokoh formal ataupun nonformal) dapat dicek kebenarannya karena kadangkala data yang didapat

dari elite masyarakat belum tentu sama seperti apa yang terjadi dan dirasakan oleh mereka yang berada pada kondisi yang kurang diuntungkan. Perbedaan data ini belum tentu terjadi karena para elite telah memanipulasi data, tetapi perbedaan bisa saja terjadi dikarenakan para elite belum sempat mendapatkan data yang terbaru atau ada orang-orang yang masih menyembunyikan data tersebut dan belum disampaikan pada para elite tersebut. Misalnya, data tentang jumlah bantuan beras untuk orang miskin (*raskin*) yang dinyatakan sudah disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan. Akan tetapi, ketika dicek kembali oleh *community worker*, ternyata cukup banyak keluarga yang belum mendapatkan bantuan *raskin* tersebut. Di sinilah fungsi pengecekan langsung ke masyarakat yang kurang diuntungkan menjadi hal yang penting dan perlu dilaksanakan oleh *community worker*.

2. Prinsip pemberdayaan masyarakat (penguatan dan pembelajaran). Prinsip ini menekankan proses assessment dan perencanaan program yang dilakukan dengan PRA ini merupakan suatu proses pemberdayaan yang intinya terjadi melalui proses **pembelajaran orang dewasa** (*adult education*) yang tidak saja bermanfaat bagi komunitas sasaran, tetapi juga bagi *community worker*. Melalui proses ini masyarakat akan belajar mengenali apa kebutuhan mereka dan apa masalah mereka, serta mereka juga akan dapat belajar bagaimana meng-embangkan rencana pro-gram aksi yang dapat berguna bagi me-reka. Meskipun pada awalnya, bentuk perencanaan yang mereka lakukan masih dalam bentuk yang sederhana. Akan tetapi, sejalan dengan waktu, proses pengidentifikasian masalah dan kebutuhan, serta alternatif solusi yang mereka tawarkan akan semakin canggih
3. Prinsip saling belajar dan menghargai perbedaan. Terkait dengan perubahan yang terjadi dan akan terjadi pada kornunitas sasaran, *community worker* harus berusaha mendorong agar terwujud perasaan saling rnenghargai perbe-daan yang ada pada ber-bagai

Prinsip ini menekankan proses assessment dengan PRA ini merupakan suatu proses pemberdayaan melalui proses pembelajaran orang dewasa (*adult education*) yang tidak saja bermanfaat bagi komunitas sasaran, akan tetapi juga bagi *community worker*

kelompok masyarakat dalam suatu komunitas. Melalui keinginan untuk menghargai perbedaan yang ada, akan dapat tercipta integrasi yang lebih solid dalam komunitas tersebut, serta dapat pula muncul rasa ingin saling belajar dalam berbagai kelompok masyarakat

Prinsip ini mendorong agar terwujud perasaan saling menghargai perbedaan yang ada pada berbagai kelompok masyarakat dalam suatu komunitas sehingga nantinya akan dapat memunculkan kemauan untuk saling belajar. Sebaliknya, mendorong kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk saling belajar agar mereka dapat saling menghargai perbedaan yang terdapat dalam komunitas tersebut

pada komunitas tersebut, ataupun sebaliknya. Dari hasil interaksi ini *community worker* pun akan dapat mengambil pelajaran dari hal tersebut, di mana proses yang terjadi akan membuat *community worker* semakin berdaya dan semakin luas pengetahuannya setelah mendapat masukan dari komunitas sasaran. Hal ini terjadi karena adanya proses yang interaktif antara *community worker* dan komunitas sasaran. Di sinilah terjadi proses saling belajar antara komunitas sasaran dan *community worker*. Prinsip ini tentunya sangat terkait dengan prinsip kedua di mana dalam suatu proses PRA terjadi proses pemberdayaan dan pendewasaan, melalui proses pembelajaran orang dewasa.

4. Prinsip Triangulasi. Pengertian triangulasi ini bermakna dalam proses PRA akan terjadi proses pengecekan ulang (*check and re-check*) atas berbagai masukan yang ada guna mendapatkan gambaran yang lebih utuh tentang apa yang terjadi dalam suatu masyarakat ataupun mengetahui dengan lebih tepat bagaimana kondisi masyarakat yang sebenarnya, dan bukan hanya

berdasarkan masukan yang bersumber dari suatu kelompok tertentu.

Proses triangulasi ini dapat dilakukan dengan cara mengecek data dari sumber yang berbeda, misalnya data pertama didapat dari pak lurah, data pembanding diambil dari orang miskin yang seharusnya dan dinyatakan telah mendapat raskin (lihat pada prinsip 1).

Prinsip ini bermakna dalam proses PRA akan dilakukan proses pengecekan ulang (*check and recheck*) atas berbagai masukan yang ada guna mendapatkan gambaran yang lebih utuh tentang apa yang terjadi dalam suatu masyarakat ataupun mengetahui dengan lebih tepat bagaimana kondisi masyarakat yang sebenarnya, dan bukan hanya berdasarkan masukan yang bersumber dari suatu kelompok tertentu.

Proses triangulasi dapat pula dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda, misalnya untuk mengetahui masalah yang dirasakan oleh masyarakat dapat digunakan gabungan dari teknik wawancara perseorangan (*individu*); teknik *assessment* melalui diskusi kelompok dengan menggunakan matriks prioritas kebutuhan, serta dapat pula digabungkan dengan teknik *participatory mapping* (*pemetaan partisipatif*) guna mendapatkan data yang lebih jelas tentang di mana area yang masih mengalami permasalahan tersebut.

5. Prinsip Santai dan Informal.

Dalam suatu proses PRA *community worker* yang sedang menggali data dari masyarakat harus berusaha melakukan wawancara se-

Prinsip ini menekankan dalam proses pengumpulan data, wawancara harus dilakukan secara santai sehingga suasana wawancara menjadi suasana yang menyenangkan guna mendapatkan informasi yang lebih akurat

cara santai sehingga suasana wawancara tidak menjadi suasana

yang formal dan menegangkan. Di sini *community worker* harus berupaya sedapat mungkin untuk membuat suasana menjadi cair sehingga warga masyarakat tidak merasa seperti sedang diinterogasi, akan tetapi merasa seperti sedang berbicara dengan teman. Dalam suasana yang santai dan informal ini diharapkan warga masyarakat akan dapat mengemukakan pandangannya secara bebas dan lepas tanpa takut diberikan judgement (penilaian baik dan buruk) oleh *community worker*.

6. Prinsip Upaya Mengoptimal-

kan Hasil bagi Masyarakat.

Prinsip ini merupakan suatu yang hams sangat diperhatikan dalam suatu proses assessment yang parti-sipatif karena mereka membuat perencanaan pada dasarnya ada-lah untuk

Prinsip ini menekankan bahwa dalam PRA, *assessment* dan perencanaan yang dibuat adalah *assessment* dan perencanaan yang hasilnya sepenuhnya akan digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan bukan untuk kepentingan organisasi belaka

kepentingan masy-arakat itu sendiri sehingga proses pengumpulan data maupun perencanaan tidak dilakukan untuk ke pentingan organisasi belaka, ataupun untuk kepentingan dari *community worker* itu sendiri. Dalam suatu proses perencanaan partisipatoris dan juga dalam PRA, proses yang dilakukan digunakan sedapat mungkin untuk memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat.

7. Prinsip Keberlanjutan. Dalam suatu masyarakat kebutuhan dan masalah bukanlah sesuatu yang tetap dari tahun ke tahun . Selalu ada waktu untuk terjadi perubahan. Oleh karena itu, PRA juga mengharapkan bahwa masyarakat akan belajar dan dapat melakukan proses peng-identifikasian masalah dan

Guna menjamin keberlanjutan proses pemberdayaan masyarakat, prinsip ini menekankan bahwa upaya yang dilakukan dalam PRA pada akhirnya harus dapat dilanjutkan oleh masyarakat ketika *community worker* sudah tidak berada bersama komunitas tersebut

kebutuhan mereka sendiri di masa-masa yang akan datang. Hal ini diper-lukan karena akan dapat membantu masyarakat agar dapat lebih mandiri. Selain bisa dipandang dari kacamata masyarakat, keberlanjutan menggunakan pendekatan partisipatif dalam mengakses data masyarakat juga merupakan bagian dari komitmen organisasi pelayanan masyarakat. Di sini human service organizations diharapkan tetap berlanjut melakukan assessment melalui proses PRA sehingga proses ini tidak berhenti setelah sekali dilakukan.

8. Prinsip Orientasi Praktis.

Prinsip ini menekankan bahwa PRA dilakukan bukan sekedar untuk mengumpulkan data dari masyarakat dan tidak ditindaklanjuti dengan

Prinsip ini menekankan bahwa PRA dilakukan bukan sekedar untuk mengumpulkan data dari masyarakat, tetapi akan ditindaklanjuti dengan melakukan program aksi

program aksi. Sebaliknya, prinsip ini menekankan bahwa proses PRA adalah proses pengum-pulan data yang akan berlanjut

dengan mengembangkan berbagai upaya yang dapat membantu masyarakat untuk mengatasi masalah yang ada.

9. Prinsip Terbuka. Di sini bermakna bahwa PRA masih terbuka dan membuka kesempatan untuk menambahkan berbagai teknik pengumpulan data yang bersifat partisipatoris dan dapat membantu mendapatkan pemahaman data yang lebih luas tentang komunitas sasaran. Berdasarkan hal ini, maka PRA masih membuka kesempatan untuk memasukkan berbagai metode pengumpulan data yang terbaru untuk memperkaya teknik-teknik dalam melakukan assessment yang bermanfaat untuk masyarakat.

Prinsip ini menekankan bahwa metode PRA adalah metode yang terbuka dan membuka kesempatan untuk menambahkan berbagai teknik pengumpulan data yang bersifat partisipatoris dan bermanfaat bagi masyarakat

Setelah memerhatikan berbagai prinsip yang telah dikemukakan di atas, secara sederhana ada beberapa tahap yang dapat dilakukan, yaitu:

1. klarifikasi tujuan ataupun objektif (*clarify goals and objectives of the study*);
2. memilih topik utama (*choose main topics*);
3. mempersiapkan subtopik, indikator, dan berbagai pertanyaan kunci (*prepare a list of subtopics, indicators and key questions*);
4. mengidentifikasi sumber informasi untuk setiap subtopik (*identify sources of information for each subtopic*);
5. memilih alat untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi (*select tools to gather and analyse information*);
6. merancang perangkat penelitian (*design research tools*).

Tahapan ini bukanlah tahapan yang kaku, tetapi akan dapat berbeda dari satu lokasi dengan lokasi yang lainnya. Akan tetapi, berbagai tahapan yang ada di atas, merupakan tahapan yang sering digunakan dalam melakukan PRA.

Dalam kaitan dengan pelaksanaan metode PRA ini, *community worker* dapat mengumpulkan data melalui berbagai macam cara, yaitu:

1. Studi Data Sekunder (Secondary Sources), misalnya dengan menggali data dari laporan proyek, catatan-catatan program ataupun penelitian, data base, micro fiche, dan sebagainya.
2. Melalui Pengamatan Langsung (Direct Observation). Misalnya dengan mengamati kejadian-kejadian khusus, aktivitas, relasi antarwarga, kebiasaan masyarakat, dan sebagainya. Pengamatan ini dapat dilakukan dengan menggunakan pedoman observasi dan dapat pula tanpa menggunakan pedoman observasi.
3. Wawancara Semi-Terstruktur (Semi-Structured Interview). Wawancara ini dapat dilakukan dengan cara:
 - a. secara perseorangan pada warga masyarakat tertentu, misalnya pada warga yang mendapat bantuan, dan sebagainya;
 - b. wawancara dilakukan pada kelompok atau diskusi kelompok, misalnya dengan melakukan diskusi kelompok pada berbagai kelompok masyarakat (antara lain: kelompok remaja, pemuda, dan para lansia) untuk mengetahui permasalahan yang ada di masyarakat (komunitas sasaran).

Berbagai teknik pengumpulan data di atas dapat dilakukan secara bersamaan untuk memaksimalkan hasil dan membantu community worker agar dapat lebih memahami kondisi kualitas hidup masyarakat. Dengan menggunakan kombinasi cara pengumpulan data, community worker dapat melakukan triangulasi data bukan saja berdasarkan sumber informasi, tetapi juga triangulasi berdasarkan teknik pengumpulan datanya sehingga community worker tidak terjebak pada laporan formal, tetapi juga dapat melihat apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat.

Daftar Pustaka

Adi, Isbandi R. (2008). *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

BAB VIII

Teknik dalam PRA

(Sebagai Metode Pengidentifikasian Masalah dan Potensi Masyarakat Secara Kualitatif)

Pada buku *“Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat”* oleh Adi (2008: 349-364) dijelaskan bahwa dalam kaitan dengan teknik pengidentifikasian kebutuhan dan aset komunitas, ada berbagai teknik PRA yang dapat digunakan. Di bawah ini akan diuraikan secara singkat beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasikan dan menganalisis kebutuhan, masalah, ataupun potensi yang ada di masyarakat sebagai suatu kesatuan agar nanti dapat dikembangkan program aksi yang lebih menjawab kebutuhan masyarakat.

1. Matriks Prioritas Masalah
2. Pemetaan Partisipatoris (Participatory Mapping)
3. Alur Sejarah Masalah dan Perubahan di Masyarakat (Time-Line History)

4. Diagram Venn Hubungan Antarlembaga
5. Wawancara Individual

Matriks Prioritas Masalah

Teknik ini pada intinya ingin mengajak komunitas sasaran untuk terlibat aktif dalam proses pengidentifikasian kebutuhan dan aset yang ada pada komunitas mereka. Dalam membuat matriks ini, *community worker* dapat menggunakan diskusi kelompok (wawancara terhadap kelompok) guna menggali berbagai pandangan yang ada pada komunitas sasaran. Pada intinya, dalam metode ini setiap partisipan diajak dan diberi kebebasan untuk menyumbangkan pandangannya sehingga mereka tidak perlu 'membeo' saja dengan pandangan yang telah dikemukakan oleh partisipan yang lain. Ada beberapa tahapan dalam pelaksanaan teknik ini, antara lain:

a. Membentuk kelompok diskusi.

Undanglah kelompok-kelompok warga yang mewakili berbagai RW. Jumlah partisipan dalam satu kelompok diskusi bisa lebih dari lima belas orang, tetapi diusahakan kurang dari tiga puluh orang karena bila jumlah peserta lebih dari tiga puluh orang, dikhawatirkan interaksi antarpeserta tidak dapat terjadi secara optimal. Para peserta dalam pertemuan ini sebaiknya mewakili berbagai kelompok dalam masyarakat, termasuk mereka yang kurang diuntungkan atau terabaikan. Misalnya, mereka yang berasal dari keluarga sangat miskin (prasejahtera) ataupun dari keluarga miskin (sejahtera 1). Jadi, pertemuan tidak hanya mengandalkan pada masukan dari para wakil rakyat atau orang yang merasa mewakili masyarakat sekitar mereka.

Jelaskan tujuan dan aturan main pada partisipan. Dalam pertemuan ini, ada baiknya bila *community worker* bertindak sebagai fasilitator menjelaskan terlebih dahulu tujuan pertemuan dan aturan main dalam pertemuan ini sehingga partisipan dapat **menyadari** bahwa kehadiran mereka memang bermakna dan suara mereka dapat mendorong proses pengidentifikasian masalah yang lebih partisipatif. Fasilitator di sini harus berusaha mencairkan suasana dan membuat kondisi diskusi menjadi lebih relaks.

- b. *Sediakan selembar kertas dan ajukan satu pertanyaan saja.* Akan lebih baik bila pertanyaan tersebut dapat dituliskan di papan tulis, flip-chart atau media lainnya agar semua peserta dapat melihatnya. Pertanyaan yang akan diajukan dalam pertemuan ini haruslah sesuai dengan tujuan pertemuan. Misalnya, "Menurut Anda, apakah masalah yang paling dirasakan oleh masyarakat selama satu tahun terakhir (tuliskan maksimum tiga kendala saja)?" Dalam pertemuan ini, sebaiknya fasilitator harus berusaha sedapat mungkin untuk menetralisasi konflik dan mewujudkan konsensus sehingga pada akhir pertemuan akan bisa didapatkan prioritas masalah yang harus ditangani.
- c. *Berikan kesempatan pada masing-masing peserta untuk menjawab pertanyaan yang diajukan.* Jawaban dari para peserta tersebut dapat dituliskan di lembar kertas yang sudah disediakan. Sangat penting diingat bahwa dalam menjawab pertanyaan tersebut partisipan mengerjakan sendiri "tanpa berkata-kata" dengan peserta yang lain. Setelah mereka memberikan jawaban mereka, *note-taker* (yang membantu fasilitator) dapat

mengumpulkan kertas jawaban dan menuliskan jawaban dari masing-masing peserta pada papan tulis atau *flip-chart* yang sudah disediakan. Setiap jawaban tentang masalah yang dirasakan komunitas sasaran diberikan nomor (1, 2, 3, ... dan seterusnya). Proses ini dilakukan ... pada seluruh partisipan hingga seluruh jawaban partisipan terliput. Selama proses pencatatan ini proses diskusi belum dilakukan. Contoh:

Masalah yang Dirasakan Masyarakat Selama Setahun Terakhir	Seberapa Sering Masalah Tersebut Terjadi (Dirasakan)
1. Kenakalan Remaja	
2. Hubungan Seks Pranikah	
3. Pencurian	
4. Lingkungan yang kotor (banyak sampah, got mampet)	
5. Air yang kotor	
6. Kemacetan Lalu Lintas	
.....	
20. Banyaknya anak jalanan	

- d. *Mulailah proses diskusi.* Pada tahap ini fasilitator memberi kesempatan seluas mungkin pada setiap partisipan untuk mengklarifikasikan jawaban dari partisipan yang lain, bila ia merasa tidak jelas dengan jawaban yang dikemukakan oleh partisipan lainnya. Pada tahap ini setiap partisipan dapat menanyakan berbagai pertanyaan "Apa yang sebenarnya ia maksud dengan jawaban di atas?" bila mereka tidak jelas dengan jawaban tersebut.
- e. *Berikan tanda bintang (*) pada kolom seberapa sering masalah dirasakan.* Dari hasil proses diskusi tersebut diharapkan masing-masing partisipan sudah mendapatkan kejelasan terhadap keseluruhan jawaban partisipan dan sudah tidak ada masalah

yang sama ataupun tumpang tindih dalam kolom pertama (masalah yang dirasakan selama setahun terakhir). Setelah itu, partisipan diminta untuk memberikan tanda bintang pada kolom 'seberapa sering masalah itu terjadi'. Di sini partisipan diminta untuk mendiskusikan berapa bintang yang akan mereka berikan untuk setiap masalah yang telah ditulis. Bila mereka merasa bahwa masalah itu sangat sering terjadi atau dirasakan, mereka dapat memberikan lima bintang (*****), sedangkan bila masalah itu sangat jarang terjadi atau dirasakan, mereka dapat memberikan satu bintang (*). Contoh:

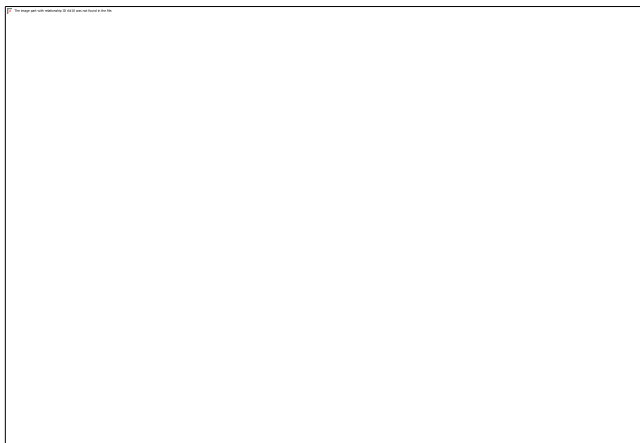
- f. Klarifikasikan jawaban partisipan. Setelah partisipan mendiskusikan dan memberikan jawaban sehingga kolom 2 di

Masalah yang Dirasakan Masyarakat Selama Setahun Terakhir	Seberapa Sering Masalah Tersebut Terjadi (Dirasakan)
1. Kenakalan Remaja	***
2. Hubungan Seks Pranikah	***
3. Pencurian	***
4. Lingkungan yang kotor (banyak sampah, got mampet)	**
5. Air yang kotor	****
6. Kemacetan Lalu Lintas	*****
.....
23. Banyaknya anak jalanan	***

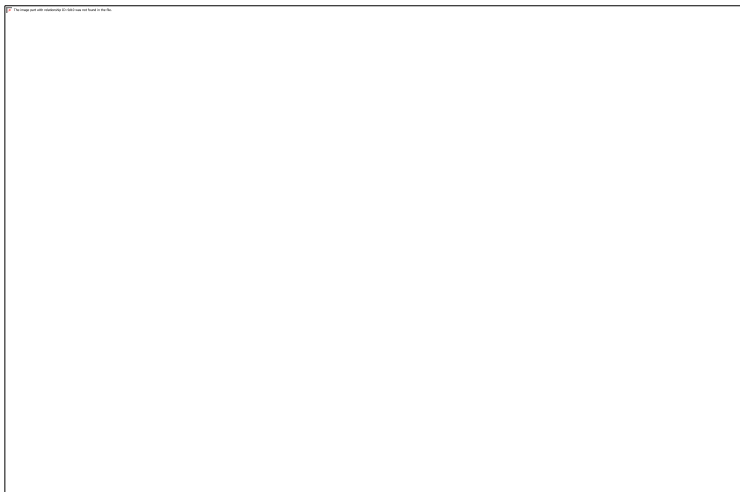
atas sudah terisi, fasilitator meminta partisipan untuk melihat kembali ke kolom 1 dan 2, serta melihat apakah mereka sudah merasa cocok dengan tanda bintang yang mereka berikan. Misalnya, dengan menanyakan Apakah bapak dan ibu sudah sepakat dengan tanda bintang di atas? Atau adakah yang masih merasa kurang cocok dengan pemberian tanda bintang tersebut?

Di sini fasilitator membantu partisipan untuk mengonsensuskan jawaban yang sudah mereka berikan. Bila partisipan masih merasa ada yang kurang pas dalam pemberian tanda bintang tersebut, ia diminta untuk mengemukakan pendapatnya. Di sini dimungkinkan jawaban pada kolom 2 (tanda bintang) dapat berubah sesuai dengan kesepakatan partisipan.

- g. *Berikan tanda bintang (*) pada kolom seberapa serius masalah tersebut dirasakan masyarakat.* Dari hasil proses diskusi poin g diharapkan masing-masing partisipan sudah mendapatkan kesepakatan tentang tanda bintang yang mereka berikan pada kolom 2. Setelah itu, partisipan diminta untuk memberikan tanda bintang pada kolom "seberapa serius masalah tersebut dirasakan masyarakat." Di sini partisipan diminta untuk mendiskusikan berapa bintang yang akan mereka berikan untuk setiap masalah yang telah ditulis. Bila mereka merasa bahwa masalah itu sangat serius dan mengganggu masyarakat maka mereka dapat memberikan 5 bintang (*****), sedangkan bila masalah itu bukanlah masalah yang serius maka mereka dapat memberikan 1 bintang (*). Contoh:



- h. *Klarifikasikan jawaban partisipan.* Setelah partisipan mendiskusikan dan memberikan jawaban sehingga kolom 3 di atas sudah terisi, fasilitator meminta partisipan untuk melihat kembali ke kolom 1 dan 3, serta melihat apakah mereka sudah merasa cocok dengan tanda bintang yang mereka berikan. Misalnya, dengan menanyakan "Apakah Bapak dan Ibu sudah sepakat dengan tanda bintang di atas? Atau adakah yang masih merasa kurang cocok dengan pemberian tanda bintang tersebut?" Di sini fasilitator membantu partisipan untuk mengonsensuskan jawaban yang sudah mereka berikan. Bila partisipan masih merasa ada yang kurang pas dalam pemberian tanda bintang tersebut, ia diminta untuk mengemukakan pendapatnya. Di sini dimungkinkan jawaban pada kolom 3 dapat berubah sesuai dengan kesepakatan partisipan.
- i. *Laksanakan penghitungan suara.* Setelah proses diskusi mencapai kesepakatan tentang tanda bintang yang diberikan



pada kolom 2 dan 3, fasilitator dapat menjumlahkan jumlah bintang yang ada. Dari penjumlahan bintang tersebut, akhirnya akan dapat diketahui masalah mana yang paling penting untuk ditangani. Misalnya:

Dari contoh di atas, dapat diketahui bahwa masalah hubungan seks pranikah (no. 2) dan masalah banyaknya anak jalanan (no. 20) di komunitas tersebut adalah masalah yang menjadi prioritas untuk ditangani.

Pemetaan Partisipatoris (Participatory Mapping)

Teknik ini dapat digunakan untuk membantu masyarakat untuk dapat mengidentifikasi di area mana saja di lingkungan mereka suatu masalah (terutama masalah yang dirasa sangat mengganggu masyarakat) itu sering terjadi, serta potensi-potensi yang terkait dengan aset komunitas. Di samping itu, melalui pemetaan ini, community worker dapat membantu masyarakat untuk menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Hal ini biasanya muncul ketika masyarakat mencoba menjelaskan peta yang mereka buat.

Pemetaan ini sendiri sebenarnya bukan merupakan pemetaan yang menggambarkan area secara tepat karena yang dituju dari proses membuat peta di sini adalah bagaimana fasilitator memancing partisipasi warga agar dapat terlibat aktif dalam proses assessment. Langkah-langkah yang dilakukan dalam membuat peta ini adalah sebagai berikut.

Membentuk kelompok diskusi

Undanglah kelompok-kelompok warga yang mewakili berbagai RW J umlah partisipan dalam satu kelompok diskusi bisa lebih dari lima belas orang, tetapi diusahakan kurang dari tiga puluh orang. Meskipun angka tiga puluh itu bukan harga mati, tetapi community worker dapat berusaha untuk menjaga agar partisipan tidaklah terlalu banyak karena bila jumlah peserta lebih dari tiga puluh orang, dikhawatirkan proses pembuatan peta malahan menjadi tidak optimal. Para peserta dalam pertemuan ini sebaiknya mewakili berbagai kelompok dalam masyarakat, termasuk mereka yang kurang diuntungkan atau terabaikan.

- ***Jelaskan tujuan dan aturan main pada partisipan***

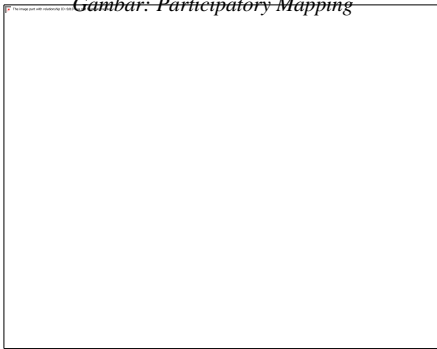
Dalam pertemuan ini, ada baiknya bila community worker yang bertindak sebagai fasilitator menjelaskan terlebih dahulu tujuan pertemuan dan aturan main dalam pertemuan ini sehingga partisipan dapat menyadari bahwa kehadiran mereka memang bermakna dan bukanlah kehadiran yang sia-sia. Fasilitator di sini harus berusaha mencairkan suasana dan membuat kondisi diskusi menjadi lebih relaks, serta mencoba membangun komunikasi dengan dan antarpartisipan sehingga mereka yang berasal dari kelompok yang kurang beruntung tidak menjadi rendah diri (minder) ketika ingin mengemukakan pandangannya.

- ***Fasilitator meminta salah seorang partisipan untuk menggambarkan daerah mereka***

Ketika akan memulai proses menggambar ini fasilitator menjelaskan bahwa gambar ini tidaklah harus persis dengan gambar yang sebenarnya dan membantu membangkitkan kepercayaan diri partisipan apabila mereka merasa bahwa mereka

semua tidak bisa menggambar peta. Di sini fasilitator meminta salah satu saja dari partisipan untuk menggambar, dan mengatakan bahwa partisipan yang lain dapat menambahkan bila mereka merasa bahwa gambar yang ada masih kurang tepat. Lihat Gambar di bawah ini.

Gambar: Participatory Mapping



Sumber: Adi (2008)

Pria di samping adalah warga masyarakat yang diminta oleh fasilitator untuk menggambar peta pertama kali. Meskipun pada awalnya ia kadang ragu-ragu;

fasilitator dapat membangkitkan semangat bapak tersebut di atas dengan memilih kata-kata yang dapat mendukung partisipan agar dapat memunculkan kemampuannya untuk menggambar.

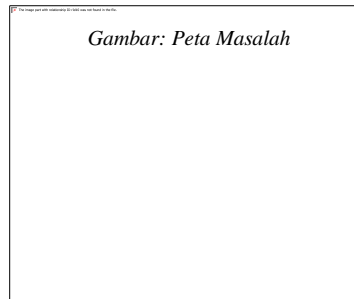
Di sini fasilitator berperan dalam memberikan support pada partisipan yang sudah memberanikan diri untuk menggambar dan meminta masyarakat untuk mau memberikan masukan. Dukungan dari segenap partisipan menjadi penting agar gambar yang dibuat dapat menjadi lebih lengkap dan bukan hasil penggambaran satu orang partisipan saja.

- ***Fasilitator meminta salah seorang partisipan untuk melengkapi gambar daerah mereka***

Di sini fasilitator mencoba membangkitkan motivasi warga masyarakat untuk mau berpartisipasi dan memberikan masukan baik dalam bentuk keterangan ataupun mengingatkan warga yang sedang menggambar apabila ia lupa menggambar daerah-

daerah yang telah didefinisikan mempunyai masalah yang serius dan mengganggu masyarakat. Proses saling melengkapi gambar ini akan berlanjut hingga mereka akhirnya dapat sepakat bahwa gambar yang mereka buat sudah cukup meng-gambarkan area yang bermasalah dan mungkin juga potensi yang terkait dengan aset komunitas mereka.

Gambar di samping meru pakan hasil gambar masyarakat setelah mereka memberikan masukan dan perbaikan secara bertahap. Dalam proses ini, warga masyarakat juga memberikan penjelasan tentang gambar yang sedang mereka buat.



Sumber: Adi (2008)

Dalam kondisi seperti ini, fasilitator dapat memancing warga untuk dapat mengelaborasi penjelasan mereka sehingga note-taker dapat mencatat peristiwa-peristiwa tersebut, yang akhirnya dapat memperluas wawasan *community worker* tentang apa yang pernah terjadi di wilayah kerja mereka.

Dari Gambar tersebut dapat terlihat bahwa gambar permasalahan dan potensi masyarakat serta peristiwa yang terjadi dan membekas di hati masyarakat dapat tergambarkan dengan cukup baik oleh warga. Meskipun disadari bahwa gambar tersebut tidak memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai peta yang mewakili skala geografis dari daerah tersebut, tetapi peta ini dapat memberikan gambaran tentang apa yang terjadi pada komunitas tersebut. Dalam kaitannya dengan Gambar tersebut di atas adalah di mana saja natural hazards (seperti, banjir dan angin taufan) pernah terjadi dan kapan hal itu terjadi. Dari peta di atas juga tergambar

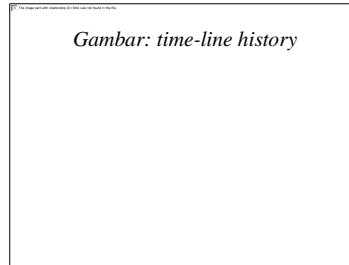
perubahan pemanfaatan lahan yang pada awalnya merupakan lahan yang digunakan untuk sawah kemudian dialihkan menjadi pertokoan, sekolah, dan rumah warga.

Alur Sejarah Masalah dan Perubahan di Masyarakat (Time-Line History)

Teknik ini dapat digunakan untuk membantu masyarakat agar dapat mengidentifikasi alur sejarah timbulnya masalah di daerah mereka dan perubahan-perubahan apa saja yang terjadi terkait dengan berkembangnya daerah mereka. Langkahlangkah untuk mendapatkan informasi ini serupa dengan proses mendapatkan informasi melalui pemetaan partisipatoris. Akan tetapi, program ini dilakukan dengan menggali informasi dari partisipan tentang berbagai kejadian tersebut dalam suatu alur waktu tertentu. Gambar 8.3 di bawah ini mungkin dapat memberikan ilustrasi tentang matriks *time-line history*.

Gambar *time-line history*.

Menggambar hasil dari proses pengumpulan data dengan membuat *time-line history*. Dari gambar tersebut terlihat beberapa garis yang mewakili kejadian-kejadian ataupun masalah yang pernah mereka alami, serta perubahan yang terjadi di masyarakat.



Sumber: Adi (2008)

Sambil membuat bagan berdasarkan alur waktu dan peristiwa ini, community worker dapat berinteraksi dengan warga masyarakat guna menggali data lebih mendalam sehingga di akhir proses pembuatan time-line history ini community worker akan dapat memahami lebih jauh tentang apa yang terjadi di komunitas tersebut. Bahkan bila

teknik ini dikombinasikan dengan teknik pemetaan dan pembuatan matriks prioritas masalah, community worker akan mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang kondisi masyarakat di wilayah kerja mereka.

Diagram Venn Hubungan Antarlembaga

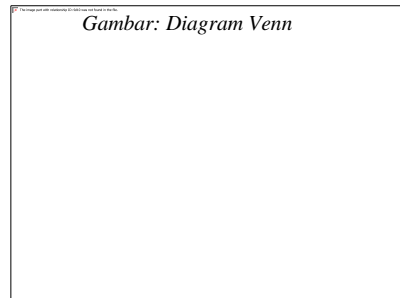
Teknik ini pada dasarnya mencoba menggambarkan hubungan antarlembaga ataupun antarinstitusi dalam suatu komunitas. Diagram Venn ini digunakan untuk menggambarkan kedekatan dan jarak antara satu organisasi dengan organisasi yang lainnya. Melalui diagram ini juga dapat dideteksi beberapa lembaga, baik pemerintah maupun nonpemerintah yang terlibat dalam berbagai upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Penerapan teknik ini mempunyai kemiripan dengan cara membuat peta partisipatoris maupun time-line history. Akan tetapi, hasil yang didapat bukanlah dalam bentuk peta ataupun garis, melainkan berbagai Diagram Venn yang berwarna-warni sesuai dengan kelompoknya. Kedekatan dan jarak antardiagram juga merefleksikan kedekatan masing-masing organisasi yang terkait dengan masalah yang dihadapi masyarakat. Akan tetapi, jarak antardiagram bukanlah jarak yang bersifat absolut, tetapi lebih bersifat jarak yang komparatif.

Jarak komparatif ini sekadar menunjukkan perbandingan kedekatan suatu organisasi dengan organisasi lainnya dengan membandingkan beberapa organisasi terkait. Hal yang penting di sini adalah bagaimana warga masyarakat dapat menjelaskan gambar yang ia maksudkan dan mengapa ia menggambar seperti itu, Dalam hal ini, warga dapat mengemukakan pandangannya secara terbuka mengenai

kedekatan dari insitisi yang satu dengan yang lain, juga kedekatan dari berbagai institusi tersebut dengan para partisipan yang hadir dalam proses diskusi tersebut.

Dalam situasi ini kemampuan *community worker* untuk memancing dan mendorong warga agar dapat mengartikulasikan apa yang mereka maksudkan tetap menjadi hal yang penting meskipun pada



Sumber: Adi (2008)

awalnya mereka hanya diminta menggambarkan lingkaran-lingkaran yang mengaitkan keberadaan lembaga dengan para partisipan sebagai bagian dari komunitas yang lebih luas. Sebagai contoh bisa dilihat pada Gambar Diagram Venn di bawah ini. Dalam gambar ini terlihat ada berbagai Diagram Venn yang saling berdekatan ataupun berjauhan, seperti telah diuraikan di atas.

Dalam Gambar Diagram Venn juga terlihat wakil warga tengah menjelaskan pada warga lainnya hasil dari Diagram Venn yang mereka buat, alasan mengapa Diagram Venn mereka meletakkan berbagai bentuk diagram dalam struktur tersebut, serta meminta masukan dari warga lain yang sebelumnya tidak terlibat dalam pembuatan Diagram Venn tentang apa yang sudah dirumuskan oleh kelompok mereka.

Dalam proses pembuatan Diagram Venn ini, seperti pula pada teknik yang lain, konfirmasi terhadap warga masyarakat selalu dilakukan agar menumbuhkan rasa kebersamaan dan rasa memiliki pada setiap warga yang hadir dalam pertemuan tersebut. Pengonfirmasian dan upaya mencari kesepakatan ini perlu tetap

dilakukan agar hasil yang didapat sudah merupakan konsensus dari warga masyarakat.

Keempat teknik pengidentifikasian kebutuhan dan aset komunitas di atas, merupakan sebagian dari teknik yang dapat digunakan ketika melakukan assessment dengan metode PRA karena masih ada berbagai teknik pengumpulan data dalam PRA yang tidak dibahas dalam buku ini, tetapi dapat bermanfaat bila *community worker* mau menggunakan teknik tersebut guna mengetahui kondisi masyarakat secara lebih jauh. Misalnya, kajian mata pencaharian, matriks pasangan (*pair wise matrix*), matriks aktivitas, transek, dan berbagai teknik lainnya. Selain assessment melalui kelompok, teknik pengumpulan data melalui wawancara perseorangan pun dapat dilakukan dan mempunyai manfaat yang cukup besar karena dapat memberikan masukan yang mungkin berbeda dengan wawancara kelompok.

Wawancara Individual

Terkait dengan wawancara semiterstruktur ataupun wawancara tidak terstruktur yang dilakukan secara perseorangan (*individual interview*) ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh *community worker* (dalam hal ini mereka yang bertindak sebagai pewawancara), antara lain sebagai berikut.

- a. Sebelum memulai wawancara *community worker* harus berusaha

Peta Sosial ekonomi Ummat

Wawancara.

- b. Memulai dengan salam dan menjelaskan tujuan pertemuan, serta menegaskan bahwa *community worker* sebenarnya hendak belajar dari komunitas tersebut. Oleh karena itu, masukan dari partisipan

- akan sangat membantu *community worker* untuk memahami kondisi masyarakat tersebut.
- c. Community worker memulai wawancara dengan menanyakan hal yang mudah terlebih dahulu, agar partisipan dapat terjalin kedekatan dengan pewawancara dan bukannya merasa pusing dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara.
 - d. Community worker dalam melakukan wawancara haruslah berusaha menciptakan suasana informal dan mengombinasikan antara mengajukan pertanyaan dan mengembangkan diskusi dengan warga masyarakat.
 - e. Pewawancara dalam proses wawancara harus berupaya agar berpikiran terbuka, objektif, dan kritis terhadap informasi yang disampaikan warga masyarakat karena tidak jarang ada informasi yang tidak sebenarnya yang disampaikan oleh warga agar mereka nantinya akan mendapat keuntungan yang lebih besar bila program sudah dijalankan.

Daftar Pustaka

- Adi, Isbandi R. (2008). *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

BAB IX

Mengenal Tehnik Pemetaan Swadaya dalam Program PNPM Mandiri Perkotaan

*(Sumber: Booklet Seri Siklus PNPM Mandiri Perkotaan, Panduan
Fasilitator Pemetaan Swadaya, 2008)*

Pengantar

Pemetaan Swadaya merupakan kegiatan yang saling terkait dengan refleksi kemiskinan. Melalui refleksi kemiskinan salah satu keluaran yang dihasilkan adalah berbagai penyebab masalah kemiskinan yang pada ujungnya bersumber kepada lunturnya nilai-nilai kemanusiaan atau sikap perilaku orang yang menyebabkan meningkatnya keserakahan dan menipiskan kepedulian. Dalam pemetaan swadaya permasalahan tersebut digali informasinya sehingga akan didapatkan data yang lengkap dari setiap permasalahan. Melalui proses pemetaan swadaya masyarakat melakukan proses belajar untuk:

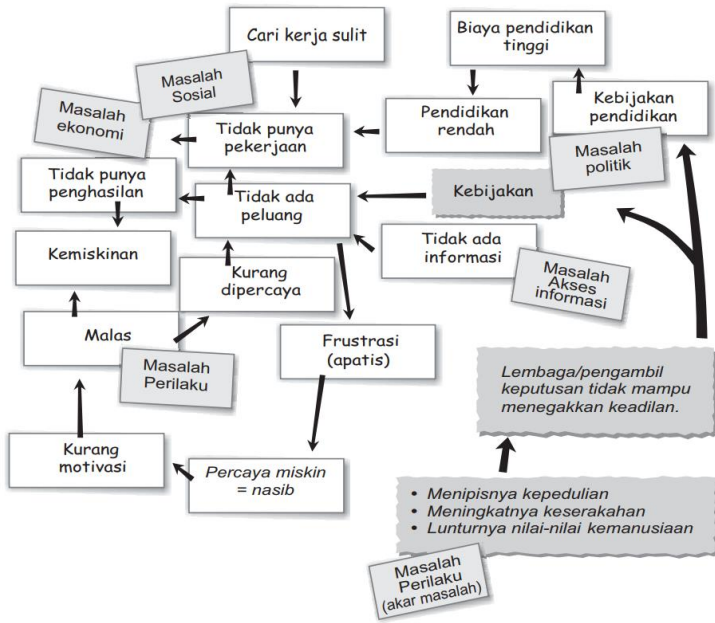
Menggali informasi. Bagaimana kondisi nyata dari masalah-masalah yang dikemukakan dan dirumuskan pada saat refleksi

kemiskinan (sosial menyangkut pendidikan, kesehatan, pengangguran, ekonomi, lingkungan, kelembagaan, dan kepemimpinan)? Masalah–masalah tersebut harus didukung oleh data dan fakta, sehingga diperlukan proses penelitian untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan.

Mengkaji. Informasi dan fakta yang sudah didapatkan dianalisa dan dikaji bersama. Proses ini merupakan analisa kritis terhadap berbagai kondisi yang ada berdasarkan informasi dan fakta tadi untuk dicari sebab akibatnya termasuk kelompok–kelompok yang terkena dampak dari masalah yang ada (kelompok sasaran). Setiap informasi yang muncul dianalisa apakah hal itu merupakan masalah yang sebenarnya atau hanya merupakan gejala saja.

Merumuskan masalah. Pada tahapan ini masalah yang sudah ditemukan dan disepakati bersama dikelompokkan (pengorganisasian masalah), kemudian dianalisa hubungan sebab akibatnya dengan kembali membuat Pohon Masalah seperti yang dilakukan dalam refleksi kemiskinan. Dengan demikian dalam melakukan analisa kritis akan terjadi proses refleksi yang berulang–ulang. Artinya refleksi kemiskinan tidak hanya terjadi pada saat siklus yang pertama akan tetapi terus dilakukan dalam siklus Pemetaan swadaya.

Peta Sosial ekonomi Ummat



Pengertian swadaya dalam hal ini yaitu semua proses penggalian informasi, analisa dan rumusan masalah dilakukan oleh masyarakat. 'Orang luar' (Fasilitator) hanya memfasilitasi proses, bahkan jika memungkinkan Fasilitasi juga dilakukan oleh Relawan yang merupakan unsurnya masyarakat. Keterlibatan 'orang luar' diharapkan sekecil mungkin, artinya peran Fasilitator (P2KP) hanya diperlukan untuk mendorong masyarakat agar mereka belajar untuk menganalisa dan mencari alternatif pemecahan masalah, apabila masyarakat memang belum mampu mengembangkan gagasan yang dibutuhkan. Pada

Penting diingat
 Partisipasi atau pendekatan dari bawah bukan dalam arti masyarakat dibiarkan untuk semaunya, akan tetapi fasilitator harus membimbing mereka menemukan berbagai alternatif pemecahan masalah dan konsekuensi-konsekuensi dari berbagai alternatif tersebut sehingga keputusan yang diambil oleh masyarakat atas dasar kesadaran kritis bukan karena "asal mudah" dilakukan.

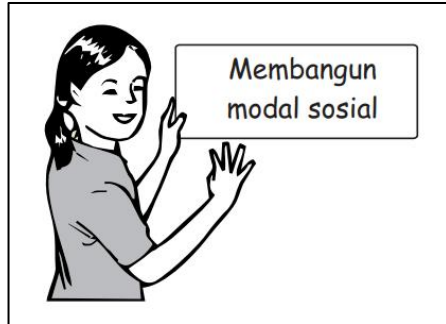
pelaksanaannya proses peng-galian informasi, analisa ma-salah, dan perumusan masalah seringkali tidak berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi merupakan proses yang dilaksanakan sekaligus. Metode dan teknik yang dikembangkan untuk Pemetaan Swadaya adalah metode yang lebih menekankan pada proses diskusi masyarakat. Alat-alat kajian (tools) yang dikembangkan adalah alat untuk mengajak masyarakat terlibat dalam proses penggalian informasi, analisa dan perumusan masalah/kebutuh-an, sehingga melalui proses tersebut sebetulnya masyarakat yang terlibat menjadi peneliti bagi diri dan kehidupan lingkungannya sendiri.

Tujuan

Melalui proses Pemetaan Swadaya hasil yang diharapkan adalah:

- Masyarakat memahami persoalan nyata mereka sendiri berdasarkan kepada fakta dan informasi yang ada, sehingga yang mereka rumuskan bukan daftar keinginan seseorang akan tetapi daftar kebutuhan yang bermanfaat untuk lingkungannya terutama dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
- Masyarakat dapat menyadari persoalan kehidupan dan lingkungan yang mereka hadapi, sehingga diharapkan terjadi pemahaman terhadap kondisi warga di lingkungannya. Penyadaran ini merupakan renungan terhadap permasalahan dirinya dan orang lain di lingkungannya sehingga diharapkan tumbuh kebersamaan, berbagi informasi dan pengetahuan, toleransi, kepedulian terhadap warga sekitar dan mencari jalan keluar dari keadaan-keadaan yang dianggap mengganggu (masalah).

- Masyarakat menyadari potensi-potensi yang dimiliki oleh mereka, sehingga pemecahan masalah (peme-nuhan



kebutuhan) tidak se-matamata didasarkan kepada kehendak dan bantuan 'orang luar' akan tetapi lebih banyak mengutamakan kemampuan sumberdaya dan swadaya masyarakat

Keluaran

- Adanya data dan rumusan permasalahan warga miskin menyangkut permasalahan sosial, ekonomi dan lingkungan.
- Adanya daftar KK dan jiwa miskin serta permasalahan yang khusus dari masing-masing jiwa.
- Adanya peta wilayah, peta sebaran warga miskin dan peta-peta topical (kesehatan, pendidikan, sarana-prasarana lingkungan, dan sebagainya sesuai kebutuhan).
- Adanya kriteria kepemimpinan yang disepakati oleh masyarakat sebagai dasar bagi pemilihan anggota "Badan Keswadayaan Masyarakat"
- Teridentifikasinya lembaga pengambil keputusan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat Kelurahan/Desa, yang sesuai dengan kriteria BKM/LKM
- Adanya kebutuhan masyarakat terhadap lembaga untuk penanggulangan kemiskinan yang demokratis.

- Adanya daftar potensi untuk pemecahan masalah–masalah sosial, ekonomi dan lingkungan.
- Adanya rencana kerja untuk pembangunan BKM dan pengembangan KSM

Penyelenggara

- Pemetaan di tingkat RW/Dusun: Ketua RW, Tim PS dan Fasilitator
- Lokakarya tingkat Kelurahan/desa: Lurah/Kepala Desa, Tim PS dan Fasilitator

Daftar Pustaka

PNPM Mandiri Perkotaan. (2008). Panduan Fasilitator Pemetaan Swadaya. In *Seri Siklus PNPM Mandiri Perkotaan* (1st ed.). Departemen Pekerjaan Umum.

BAB X

Tahapan Pemetaan Swadaya dalam Program PNPM Mandiri Perkotaan

*(Sumber: Booklet Seri Siklus PNPM Mandiri Perkotaan, Panduan
Fasilitator Pemetaan Swadaya, 2008)*

Tahap 1: Persiapan

Agar proses Pemetaan Swadaya memperoleh hasil yang optimal, dan memperkecil risiko kegagalan, serta mempermudah pelaksanaan di lapangan, maka perlu persiapan yang baik. Di bawah ini dijelaskan mengenai langkah-langkah minimal yang harus dilaksanakan sebelum mengawali Pemetaan Swadaya.

1. Pembentukan Tim PS

Pada tahap pertama, perlu disepakati dengan relawan dan berbagai pihak di tingkat kelurahan/desa, siapa yang akan memfasilitasi keseluruhan kegiatan Pemetaan Swadaya. Tidaklah mungkin keseluruhan warga masyarakat menjadi Fasilitator dalam proses PS, maka harus dikembangkan Tim yang akan terlibat untuk memfasilitasi dan mengorganisir proses yang disebut dengan Tim PS.

Anggota Tim ini terdiri dari: (1) relawan–relawan warga yang mau menyumbangkan waktu, tenaga, dan pikirannya; (2) Tim Fasilitator dan apabila dirasa perlu dan memungkinkan jumlah Tim PS ini dapat ditambah dengan melibatkan lembaga–lembaga atau individu yang mempunyai kepedulian dan atau kemampuan dalam hal penggalian informasi dan kajian yang sifatnya teknis (sebagai narasumber untuk bidang–bidang teknis tertentu misal dari puskesmas, guru, dinas pekerjaan umum dan sebagainya). (3) Akan sangat baik kalau melibatkan anggota Komunitas Belajar Perkotaan (KBP).

Perbandingan antara 'orang luar' dan 'orang dalam' dalam Tim PS sebaiknya seimbang. Jika kebanyakan anggotanya 'orang luar', akan ada kecenderungan 'orang luar' mendominasi dan berdiskusi di antara mereka sendiri. Komposisi dari relawan juga sebaiknya berimbang antara berbagai golongan (apabila memungkinkan disesuaikan dengan relawan yang ada), seperti lelaki dan perempuan, wakil kelompok tua dan muda dan sebagainya. Tim dibagi dalam beberapa sub Tim sesuai dengan kebutuhan kajian yang akan dilakukan dan jumlah Dusun/RW di kelurahan/desa. Semakin banyak sub tim, akan semakin baik mengingat kajian yang dilakukan cukup banyak.

2. *Persiapan Teknis*

Sebelum penyelenggaraan musyawarah, Tim Panitia terlebih dahulu harus mempersiapkan:

- Menentukan siapa yang akan diundang dalam pemetaan swadaya tingkat dusun/RW

- Menyiapkan undangan (peserta pertemuan sesuai yang telah disepakati)
- Mengundang baik secara lisan maupun tertulis kepada warga untuk hadir dalam pertemuan/diskusi kajian
- Waktu dan tempat pelaksanaan harus disepakati bersama masyarakat dan perangkat kelurahan/desa.
- Mempersiapkan tempat pertemuan (bisa di rumah salah satu warga, balai RW atau tempat lain sesuai kesepakatan). Mempersiapkan konsumsi.
- Mempersiapkan alat-alat dan bahan yang diperlukan.
- Biaya pertemuan, seperti untuk alat tulis seperti plano dan spidol besar dan konsumsi sederhana, masyarakat perlu didorong untuk swadaya agar terbiasa berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan bagi kepentingan mereka sendiri.
- Harus dipastikan adanya pencatat proses yang akan mendokumentasikan hasil Pemetaan Swadaya.

3. *Persiapan Materi*

Pahami dahulu materi dari topik yang akan dibahas dalam setiap kajian (Tim PS sebelumnya akan mendapatkan bimbingan dari fasilitator). Pelajari panduan fasilitasi untuk setiap kajian dan catatlah kata-kata kunci yang harus diperhatikan. Kalau perlu, pelajari juga beberapa referensi yang disarankan dalam panduan ini atau dari sumber lain.

4. *Latihan (simulasi)*

Sebelum memfasilitasi diskusi bersama masyarakat, Tim PS sebaiknya berlatih terlebih dahulu dengan melakukan simulasi bersama teman-teman satu tim, agar pada

pelaksanaan diskusi Anda lebih siap. Lakukan perbaikan terus menerus selama proses pemetaan swadaya. Setiap akhir dari kajian, bahas bersama informasi apa saja yang sudah didapatkan, apakah ada kesulitan dalam memfasilitasi, apa yang harus diperbaiki, lakukan persiapan dan simulasi untuk kegiatan kajian selanjutnya.

5. *Pengkajian Data Sekunder*

Data atau informasi sekunder merupakan informasi yang sudah tersedia atau berasal dari dokumen yang ada. Data ini antara lain mencakup keterangan mengenai keadaan masyarakat dan lingkungan tempat masyarakat tinggal, seperti topografi dan tataguna lahan, pengairan, jenis-jenis mata pencaharian masyarakat, pola konsumsi dan produksi, jumlah dan perubahan penduduk dari tahun ke tahun, kualitas dan fasilitas pendidikan, kualitas dan fasilitas kesehatan, program-program yang sudah ada sebelum P2KP,¹ lembaga-lembaga masyarakat dan kegiatannya, dan lain-lain yang dianggap perlu.

Tujuan dari pengumpulan data sekunder adalah: 1) mendapatkan gambaran awal keadaan desa, baik masyarakat maupun lingkungannya, 2) memperkirakan kebutuhan informasi yang perlu dikaji lebih lanjut di lapangan sehingga Tim PS bisa menyusun rencana kajian, dan 3) sebagai data pembanding terhadap informasi yang diperoleh langsung dari masyarakat (fungsi triangulasi).

¹ P2KP adalah Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan yang dimulai sejak tahun 1999 pasca reformasi pada era pemerintahan Megawati Soekarno Putri. P2KP melalui perkembangannya menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri Perkotaan) di era pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono pada tahun 2007.

Bisa jadi data tersebut sudah terkumpul pada saat kegiatan pemetaan sosial yang sudah dilaksanakan oleh Tim Fasilitator pada saat awal masuk ke wilayah sasaran atau dari hasil refleksi kemiskinan yang telah dilaksanakan dalam siklus sebelumnya.

6. *Penyusunan Rancangan Kajian*

Tahap selanjutnya dari kegiatan persiapan adalah menyusun rancangan kajian yang akan menjadi acuan penerapan diskusi–diskusi penggalian informasi dan proses kajian di lapangan.

Sebelum melaksanakan kegiatan PS di lapangan, Tim PS perlu merancang metode dan teknik yang akan dipakai dalam melakukan penggalian informasi, pengkajian dan perumusan masalah. Rancangan kajian yang baik adalah langkah awal yang menentukan bagi pekerjaan selanjutnya. Penyusunannya dilakukan oleh Fasilitator dengan anggota masyarakat yang telah dipersiapkan untuk menjadi anggota Tim Inti, serta stakeholder yang dapat membantu.

Berbeda dengan 'desain penelitian' yang baku dan standar, sebagaimana dilakukan oleh para peneliti akademik. Rancangan PS tidak bersifat baku melainkan hanya sekedar acuan bagi pekerjaan di lapangan. Penyesuaian akan dilakukan oleh Tim PS sesuai dengan proses di lapangan.

Agar PS menjadi lebih jelas arahnya, gagasan-gagasan dirumuskan dalam bentuk pernyataan tujuan penerapan PS. Dalam rancangan PS, tujuan ini dicantumkan sebagai hasil yang ingin dicapai dalam menyelenggarakan kegiatan penerapan PS.

Walaupun dalam konteks PNPM Mandiri Perkotaan, isu utama yang menjadi kajian adalah permasalahan kemiskinan akan tetapi di dalamnya tentu memuat isu–isu lain seperti pendidikan, sanitasi lingkungan, perumahan, kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi, masalah gizi, penyakit menular, kesehatan bayi dan balita dan lainnya, ekonomi, kepemimpinan, kelembagaan, sensitivitas gender, masalah anak terlantar dan lainnya, sesuai dengan masalah-masalah yang teridentifikasi pada saat refleksi kemiskinan.

Setelah tujuan PS terumuskan, kemudian dilakukan penentuan kebutuhan informasi yang dianggap penting untuk dikaji di lapangan. Penentuan informasi ini dilakukan selain agar waktu, tenaga, serta biaya dapat dihemat, juga agar proses dan hasil lapangan dapat memaksimalkan. Tanpa kegiatan ini bisa jadi kita akan banyak membuang waktu untuk mengumpulkan berbagai informasi yang ternyata tidak diperlukan.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan di dalam menentukan kebutuhan informasi antara lain adalah:

- Menggunakan data sekunder dan hasil refleksi kemiskinan yang telah dianalisis sebagai dasar dari penentuan topik-topik informasi kajian selanjutnya; Anggota Tim PS yang merupakan anggota masyarakat bisa dimanfaatkan sebagai narasumber untuk mengambil keputusan tentang penentuan topik-topik yang penting.
- Merumuskan tujuan khusus kajian dari setiap topik dan analisis kemungkinan keterkaitan satu topik

dengan topik lainnya berdasarkan kepada data sekunder atau penjelasan dari masyarakat pada saat refleksi kemiskinan.

7. *Pemilihan Metode/Teknik*

Berdasarkan penentuan jenis informasi yang akan digali (yang sudah ditentukan pada proses sebelumnya), maka dapat dipilih dan atau ditentukan teknik/metode yang sesuai untuk pengumpulan informasi tertentu, walaupun sebenarnya tidak bersifat baku, dan bisa diubah sesuai kebutuhan.

Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan teknik/metode:

- Walau setiap teknik yang ada biasa digunakan untuk mengkaji informasi tertentu, tetapi sebenarnya bisa disesuaikan dengan jenis informasi lain.
- Sebuah teknik kajian dikatakan memiliki penekanan khusus untuk mengkaji informasi tertentu sebenarnya tidak tepat. Memang benar, sebuah teknik telah biasa dipergunakan untuk mengkaji informasi tertentu, tetapi sebenarnya tidak harus demikian karena bisa dilakukan penyesuaian–penyesuaian.
- Sebuah informasi juga tidak hanya diperoleh dari sebuah teknik saja, tetapi dapat pula dilengkapi dengan hasil yang didapat melalui teknik-teknik lainnya.

Contoh:

Bagan alur produksi dan pemasaran untuk mengkaji tentang alur kegiatan usaha sampai dijual atau dipasarkan. Ternyata di dalam diskusi dengan teknik kelembagaan (diagram venn), muncul juga masalah pemasaran karena adanya lembaga koperasi desa yang

ternyata tidak dapat bersaing dengan tengkulak. Wawancara Keluarga Miskin biasanya juga memunculkan informasi mengenai masalah pemasaran hasil usaha keluarga.

8. *Penentuan Sumber Informasi*

Penentuan sumber informasi bisa perlu bisa tidak, karena pada dasarnya dalam penerapannya PS tidak membatasi anggota masyarakat mana saja yang terlibat di dalam diskusi. Artinya, walaupun unsur-unsur dalam masyarakat yang akan dilibatkan dipertimbangkan, tidak ada pembahasan yang ketat. Tetapi harus dipertimbangkan kohesivitas sosial di masing–masing lokasi yang menjadi satuan analisa (kajian), karena tingkat keakraban dan hubungan sosial bisa mempengaruhi apakah warga bisa menjadi narasumber untuk permasalahan di sekitarnya.

Beberapa contoh dalam mempertimbangkan pemilihan sumber informasi, antara lain:

- Kajian tentang alur pemasaran akan lebih baik apabila memperoleh informasi dari anggota masyarakat yang bekerja sebagai 'pedagang–pengumpul' bandar untuk memahami bagaimana proses pemasaran dilakukan setelah pengumpul itu membeli dari produsen.
- Kajian mengenai jenis-jenis usaha produktif (menghasilkan uang) yang dilakukan oleh perempuan, akan lebih baik bila dilakukan secara khusus dengan kelompok ibu-ibu selain dengan kelompok diskusi campuran antara bapak-bapak dan ibu-ibu (hasilnya seringkali berbeda).
- Kadang–kadang kita juga perlu 'menghindari' sumber informasi tertentu. Misalnya, kajian kelembagaan

desa/kelurahan sebaiknya tidak perlu kehadiran seseorang (tokoh suatu lembaga) dalam diskusi dengan masyarakat yang sedang bersengketa dengannya karena hal ini akan menimbulkan konflik terbuka. Sebaliknya kepada sumber informasi yang sedang bersengketa perlu dilakukan pendekatan khusus.

Tahap 2: Pelaksanaan Kajian Tingkat Dusun/RW

Pelaksanaan kajian tingkat dusun/.RW dibagi ke dalam beberapa kajian yaitu:

- **Pemetaan Swadaya 1**, terdiri dari Pemetaan Wilayah; Pemetaan Sebaran Warga Miskin; Kajian Sarana dan Prasarana Lingkungan Perumahan;
- **Pemetaan Swadaya 2**, yaitu wawancara KK miskin dan Transek (observasi permasalahan lingkungan);
- **Pemetaan Swadaya 3**, terdiri dari kajian berbagai permasalahan ekonomi;
- **Pemetaan Swadaya 4**, terdiri dari pemetaan tingkat kesehatan warga miskin dan kajian berbagai permasalahan kesehatan;
- **Pemetaan Swadaya 5**, terdiri dari pemetaan tingkat pendidikan warga miskin dan kajian berbagai permasalahan Pendidikan;
- **Pemetaan Swadaya 6**, kajian Kelembagaan dan Kepemimpinan.

Sebaiknya untuk wawancara semi terstruktur dan transek dibentuk sub tim tersendiri, agar kegiatan kajian ini bisa

dilakukan paralel dengan kegiatan kajian yang lain asalkan kajian pemetaan swadaya 1 sebagai dasar sudah dilakukan.

Dalam pelaksanaan kajian, harus selalu dilakukan kegiatan berbagi informasi antar sub-tim. Yang dimaksud 'berbagi informasi' antar Sub-Tim adalah pembahasan bersama informasi-infromasi yang telah dikumpulkan. Caranya, dengan melakukan diskusi dalam Tim besar untuk:

- Saling melengkapi informasi antar Sub-Tim
- Saling menghubungkan informasi antar Sub-Tim
- Mencek-silang antara informasi dari masyarakat dengan data sekunder, bila ada triangulasi
- Menentukan informasi-informasi yang dianggap masih 'meragukan' atau kurang lengkap untuk dicek-silang kembali kepada masyarakat (triangulasi)
- Membahas jadwal tentatif dan perubahan yang terjadi
- Merencanakan pembagian tugas sub-Tim untuk keesokan harinya.

Keseluruhan proses maupun informasi yang muncul dalam diskusi harus dicatat dan didokumentasikan. Gambar-gambar yang dibuat pada saat melakukan kajian selain disalin pada kertas yang lain juga aslinya dikumpulkan dengan baik karena akan dipergunakan sebagai bahan diskusi pada saat perumusan masalah tingkat desa/kelurahan.

Tahap 3: Lokakarya Kelurahan/Desa untuk Perumusan Masalah

a. Persiapan Bahan

Seluruh informasi hasil kajian tingkat dusun/RW dikumpulkan oleh Tim PS dan dikaji bersama. Hasil rumusan ini akan dipakai sebagai bahan presentasi dan pembahasan dalam lokakarya PS tingkat kelurahan/desa.

Untuk mempermudah proses, hasil rumusan ditulis pada selembor kertas besar mengenai:

- Berbagai masalah dan potensi yang terkumpul dari kajian–kajian yang sudah dilakukan dari setiap dusun terdiri dari: grafik–grafik dan bagan–bagan yang sudah dihasilkan; matrik permasalahan, potensi dan usulan pemecahan masalah; serta pohon permasalahan.
- Daftar KK dan jiwa miskin serta tipologi permasalahannya.
- Peta–peta tematik (sebaran warga miskin, lingkungan, kesehatan, pendidikan) kelurahan/desa yang merupakan gabungan dari pet –peta tematik setiap dusun/RW. Sebaiknya peta–peta ini dibuat dalam lembar kertas kalkir atau kertas minyak agar lebih tahan lama.

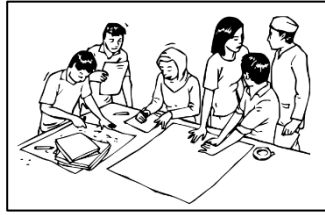
Tentukan siapa tim PS yang akan mempresentasikan hasil–hasil kajian dalam lokakarya. Sebaiknya lakukan praktek presentasi terlebih dahulu, supaya dalam pelaksanaannya tidak teragap–gagap. Tentukan informasi–informasi yang dianggap penting dan harus ditonjolkan.

b. Persiapan Teknis

Persiapan teknis yang perlu dilakukan antara lain adalah:

- Menyepakati jadual pertemuan dengan masyarakat

- Mengundang berbagai ke-lompok masyarakat untuk hadir dalam pertemuan (bisa dengan lisan bisa dengan menyebarkan undangan)
- Mempersiapkan tempat pertemuan (yang agak luas)
- Mempersiapkan konsumsi bersama masyarakat dan pihak Kelurahan/Desa
- Mempersiapkan alat dan bahan seperti, kartu–kartu, kertas besar, lem, selotif dan alat tulis.
- Menentukan agenda lokakarya

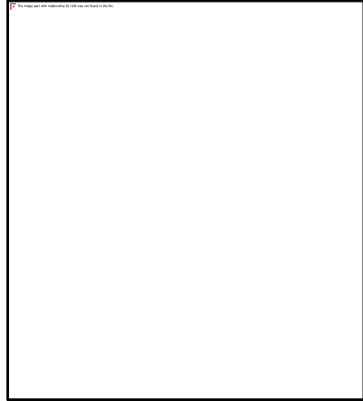


c. *Pelaksanaan Lokakarya*

- Pembukaan oleh Lurah/Kepala Desa
- Pembacaan Do'a
- Sambutan–sambutan: (*Sambutan diberikan oleh PJOK dan perwakilan dari Dinas apabila hadir*).
- Penjelasan maksud dan Tujuan (*Pemimpin lokakarya menyampaikan maksud dan tujuan Lokakarya Pemetaan Swadaya*).
- Penyajian Hasil Pemetaan Swadaya
 - Tahap selanjutnya adalah penyampaian seluruh hasil kajian kepada peserta pertemuan, sesuai dengan bahan–bahan hasil kajian dari setiap dusun/RW yang sudah disiapkan. Presentasi bisa dilakukan oleh beberapa orang wakil Tim PS.
 - Setelah selesai presentasi, pemimpin lokakarya memfasilitasi diskusi dengan memberi kesempatan

- kepada peserta untuk memberikan tanggapan dan masukan. Diskusikan bersama dan sepakati hasilnya.
- Apabila ada tambahan–tambahan usulan dari peserta yang belum tercantum dalam hasil kajian pemetaan swadaya, catat tambahan itu dalam kertas plano dan dokumentasikan hasil PS yang sudah tersedia.
 - Pengorganisasian Masalah
 - Pemimpin Lokakarya menjelaskan kepada peserta bahwa masalah – masalah yang muncul di masyarakat sangat beragam topik-topiknya, dan seperti yang sudah dibahas dalam refleksi kemiskinan masalah ini sebetulnya saling berkaitan, oleh karena itu perlu dilakukan pengorgani-sasian masalah untuk melihat hubungan sebab akibat dari masalah – masalah yang sudah ditemukan dalam PS.
 - Pemimpin lokakarya dengan dibantu oleh relawan/fasilitator mengajak peserta untuk menyusun pengorganisasian masalah.
 - Fasilitator/relawan menuliskan semua masalah yang sudah didapat dari hasil presentasi dan diskusi dalam kartu–kartu (metaplan), satu kartu untuk satu pernyataan masalah.

- Ajaklah peserta untuk menganalisa hubungan sebab akibatnya dari masalah–masalah yang sudah ditulis dalam kartu tadi sehingga menjadi pohon permasalahan seperti yang dilaksanakan dalam refleksi kemiskinan, akan tetapi dalam kegiatan ini masalah–masalah yang muncul sudah lebih jelas karena hasil kajian yang mendalam. Masalah–masalah itu kemudian dirumuskan menjadi masalah tingkat Kelurahan/Desa.



Dari hasil pengorganisasian masalah ini bisa didapatkan daftar simpul masalah yang bisa digunakan sebagai salah satu acuan untuk prioritas masalah dalam penyusunan PJM Pronangkis.

Penting diperhatikan:

Berdasarkan pengalaman, dalam proses menetapkan masalah, sebab masalah dan akibat, sering tertukar. Untuk itu Pemandu perlu menjelaskan pengertian ini berulang-ulang. Terkadang satu kartu masalah berhubungan dengan banyak kartu yang lain. Jika demikian, satu masalah bisa dibuat menjadi beberapa kartu. Pemandu sebaiknya sabar dalam memfasilitasi diskusi. Biarkan peserta untuk memproses sendiri hubungan sebab akibat ini. Pemandu hanya membantu dengan pertanyaan kritis agar peserta mempertimbangkan kesimpulannya dengan cermat.

- **Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan**
Pemimpin Lokakarya membacakan hasil kesepakatan mengenai (1) daftar permasalahan dan potensi yang akan diajukan kepada Tim Perencanaan Partisipatif (Tim PP) dan BKM/LKM beserta dengan seluruh dokumentasi yang sudah dihasilkan. (2) kesepakatan untuk membangun BKM/LKM (apakah itu menggunakan lembaga yang sudah ada atau membentuk baru) dan memimpin penandatanganan berita acara.

Daftar Pustaka

PNPM Mandiri Perkotaan. (2008). Panduan Fasilitator Pemetaan Swadaya. In *Seri Siklus PNPM Mandiri Perkotaan* (1st ed.). Departemen Pekerjaan Umum.

LAMPIRAN

LAMIRAN 1

Pemetaan Wilayah dan Sebaran Warga Miskin

*Sumber Seri Siklus PNPM-P2KP Panduan Teknik-teknik Pemetaan Swadaya
(Nes, 2008)*

Pemetaan adalah teknik yang digunakan untuk memfasilitasi diskusi mengenai keadaan wilayah tertentu beserta lingkungannya. Dalam kerangka penanggulangan kemiskinan sebagai dasar dari keseluruhan pemetaan yang akan dilakukan, maka pemetaan diawali dengan pemetaan dasar wilayah dan pemetaan perumahan warga miskin, laki laki dan perempuan, serta pemetaan lingkungan Persebaran kantung keantung kemiskinan menjadi penting dilakukan agar masyarakat mengetahui dan menyadari di mana saja letak permukiman warga miskin, bagaimana kondisinya, apa masalah masalah yang terjadi baik masalah yang dihadapi oleh laki laki maupun perempuan.

a. Pemetaan

Peta yang dihasilkan bukan hanya menjadi alat diskusi perumusan masalah dan potensi, akan tetapi juga bisa menjadi acuan untuk perencanaan dan monitoring evaluasi. Kajian akan dibagi ke dalam 3 tahap yaitu :

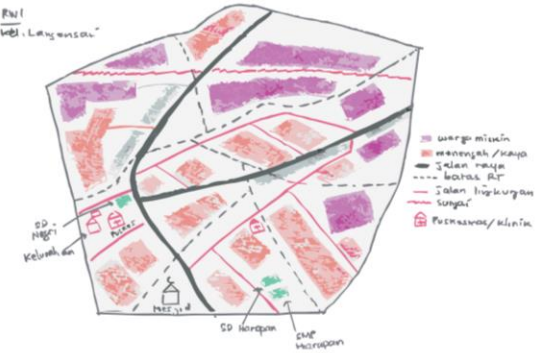
1. Pemetaan Wilayah Kelurahan/desa sebagai peta dasar untuk semua kajian pemetaan yang akan dilakukan.
2. Pemetaan sebaran warga miskin pada setiap RW/dusun dan hasilnya akan digabung menjadi peta sebaran warga miskin tingkat kelurahan
3. Pemetaan lingkungan pada tingkat RW/dusun yang nantinya akan digabung menjadi peta lingkungan pada tingkat kelurahan/desa.

Tujuan: Memfasilitasi masyarakat, laki-laki dan perempuan, untuk membuat peta sebagai dasar analisa, perencanaan dan monitoring evaluasi.

Tabel
Deskripsi Peta Dasar Wilayah Kelurahan/Desa

No	Uraian	Keterangan
1	Tujuan Kajian	Memfasilitasi warga masyarakat agar menyadari kondisi wilayah kelurahan/desa secara umum.
2	Keluaran	Peta wilayah kelurahan/desa sebagai peta dasar untuk melakukan kajian - kajian pemetaan selanjutnya baik di tingkat RW/Dusun maupun tingkat kelurahan/desa
3	Teknik	Pemetaan: Peta dibuat untuk melihat keadaan umum kelurahan/desa dan lingkungannya yang menyangkut sumberdaya dan sarana prasarana, keadaan fisik lingkungan, luas dan tata letak lahan lahan termasuk peruntukannya, penyebaran daerah permukiman, daerah (berhutan, nelayan, pertanian, dsb sesuai dengan tipologi wilayahnya), aliran air, lembaga lembaga yang ada di desa, sekolah, posyandu, puskesmas, dan sebagainya apabila dianggap perlu.

4	Sumber Informasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Karena informasi yang akan digali masih bersifat umum, maka akan lebih baik kalau dihadiri oleh anggota masyarakat dari berbagai lapisan: tua dan muda, laki-laki dan perempuan, kaya dan miskin. ▪ Berbagai peta di Desa/Kelurahan yang sudah ada dapat dijadikan sebagai data sekunder.
5	Satuan Analisa	Kelurahan/desa
6	Alat & Bahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kertas plano ▪ Kertas roti/kertas minyak ▪ Kertas karton berwarna ▪ Spidol besar ▪ Spidol warna
7	Langkah-langkah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berikan salam perkenalan kepada peserta, jelaskan maksud dan tujuan pertemuan. Sepakati bersama peserta, berapa lama waktu pertemuan akan berlangsung. Cek apakah terdapat perbedaan di antara kelompok perempuan dan laki laki dalam menyepakati waktu pertemuan. 2. Ajak peserta untuk merefleksikan pemahaman mereka terhadap PNPM Mandiri Perkotaan dan siklusnya. Cek pada kelompok perempuan maupun laki laki. Tanyakan kepada mereka apakah mereka sudah pernah ikut pertemuan sebelumnya? Apakah mereka mengetahui PNPM Mandiri Perkotaan Apabila peserta belum paham benar beri penjelasan dengan menggunakan media bantu lembar balik konsep dan siklus PNPM-Mandiri Perkotaan 3. Jelaskan kepada peserta bahwa kita sudah sampai pada siklus Pemetaan Swadaya. Terangkan mengenai maksud dan tujuan siklus pemetaan swadaya dan mengapa masyarakat, laki-laki dan perempuan, harus terlibat dalam kegiatan ini. 4. Jelaskan kepada peserta bahwa kajian dalam pemetaan swadaya dilakukan berdasarkan kepada masalah yang sudah dihasilkan dalam ... kemiskinan. Ingatkan kembali kepada penyebab kemiskinan yang sudah dibahas dalam refleksi kemiskinan. Ingatkan pula perbedaan kedalaman kemiskinan yang dihadapi oleh perempuan dan yang dihadapi oleh laki-laki. 5. Informasikan bahwa keseluruhan kegiatan pemetaan ini akan dimulai dari memetakan kondisi wilayah secara umum dan persebaran rumah rumah warga miskin. 6. Ajaklah masyarakat (peserta pertemuan) untuk mendiskusikan mengenai jenis-jenis/keadaan umum dari informasi yang akan digali yaitu: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peta keadaan Kelurahan/desa secara umum

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peta wilayah permukiman warga miskin, laki-laki dan perempuan. ▪ Jenis jenis sumberdaya penting atau informasi lain yang akan dicantumkan ke dalam peta. ▪ Simbol setiap jenis informasi yang dicantumkan ke dalam peta, baik berupa gambar sederhana ataupun menggunakan bahan-bahan lokal seperti biji jagung, dsb. <p>7. Mintalah masyarakat untuk mulai membuat peta dari tempat tempat tertentu (titik awal) yang diinginkan masyarakat. Titik awal ini biasanya berupa tempat-tempat yang mudah dikenal, seperti rumah ibadah, sekolah, kantor desa, persimpangan jalan utama dan sebagainya.</p> <p>8. Setelah lokasi-lokasi utama dipetakan, kemudian, peta itu dilengkapi dengan detail-detail seperti jalan-jalan setapak, jalan gang, kali, sungai dan lokasi lain yang lebih kecil, petunjuk-petunjuk utama seperti batasan Kelurahan/desa , dsb. Proses ini sebaiknya dimulai dengan gambar atau tanda yang sudah dibuat.</p> <p>9. Perhatikan proses terjadinya peta. Apabila masih terdapat hal hal yang terlewat, ajukanlah pertanyaan-pertanyaan yang dapat menghidupkan diskusi. Pastikan bahwa informasi yang diperoleh melalui peta sudah cukup</p>
8	Contoh	<p>Contoh Peta Wilayah (Peta Dasar)</p> <p>Rail WBI - Langensia</p> 

Tabel
 Deskripsi Peta sebaran Warga Miskin RW/Dusun.

No	Uraian	Keterangan
1	Tujuan Kajian	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memfasilitasi masyarakat untuk mengungkapkan dan mengkaji keadaan Kelurahan/desanya, terutama yang berhubungan dengan kemiskinan yang terjadi di lingkungan mereka, dan masalah masalah yang berbeda yang dihadapi oleh laki-laki dan perempuan. ▪ Memfasilitasi terjadinya komunikasi yang setara di antara warga masyarakat, laki-laki dan perempuan, sehingga terjadi proses berbagi pengetahuan, pengalaman, nilai-nilai di antara mereka. ▪ Memfasilitasi tumbuhnya kepedulian masyarakat terhadap permasalahan lingkungan yang dihadapi oleh pihak lain terutama warga miskin, laki-laki dan perempuan.
2	Keluaran	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peta Kantung-kantung kemiskinan dan daftar warga miskin di tingkat RW/dusun. ▪ Kepedulian dari warga masyarakat, laki-laki dan perempuan yaitu kemauan warga masyarakat untuk terlibat dalam upaya-upaya pemecahan masalah. ▪ Kesadaran warga masyarakat, laki-laki dan perempuan, terhadap permasalahan warga miskin, faktor-faktor penyebab dan keterkaitan antar berbagai faktor sampai akar masalah (Pohon permasalahan lingkungan permukiman).
3	Teknik	<p>Pemetaan Peta dibuat untuk melihat keadaan umum Dusun/RW dan lingkungannya yang menyangkut sebaran KK miskin dilengkapi dengan sumberdaya dan sarana prasarana, keadaan fisik lingkungan, luas dan tata letak lahan lahan termasuk peruntukannya, penyebaran daerah permukiman, daerah (berhutan, nelayan, pertanian, dsb sesuai dengan tipologi wilayahnya), aliran air, lembaga lembaga yang ada di desa, sekolah, posyandu, puskesmas, dan sebagainya apabila dianggap perlu.</p>
4	Sumber Informasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sumber informasi utama adalah warga masyarakat, terutama warga miskin baik laki-laki maupun perempuan. ▪ Perangkat pemerintahan desa/kelurahan
5	Satuan Analisa	RW/Dusun
6	Alat & Bahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kertas plano ▪ Kertas roti/kertas minyak ▪ Kertas karton berwarna ▪ Spidol besar ▪ Spidol warna

Matriks

Berdasarkan pada peta yang telah dibuat, catatlah masing-masing nama KK penghuni rumah dan alamatnya.

No.	Nama	Alamat
1	Kasmin	RT 01 Kampung Dukuh
2	Iroh	RT 01 Kampung Dukuh
3	Nia	RT 02 Kampung Dukuh

Catatan :

- Daftar KK miskin yang didapat pada saat pemetaan, akan menjadi responden untuk wawancara semi terstruktur dalam penggalan informasi profil KK miskin.
- Penting untuk diingat bahwa satu rumah mungkin saja dihuni beberapa KK

b. Kajian Sarana dan Prasarana Lingkungan Perumahan

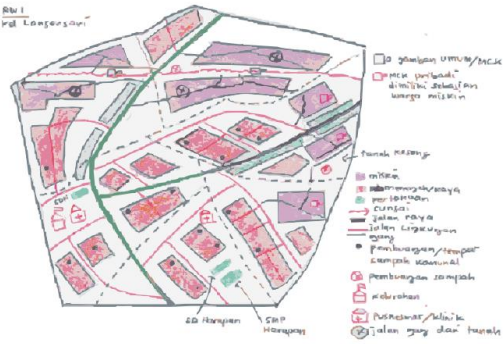
Lingkungan yang sehat mempengaruhi kesehatan masyarakat dan saling terkait dengan permasalahan kemiskinan. Tidak tersedianya air bersih akan berpengaruh pada persoalan persoalan lain, seperti timbulnya penyakit penyakit yang berhubungan dengan sanitasi, pengambilan air bersih dari sumber yang jauh dari permukiman menyebabkan hilangnya waktu produktif, harga air bersih yang tinggi juga menyebabkan pengeluaran masyarakat menjadi bertambah. Persoalan lingkungan juga bisa menimbulkan akibat yang lebih parah seperti banjir, longsor dan masalah-masalah lainnya. Perumahan yang kumuh berdesakan, lembab karena kurang ventilasi, dan sampah yang tidak terkelola adalah tempat yang subur untuk berkembangbiaknya penyakit penyakit seperti TB, diare, typhus, dan penyakit-penyakit lainnya. Persoalan persoalan bisa berbeda antara yang dihadapi oleh perempuan dan laki-laki karena berbagai faktor.

Kondisi-kondisi tersebut di atas, akan lebih parah dialami oleh warga miskin baik itu laki-laki maupun perempuan, karena kerentanan mereka yang pada akhirnya mempengaruhi produktivitas dan kualitas sumberdaya manusia.

No	Uraian	Keterangan
1	Tujuan Kajian	<ul style="list-style-type: none">▪ Memfasilitasi masyarakat, laki-laki dan perempuan untuk belajar mengenali berbagai permasalahan lingkungan perumahan dan permukiman yang dialami oleh mereka serta faktor-faktor penyebabnya, perbedaan faktor penyebab antara yang dihadapi oleh perempuan dan laki-laki, yang selama ini terjadi akan tetapi seringkali tidak disadari atau tidak dirasakan sebagai masalah bersama.▪ Memfasilitasi terjadinya komunikasi yang setara di antara warga masyarakat, laki-laki dan perempuan, sehingga

		<p>terjadi proses berbagi pengetahuan, pengalaman, nilai-nilai di antara mereka.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memfasilitasi tumbuhnya kepedulian masyarakat terhadap permasalahan lingkungan yang dihadapi oleh pihak lain terutama warga miskin, laki-laki dan perempuan.
2	Keluaran	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Daftar permasalahan lingkungan perumahan dan permukiman yang menyangkut sanitasi, air bersih, kondisi rumah dan sebagainya yang dihadapi baik oleh laki-laki maupun perempuan. ▪ Daftar potensi berupa sumberdaya manusia, dana maupun sumberdaya alam untuk pemecahan permasalahan lingkungan, baik itu potensi yang ada di masyarakat, laki-laki dan perempuan, pemerintah maupun pihak luar ▪ Kepedulian dari warga masyarakat, laki-laki dan perempuan yaitu kemauan warga masyarakat untuk terlibat dalam upaya-upaya pemecahan masalah. ▪ Peta sebaran warga, laki-laki dan perempuan yang mengalami permasalahan air bersih, sanitasi, rumah tidak layak huni permasalahan sarana dan prasarana dasar lingkungan. Kesadaran warga masyarakat, laki-laki dan perempuan, terhadap permasalahan lingkungan, faktor-faktor penyebab dan keterkaitan antar berbagai factor sampai akar masalah. (Pohon permasalahan lingkungan permukiman).
3	Teknik	<p>Bagan Arus Masukkan dan Keluaran Teknik ini dipakai untuk mengkaji sistem. Sistem adalah kesatuan dari berbagai bagian yang saling berhubungan. Sistem tersebut digambarkan ke dalam bagan yang memperlihatkan bagian bagian dalam sistem, yaitu masukkan (input) dan keluaran (output) serta hubungan antara bagian bagian dalam sistem itu. Dalam kajian lingkungan permukiman, teknik ini digunakan untuk menganalisa pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat (terutama warga miskin), laki laki dan perempuan dan pengelolaan sanitasi lingkungan.</p> <p>Pemetaan Permasalahan lingkungan Pemetaan dipakai untuk mendapatkan gambaran warga miskin, laki laki dan perempuan yang mempunyai persoalan - persoalan lingkungan permukiman serta kondisi sarana dan prasarana dasar lingkungan bagi warga miskin. Dari permasalahan permasalahan kondisi perumahan masing masing warga miskin yang teridentifikasi dari hasil pemetaan, akan bisa digambarkan lebih jauh ke dalam diagram batang sehingga bisa tergambar perbandingan perbandingan berbagai kondisi permasalahan tadi.</p>

		<p>Kalender Musim Teknik ini dipakai untuk mengkaji pengaruh - pengaruh musim pada kondisi lingkungan. Seringkali hasil kajian tidak menggambarkan secara menyeluruh kondisi lingkungan karena dilakukan pada musim tertentu. Misalnya kajian lingkungan apabila dilakukan pada musim kemarau, maka kondisi lingkungan tertentu yang hanya terjadi di musim hujan biasa jadi tidak tergal.</p> <p>Transek Teknik Transek adalah teknik yang dipakai untuk melakukan pengamatan langsung (observasi) lingkungan dan sumberdaya masyarakat berdasarkan kepada hasil pemetaan, dengan cara berjalan menelusuri wilayah yang diamati mengikuti lintasan tertentu yang disepakati. Hasil pengamatan dan lintasan tersebut, kemudian dituangkan ke dalam gambar atau bagan irisan muka bumi untuk didiskusikan lebih lanjut.</p>
4	Sumber Informasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sumber informasi utama adalah warga masyarakat, terutama warga miskin baik laki-laki maupun perempuan. ▪ Praktisi bidang lingkungan seperti dari dinas PU, Puskesmas (Dinas Kesehatan) bagian Kesehatan Lingkungan dan lainnya yang ada di lingkungan warga setempat. ▪ Perangkat pemerintahan desa/kelurahan
5	Satuan Analisa	RW/Dusun
6	Alat & Bahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kertas plano ▪ Kertas roti/kertas minyak ▪ Kertas karton berwarna ▪ Spidol besar ▪ Spidol warna
7	Peta Sarana dan Prasarana Dasar	<p>Langkah-langkah:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ... ▪ Jelaskan kepada peserta bahwa kita akan melakukan pemetaan kondisi lingkungan permukiman warga miskin dan sarana prasarana dasar yang tersedia. ▪ Jelaskan kepada peserta mengenai peta sebaran rumah warga miskin hasil kajian sebelumnya. Jiplaklah peta tersebut ke dalam kertas roti atau kertas minyak. ▪ Tanyakan kepada peserta fasilitas-fasilitas umum apa saja yang ada di wilayah mereka untuk laki-laki dan perempuan yang menyangkut: air bersih, sanitasi (misal jamban umum), jalan, pembuangan limbah cair, pembuangan sampah dan lainnya. Tuliskan dalam kertas plano.

		<p>▪ Contoh: Peta Sarana dan Prasarana Dasar</p>  <p>PANDUAN TEKNIK-TEKNIK PS</p>
8	Peta sarana dan prasarana dasar di lingkungan warga miskin	<p>Fokuskan kajian pada sarana dan prasarana dasar di lingkungan warga miskin:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mintalah kepada peserta untuk menggambarkan tata-letak fasilitas umum tersebut dalam peta ▪ Kemudian diskusikan bersama, berdasarkan pada peta: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Rumah mana yang mempunyai sumber air bersih sendiri (sumur), beri tanda (simbol). ✓ Rumah mana yang pemenuhan sumber air bersih dari PAM, beri tanda. ✓ Rumah mana yang pemenuhan kebutuhan air bersih membeli eceran, beri tanda. ✓ Rumah mana yang sama sekali tidak mempunyai sumber air bersih, beri tanda. ✓ Rumah mana yang tidak layak huni, beri tanda Rumah mana yang bukan milik sendiri (numpang atau sewa), beri tanda. ✓ Rumah mana yang dihuni oleh lebih dari satu KK, beri tanda. ✓ Rumah mana yang tidak mempunyai sarana penerangan listrik, beri tanda Rumah mana yang tidak mempunyai MCK pribadi, beri tanda.

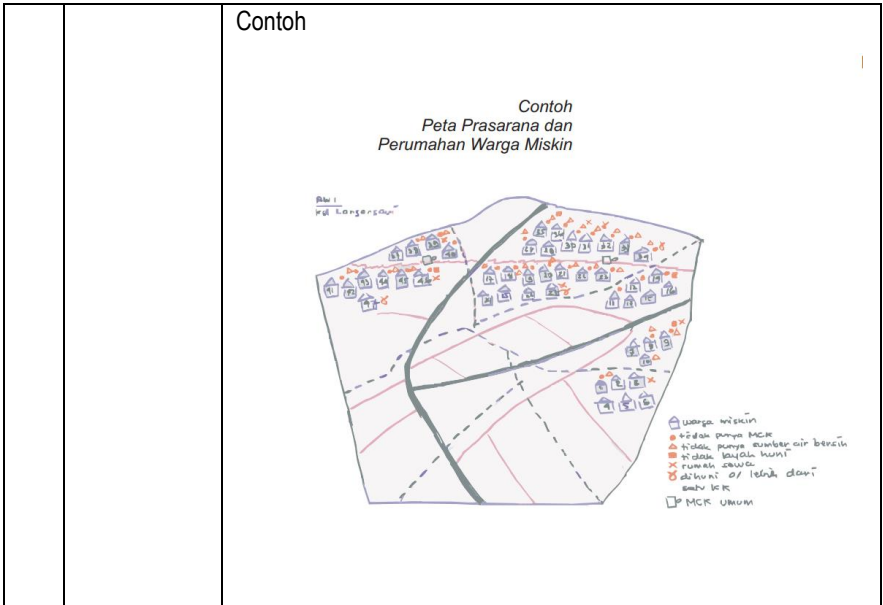
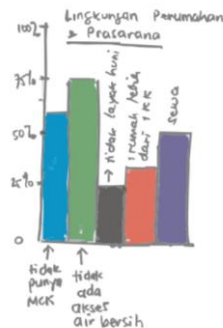


Diagram batang

- Ajaklah peserta untuk membandingkan kondisi yang dialami oleh warga miskin, tersebut ke dalam diagram batang. Bantulah mereka dengan mencoba membandingkan antara jumlah warga miskin yang bermasalah dengan jumlah seluruh warga miskin. Misalnya: berapa jumlah warga miskin yang tidak mempunyai MCK? Berapa banyak bila dibandingkan dengan jumlah keseluruhan warga miskin (pakailah angka angka perbandingan yang mudah dipahami oleh warga misal seperempat, setengahnya, kurang dari seperempat, dll). Kemudian diksusikan menjadi angka presentasi.

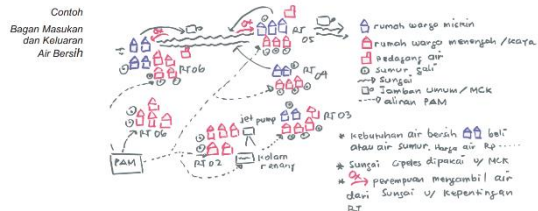
Contoh:



Bagan Masukan dan Keluaran Air Bersih

- Ajaklah peserta untuk membahas lebih dalam mengenai persoalan pemenuhan kebutuhan air bersih bagi kelompok laki-laki dan perempuan.
- Tanyakan kepada peserta apa saja sumber air bersih yang ada di lingkungan kita, kemudian tuliskan sumber-sumber air tersebut dalam kartu. Satu kartu satu sumber air.
- Tanyakan kembali kepada peserta untuk keperluan apa saja air tersebut digunakan? Tuliskan jawaban peserta dalam kartu. Satu kartu satu jenis penggunaan.
- Tempelkanlah satu kartu sumber air, kemudian tanyakan kepada peserta bagaimana sumber air itu sampai kepada masyarakat? Pakailah tanda panah untuk menggambarkan aliran air.
- Lakukan hal yang sama untuk kartu-kartu sumber air yang lain.
- Daftar pertanyaan:
 1. Bagaimana akses (pemenuhan kebutuhan) warga miskin, laki laki dan perempuan terhadap air bersih?
 2. Siapa yang bertanggungjawab menjamin tersedianya air bersih dalam rumah tangga, laki-laki ataukah perempuan?
 3. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk pemenuhan air bersih?
 4. Siapakah yang menentukan pengeluaran biaya pemenuhan kebutuhan air bersih?
 5. Siapa yang menggunakan air dalam rumah tangga?
 6. Untuk keperluan apa saja air tersebut digunakan? Apa masalah masalah yang dihadapi oleh warga miskin, lak-laki dan perempuan dalam pemenuhan air bersih?
 7. Apa dampak yang ditimbulkan dari tidak tersedianya air bersih baik bagi laki laki maupun perempuan.

Contoh:



	<p>Bagan Masukan dan Keluaran Pengelolaan Sampah</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berikutnya ajak peserta untuk melanjutkan kajian tentang sistem pengelolaan sampah. ▪ Tanyakan kepada peserta, apakah sumber-sumber penghasil sampah yang ada di lingkungan mereka (rumah, kantor, dan sebagainya). Tuliskan masing masing sumber penghasil sampah tersebut dalam kartu kemudian sepakati simbolnya dengan peserta. ▪ Tanyakan kepada peserta, kemana saja sampah tersebut dibuang atau bagaimana cara mengelolanya. Ajaklah peserta untuk membuat bagan aliran pengelolaan sampah dari satu sumber (misal rumah warga kaya/menengah). Pakailah tanda panah untuk menunjukkan perjalanan sampah. ▪ Mintalah peserta untuk menggambarkan perjalanan sampah dari sumber yang lain yang sudah diidentifikasi tadi. ▪ Daftar Pertanyaan: <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Dari sumber mana sampah paling banyak dihasilkan? Siapa yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan sampah?</i> 2. <i>Berapa besarnya biaya pengangkutan/pengelolaan sampah?</i> 3. <i>Siapa yang bertanggungjawab dalam urusan sampah di tingkat rumah tangga, laki-laki atautkah perempuan?</i> 4. <i>Siapakah yang menentukan pengeluaran biaya pengelolaan sampah dalam rumah tangga, laki-laki atau perempuan?</i> 5. <i>Apa masalah masalah yang dihadapi oleh warga miskin dalam pengelolaan sampah, baik laki laki maupun perempuan ?</i> 6. <i>Apa dampak yang ditimbulkan dari permasalahan sampah bagi lingkungan?</i> 7. <i>Apakah ada dampak yang berbeda terhadap perempuan dan laki-laki?</i> <p>Contoh</p>
--	--	---

Kalender
Musim
Kondisi
Lingkungan

- Tanyakan kepada peserta, bagaimana kondisi lingkungan kita pada musim yang lain (apabila kajian dilakukan pada musim kemarau, bagaimana kondisi lingkungan pada musim hujan?).
- Ajaklah mereka untuk mengkaji keadaan lingkungan mereka dalam kurun waktu satu tahun. Buatlah Kalender selama satu tahun dan pada bulan-bulan apa saja musim penghujan dan musim kemarau. Kemudian diskusikan bagaimana kondisi lingkungan pada musim kemarau dan bagaimana pada musim hujan. Tulislah hasil diskusi dalam bagan.

Contoh

1 Jan	2 Feb	3 Maret	4 Apr	5 Mei	6 Juni	7 Juli	8 Agt	9 Sep	10 Okt	11 Nov	12 Des
<ul style="list-style-type: none"> • Jalan gang becek • Sampah bau busuk • Banyak lalat 				<ul style="list-style-type: none"> • Debu • Kering, tidak ada air sumur • air sungai berkeruh • air bersih beli 				<ul style="list-style-type: none"> • Banjir • jalan gang becek • Sampah Bau busuk • Banyak lalat 			

Daftar Pustaka

Nes, M. (2008). Pemetaan Wilayah dan Sebaran Warga Miskin. In Seri Siklus PNPM-P2KP Panduan Teknik-teknik Pemetaan Swadaya (BUKU 4a). Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya. Retrieved from <http://kotaku.pu.go.id>

LAMIRAN 2

Ranking Kemiskinan dan Transek Lingkungan

Sumber: Seri Siklus PNPM-P2KP Panduan Teknik-teknik Pemetaan Swadaya, Ranking Kemiskinan dan Transek Wilayah (Nes, 2008)

Pengalaman program atau proyek pembangunan penanggulangan kemiskinan baik yang bersifat karitatif, maupun yang mengatasmakan pemberdayaan masyarakat, seringkali tidak tepat sasaran. Bantuan yang diberikan hanya menyentuh kelompok elite masyarakat yang mempunyai akses informasi dan bukan merupakan kelompok sasaran.

Untuk mencoba mengatasi kendala di atas, dikembangkan teknik penentuan kelompok sasaran secara lebih partisipatif dimana masyarakat difasilitasi untuk menentukan kriteria kemiskinan yang ada di lingkungannya. Dengan pendekatan ini diharapkan masyarakat dapat menentukan sendiri kelompok miskin, laki-laki dan perempuan yang menjadi sasaran program atas dasar kesepakatan bersama. Kriteria kemiskinan disepakati bersama pada proses refleksi kemiskinan, kemudian warga, laki-laki dan perempuan, yang

mempunyai kriteria yang sudah disepakati dipetakan pada saat pemetaan sebaran warga miskin, sehingga akan didapat daftar jiwa dan KK miskin berdasarkan tempat tinggalnya. Daftar KK ini akan menjadi kelompok responden yang akan diwawancara, hasilnya akan didapatkan informasi yang lebih tepat mengenai permasalahan yang khusus dari setiap anggota keluarga. Dengan demikian akan didapatkan daftar nama (jiwa) warga miskin, laki-laki dan perempuan, alamat lengkapnya serta permasalahan khusus setiap jiwa.

Data yang sudah didapat tersebut di atas dianalisa dengan teknik perangkungan, sehingga didapat daftar jiwa dan KK yang mempunyai tingkat kemiskinan yang berbeda-beda, dikelompokkan berdasarkan tingkat kedalaman kemiskinan dari masing-masing KK. Dengan mempunyai daftar masalah setiap jiwa dan KK, masalah yang dihadapi oleh kelompok perempuan dan laki-laki yang seringkali berbeda akan lebih mudah melakukan intervensi pemecahan masalah untuk setiap sasaran program dan menentukan prioritas kelompok sasaran.

Sejalan dengan wawancara kepada keluarga miskin, laki-laki dan perempuan, juga dilakukan pengamatan (observasi) mengenai permasalahan lingkungan yang sudah teridentifikasi dalam kajian lingkungan pada pemetaan swadaya 1. dari hasil observasi ini, akan didapat data yang lebih akurat mengenai permasalahan-permasalahan lingkungan yang sudah didiskusikan sebelumnya.

Memfasilitasi masyarakat, laki-laki dan perempuan untuk belajar menentukan kelompok sasaran (warga miskin) berdasarkan permasalahan yang benarbenar dihadapi bukan atas dasar ditunjuk oleh sebagian orang.

Tabel
Penjelasan Ranking Kemiskinan dan Transek Lingkungan

No	Uraian	Keterangan
1	Tujuan Kajian	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memfasilitasi masyarakat, laki-laki dan perempuan agar mendiskusikan keadaan lingkungan termasuk sumberdaya yang ada, dengan cara mengamati langsung hal yang didiskusikan di lokasinya. ▪ Memfasilitasi tumbuhnya kepedulian masyarakat, laki-laki dan perempuan, terhadap permasalahan-permasalahan kemiskinan yang dihadapi oleh pihak lain terutama warga miskin, dan permasalahan-permasalahan yang berbeda yang dihadapi oleh kelompok laki-laki dan perempuan.
2	Keluaran	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Daftar nama jiwa miskin, laki-laki dan perempuan dan alamatnya ▪ Daftar lokasi permasalahan lingkungan yang akurat. ▪ Daftar potensi untuk pemecahan permasalahan ▪ Kepedulian dari warga masyarakat, laki-laki dan perempuan yaitu kemauan warga masyarakat untuk terlibat dalam upaya-upaya pemecahan masalah.
3	Teknik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wawancara Semi Terstruktur (WST) <p style="margin-left: 20px;">Dalam metode penelitian ilmiah, teknik penelitian yang paling umum dikenal yaitu, Wawancara Semi Terstruktur (WST). WST adalah kegiatan tanya jawab secara sistematis dengan warga masyarakat yang dipilih. Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan data dari masyarakat, laki-laki dan perempuan.</p> <p style="margin-left: 20px;">Di dalam penerapan pemetaan swadaya, bentuk dan proses wawancara itu bisa dilakukan secara partisipatif dengan memberikan kesempatan seluas- luasnya kepada warga masyarakat, laki-laki dan perempuan, yang diwawancarai untuk mengemukakan pendapatnya. Caranya dengan membuat pertanyaan-pertanyaan semi terbuka. Artinya pertanyaan tidak ditentukan terlebih dahulu pilihan jawabannya, dan pertanyaan dapat diubah dan dikembangkan berdasar pada jawaban orang yang diwawancara.</p> <p style="margin-left: 20px;">Dalam PS teknik ini dipakai untuk mewawancarai keluarga miskin, maka di dalam penjelasannya teknik ini diutamakan sebagai teknik Wawancara Keluarga Miskin.</p> ▪ Matriks Ranking <p style="margin-left: 20px;">Adalah teknik untuk mengkaji sejumlah topik dengan memberi nilai pada masing-masing aspek kajian, berdasarkan sejumlah kriteria perbandingan. Kriteria</p>

		<p>dkembangkan berdasarkan pada sejumlah pendapat masyarakat, laki-laki dan perempuan, sehingga sesuai dengan keadaan setempat. Dalam kaitan dengan pemetaan swadaya, matriks ini dipakai untuk mengurutkan tingkat kemiskinan warga masyarakat, baik kelompok laki-laki maupun perempuan. Tingkat kemiskinan ini akan dipakai sebagai dasar dari penentuan penerima manfaat dan program yang akan disusun dalam PJM Pronangkis.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Transek Teknik Transek adalah teknik untuk melakukan pengamatan langsung lingkungan dan sumberdaya masyarakat, dengan cara berjalan menelusuri wilayah yang diamati mengikuti lintasan tertentu yang disepakati. Hasil pengamatan dan lintasan, kemudian dituangkan ke dalam gambar atau bagan irisan muka bumi untuk didiskusikan lebih lanjut. Wilayah dan permasalahan yang diamati adalah yang sudah didiskusikan dalam kajian lingkungan atas dasar kesepakatan masyarakat, laki-laki dan perempuan.
4	Sumber Informasi	<p>Dalam kegiatan ini ada beberapa hal yang bisa dikaji melalui proses pemetaan swadaya, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengkaji keseluruhan permasalahan yang dialami oleh setiap jiwa dari warga miskin, laki-laki dan perempuan. ▪ Mengkaji kekhasan permasalahan kemiskinan yang dialami perempuan, laki-laki, bayi dan balita. <p>Mengkaji permasalahan fisik lingkungan, yang berdampak pada kehidupan laki-laki dan perempuan.</p>
5	Satuan Analisa	RW/Dusun
6	Alat & Bahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Buku catatan Alat tulis ▪ Peta hasil pemetaan lingkungan dan permasalahannya ▪ Peta hasil pemetaan sebaran warga miskin ▪ Daftar responden untuk WST ▪ Panduan Wawancara

Tabel
Langkah- langkah Praktek
Ranking Kemiskinan dan Transek Lingkungan

No	Alat Kajian	Langkah- langkah
1	WST	<p>Langkah 1: Persiapan (Menyusun pedoman wawancara)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman wawancara disusun sesuai dengan kebutuhan kajian. Topik-topik informasi di dalam pedoman ini, merupakan 'titik masuk' ke pembicaraan yang bisa dikembangkan di dalam proses wawancara. Daftar pertanyaan yang sesuai dengan tema/topik bahasan harus ditentukan terlebih dahulu. Untuk memudahkan relawan dalam melakukan wawancara secara singkat maka dikembangkan alat bantu yang berupa daftar pengecekan (lihat contoh panduan WST dan daftar pengecekan dalam format terlampir). 2. Penting diingat bahwa panduan wawancara dan daftar pengecekan ini hanya contoh, tim PS harus mengembangkan sendiri panduan wawancara dan daftar pengecekan berdasarkan permasalahan yang muncul di lapangan. <p>Langkah 2: Pelaksanaan wawancara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyepakati dan mengatur waktu bersama keluarga yang akan diwawancara. Bisa saja kita datang secara spontan kepada responden, dan melakukan wawancara apabila situasinya memungkinkan. Kesepakatan waktu juga harus diperhatikan berdasarkan ketersediaan waktu anggota keluarga perempuan dan laki-laki. 2. Pada awal wawancara, pewawancara menjelaskan maksud kegiatan ini, dengan sederhana tetapi jelas. Tentu saja berkenalan terlebih dahulu apabila belum saling mengenal. 3. Amati keadaan sekitar, misalnya kondisi rumah, perlengkapan rumah tangga yang mereka gunakan, hal ini sangat membantu dalam pengenalan terhadap kesejahteraan mereka. 4. Lakukan obrolan mengenai berbagai kegiatan keluarga. 5. Lanjutkan wawancara dari satu topik ke topik lain dengan menggunakan pedoman wawancara sebagai panduan. Wawancara dilakukan secara informal dengan sikap yang terbuka dan akrab sehingga pembahasan dari satu topik ke topik lain terjadi secara tidak menyolok sehingga responden tidak merasa sedang diwawancara. 6. Gunakan jawaban responden untuk mengembangkan topik berikutnya. 7. Jawaban responden, agar lebih praktis dapat dimasukkan ke dalam checklist seperti pada contoh terlampir, tetapi masalah-

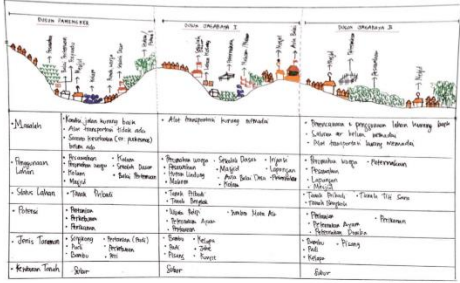
		<p>masalah keluarga tetap harus dicatat oleh pewawancara (Tim PS).</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Cantumkan nama responden, pewawancara, tempat dan tanggal wawancara. 9. Buatlah rekapitulasi hasil wawancara oleh Tim PS. Bisa menggunakan contoh format dalam lampiran atau membuat format bantu sendiri sesuai kebutuhan. <p><i>Catatan</i> <i>Dalam peta yang dihasilkan akan tergambar KK mana yang paling banyak mempunyai permasalahan (mempunyai tanda paling banyak).</i></p> <p>Langkah 3: Pembahasan hasil wawancara Pembahasan hasil wawancara dilakukan dalam dalam pertemuan warga dengan menggunakan teknik matriks ranking.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan maksud dan tujuan pertemuan 2. Ajaklah peserta melihat kembali hasil pemetaan sebaran warga miskin 3. Bahas bersama mengenai hasil wawancara semi terstruktur, kemudian diskusikan apakah hasilnya sama dengan hasil pemetaan sebaran warga miskin. Apabila ada yang tidak sama perbaiki tanda tanda dalam peta (rumah warga miskin yang mempunyai permasalahan). 4. Kemudian urutkan nama-nama KK berdasarkan kepada tingkat permasalahan yang ada. Misal: urutan 1, adalah KK yang mempunyai tanda 6 permasalahan, rangking 2 adalah yang mempunyai 4 permasalahan dan seterusnya. Hasilnya akan merupakan daftar urutan keluarga miskin. 5. Untuk setiap jenis persoalan seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sebagainya masing - masing dibuat urutan berdasarkan kedalaman masalah yang dialami oleh setiap individu. Hasilnya akan merupakan daftar urutan 'individu' yang mengalami persoalan untuk masing - masing isu. 6. Analisa bersama mana saja dari persoalan - persoalan tersebut yang merupakan masalah yang dialami menjadi persoalan lingkungan, misal persoalan wabah penyakit, pemasaran produk yang sama, air bersih, sarana pendidikan dan sebagainya. 7. Ajaklah masyarakat untuk menyadari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh keluarga miskin, laki-laki dan perempuan, siapa yang harus didahulukan untuk mendapatkan pertolongan (Ingat pertolongan tidak selalu berarti bantuan uang). Apakah ada tipe-tipe permasalahan khusus dari masing-masing komunitas (misal : tukang becak, tukang gendong, nelayan, buruh tani dsb). Perhatikan apakah ada permasalahan yang berbeda yang dihadapi oleh laki-laki dan perempuan, permasalahan yang mana yang paling berat dan harus diprioritaskan pemecahannya.
--	--	---

		<p><i>Catatan</i> <i>Penentuan urutan keluarga miskin, daftar individu yang mengalami kemiskinan dan persoalan - persoalan lingkungan dilakukan apabila semua kajian sudah dilakukan</i></p>
	<p>Transek</p>	<p>Langkah 1: Persiapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan pelaksanaan kegiatan transek harus memperhatikan kesiapan tim dan masyarakat, laki-laki dan perempuan, yang akan ikut, termasuk menentukan kapan dan dimana akan berkumpul. Juga dipersiapkan alat-alat tulis, kertas lebar (plano), karton warna-warni, kertas berwarna, lem, spidol warna-warni, juga akan menyenangkan apabila bawa perbekalan makanan dan minuman. 2. Peserta terdiri dari Tim PS dan masyarakat, biasanya terdapat anggota masyarakat yang menjadi penunjuk jalan. Tim PS sebaiknya seimbang antara laki-laki dan perempuan, dan mempunyai anggota yang memahami hal-hal yang sudah diperkirakan akan dikaji dalam kegiatan transek, terutama masalah-masalah teknis lingkungan. <p>Langkah 2: Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebelum berangkat, bahas kembali maksud dan tujuan kegiatan penelusuran lokasi serta proses kegiatan yang akan dilakukan. 2. Sepakati bersama peserta, lokasi-lokasi yang penting yang akan dikunjungi serta topik-topik kajian yang akan dilakukan. (hasil pemetaan sebelumnya bisa dijadikan acuan). Setelah itu sepakati lintasan penelusuran. 3. Sepakati titik awal perjalanan (lokasi pertama), biasanya diambil lokasi terdekat dengan keberadaan kita. 4. Lakukan perjalanan dan amati keadaan di sepanjang perjalanan. Biarkan masyarakat menunjukkan hal-hal yang dianggap penting untuk diperlihatkan dan dibahas keadaannya. Diskusikan keadaan lingkungan tersebut (drainase, pengelolaan air, dan sebagainya) dengan seksama. 5. Buatlah catatan-catatan hasil diskusi di setiap lokasi. <p>Langkah 3: Setelah Perjalanan</p> <p>Bisa saja selama berhenti di lokasi-lokasi tertentu, gambar bagan transek dibuat untuk setiap bagian lintasan yang sudah ditelusuri. Atau pembuatan bagan dilakukan setelah lintasan ditelusuri.</p> <p><i>Langkah-langkah kegiatannya adalah sebagai berikut:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan cara dan proses pembuatan bagan

	<ol style="list-style-type: none">2. Sepakati lambang atau simbol-simbol yang akan dipergunakan untuk menggambar bagan transek. Catat simbol-simbol tersebut beserta artinya di sudut kertas. Pergunakan spidol berwarna agar jelas dan menarik.3. Mintalah masyarakat, laki-laki dan perempuan untuk menggambarkan bagan transek berdasarkan hasil lintasan yang telah dilakukan. Buatlah dengan bahan atau cara yang mudah diperbaiki atau dihapus karena akan banyak koreksi terjadi.4. Pergunakan hasil gambar transek untuk mendiskusikan lebih lanjut tentang permasalahan, potensi, serta harapan-harapan masyarakat, laki-laki dan perempuan mengenai semua informasi bahasan.5. Buatlah catatan-catatan hasil diskusi (tugas anggota Tim PS adalah menjadi pencatat).6. Cantumkan nama-nama atau jumlah peserta, pemandu, tanggal dan tempat pelaksanaan.
--	--

Tabel

Contoh Ranking Kemiskinan dan Transek Lingkungan

No	Alat Kajian	Gambar																		
1	WST	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p style="text-align: right;">Nama UmurTahun Jenis kelamin Jenis Tanggungan Posisi di rumah Alamat</p> <p>A. Pertanyaan seputar masalah Kesehatan</p> <p>Kesehatan Ibu Hamil</p> <p>1 Melakukan imunisasi lengkap (TT-1, TT-2) <input type="checkbox"/> Lengkap <input type="checkbox"/> Tidak lengkap <input type="checkbox"/> Tdk imunisasi</p> <p>2 Melakukan pemeriksaan rutin kehamilan <input type="checkbox"/> 2 bulan sekali <input type="checkbox"/> 1 bulan sekali <input type="checkbox"/> tidak pernah</p> <p>3 Tempat Pemeriksaan / konsultasi rutin <input type="checkbox"/> Dokter kandungan <input type="checkbox"/> Bidan <input type="checkbox"/> Dukun beranak</p> <p>4 Perbandingan berat badan dan usia kehamilan *) <input type="checkbox"/> > BB daripada usia kehamilan <input type="checkbox"/> seimbang <input type="checkbox"/> < BB daripada usia kehamilan</p> <p>Kesehatan Reproduksi</p> <p>1 Tempat persalinan ibu melahirkan <input type="checkbox"/> Dokter kandungan <input type="checkbox"/> Bidan <input type="checkbox"/> Dukun beranak</p> <p>2 Pernah persalinan ketika melahirkan anak sebelumnya <input type="checkbox"/> tidak pernah <input type="checkbox"/> pernah</p> <p>3 pernah mempunyai penyakit Infeksi <input type="checkbox"/> tidak pernah <input type="checkbox"/> pernah</p> <p>4 Mempunyai kekurangan Zat besi (anemia) <input type="checkbox"/> tidak <input type="checkbox"/> ya</p> <p>5 Penyakit menular yang diderita <input type="checkbox"/> TB <input type="checkbox"/> Hepatitis <input type="checkbox"/> Demam berdarah <input type="checkbox"/> Malaria</p> <p>Kesehatan Balita</p> <p>1 Perbandingan berat badan dengan usia balita *) <input type="checkbox"/> > BB daripada usia balita <input type="checkbox"/> seimbang <input type="checkbox"/> < BB daripada usia balita</p> <p>2 asupan gizi (makanan) <input type="checkbox"/> 4 sehat 5 sempurna <input type="checkbox"/> sedang <input type="checkbox"/> kurang</p> <p>Melakukan imunisasi lengkap pada balita <input type="checkbox"/> Lengkap <input type="checkbox"/> Tidak lengkap <input type="checkbox"/> Tdk imunisasi</p> <p>3 (Hepatitis B, BCG, DPT, Polio, Campak)</p> <p>4 Mendapatkan Vitamin A <input type="checkbox"/> Pernah <input type="checkbox"/> belum <input type="checkbox"/> Campak</p> <p>5 Penyakit yang diderita <input type="checkbox"/> Tpa (TB) <input type="checkbox"/> Polio <input type="checkbox"/> Demam berdarah <input type="checkbox"/> Hepatitis</p> <p>Kesehatan</p> <p>1 asupan gizi (makanan) <input type="checkbox"/> 4 sehat 5 sempurna <input type="checkbox"/> sedang <input type="checkbox"/> kurang</p> <p>2 Penyakit yang diderita <input type="checkbox"/> Tpa (TB) <input type="checkbox"/> Polio <input type="checkbox"/> Campak <input type="checkbox"/> Hepatitis</p> <p>Lingkungan</p> <p>1 Kondisi rumah Tinggal <input type="checkbox"/> Permanen <input type="checkbox"/> semi permanen <input type="checkbox"/> tidak layak</p> <p>2 Kepemilikan rumah <input type="checkbox"/> milik pribadi <input type="checkbox"/> ngontrak <input type="checkbox"/> numpang</p> <p>3 Penggunaan air minum <input type="checkbox"/> PAM <input type="checkbox"/> Air Sumur <input type="checkbox"/> Air Sungai</p> <p>4 Buang Air Besar <input type="checkbox"/> WC Pribadi <input type="checkbox"/> WC Umum <input type="checkbox"/> Sungai / kebun</p> <p>5 Pembuangan sampah <input type="checkbox"/> tempat sampah <input type="checkbox"/> Dibakar <input type="checkbox"/> dibuang ke sungai</p> <p>6 Jaringan Listrik <input type="checkbox"/> Milik sendiri <input type="checkbox"/> Numpang <input type="checkbox"/> Tidak ada</p> <p>B. Pertanyaan seputar Pendidikan</p> <p>1 Tingkat Pendidikan <input type="checkbox"/> tdk sekolah <input type="checkbox"/> tamat SD <input type="checkbox"/> Tamat SLTP <input type="checkbox"/> Tamat SL TA <input type="checkbox"/> Perguruan Tinggi <input type="checkbox"/> Kurus</p> <p>C. Pertanyaan seputar masalah Pendapatan</p> <p>1 Pekerjaan <input type="checkbox"/> Bekerja <input type="checkbox"/> pengangguran</p> <p>2 Jenis pekerjaan <input type="checkbox"/> Pekerjaan tetap <input type="checkbox"/> serabutan <input type="checkbox"/></p> <p>3 Pekerjaan tetap <input type="checkbox"/> PNS <input type="checkbox"/> jasa <input type="checkbox"/> perdagangan</p> <p>4 Serabutan **) <input type="checkbox"/> pertanian <input type="checkbox"/> perdagangan <input type="checkbox"/> pertanian</p> <p>5 Penghasilan <input type="checkbox"/> Punya keterampilan <input type="checkbox"/> Tdk punya keterampilan <input type="checkbox"/> Tidak produktif</p> <p>6 Pendapatan **) <input type="checkbox"/> 700 rb - 1 juta <input type="checkbox"/> 400 rb - 700 rb <input type="checkbox"/> < 400 rb</p> <p>7 Pengeluaran <input type="checkbox"/> > dari Pendapatan <input type="checkbox"/> = pendapatan <input type="checkbox"/> < dari pendapatan</p> </div>																		
2	Transek	<p style="text-align: center;">Transek Desa Jagabaya Desa Jagabaya, Kecamatan Patemarang, Kabupaten Giris</p>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 33%;">*Membeli</td> <td style="width: 33%;">• Fleksi jalan kempes bakul • Aler-atasperahu Gila ada • Sempit kerubasan (tan air) kerubasan</td> <td style="width: 33%;">• Aler-atasperahu kerubasan kerubasan</td> </tr> <tr> <td>-Penggunaan Lahan</td> <td>• Berkebunan • Ksaw • Berpemukim orang • Sempit Sempit • Perikanan • Baka • Berkebun • Magal</td> <td>• Berkebunan kerubasan • Sempit Sempit • Magal • Lahan kerubasan • Aler-atasperahu • Kerubasan • Perikanan</td> </tr> <tr> <td>-Sifat Lahan</td> <td>• Tanah kerubasan</td> <td>• Tanah kerubasan • Tanah kerubasan</td> </tr> <tr> <td>-Pemukim</td> <td>• Perikanan • Perikanan • Perikanan • Perikanan</td> <td>• Kerubasan kerubasan • Sempit kerubasan • Sempit kerubasan • Sempit kerubasan</td> </tr> <tr> <td>-Jenis Sempit</td> <td>• Sempit • Perikanan (kerubasan) • Kerubasan • Kerubasan • Kerubasan</td> <td>• Sempit • Kerubasan • Kerubasan • Kerubasan • Kerubasan</td> </tr> <tr> <td>-Kerubasan kerubasan</td> <td>• Kerubasan</td> <td>• Kerubasan</td> </tr> </table>	*Membeli	• Fleksi jalan kempes bakul • Aler-atasperahu Gila ada • Sempit kerubasan (tan air) kerubasan	• Aler-atasperahu kerubasan kerubasan	-Penggunaan Lahan	• Berkebunan • Ksaw • Berpemukim orang • Sempit Sempit • Perikanan • Baka • Berkebun • Magal	• Berkebunan kerubasan • Sempit Sempit • Magal • Lahan kerubasan • Aler-atasperahu • Kerubasan • Perikanan	-Sifat Lahan	• Tanah kerubasan	• Tanah kerubasan • Tanah kerubasan	-Pemukim	• Perikanan • Perikanan • Perikanan • Perikanan	• Kerubasan kerubasan • Sempit kerubasan • Sempit kerubasan • Sempit kerubasan	-Jenis Sempit	• Sempit • Perikanan (kerubasan) • Kerubasan • Kerubasan • Kerubasan	• Sempit • Kerubasan • Kerubasan • Kerubasan • Kerubasan	-Kerubasan kerubasan	• Kerubasan	• Kerubasan
*Membeli	• Fleksi jalan kempes bakul • Aler-atasperahu Gila ada • Sempit kerubasan (tan air) kerubasan	• Aler-atasperahu kerubasan kerubasan																		
-Penggunaan Lahan	• Berkebunan • Ksaw • Berpemukim orang • Sempit Sempit • Perikanan • Baka • Berkebun • Magal	• Berkebunan kerubasan • Sempit Sempit • Magal • Lahan kerubasan • Aler-atasperahu • Kerubasan • Perikanan																		
-Sifat Lahan	• Tanah kerubasan	• Tanah kerubasan • Tanah kerubasan																		
-Pemukim	• Perikanan • Perikanan • Perikanan • Perikanan	• Kerubasan kerubasan • Sempit kerubasan • Sempit kerubasan • Sempit kerubasan																		
-Jenis Sempit	• Sempit • Perikanan (kerubasan) • Kerubasan • Kerubasan • Kerubasan	• Sempit • Kerubasan • Kerubasan • Kerubasan • Kerubasan																		
-Kerubasan kerubasan	• Kerubasan	• Kerubasan																		

Daftar Pustaka

Nes, M. (2008). Ranking Kemiskinan dan Transek Lingkungan. In *Seri Siklus PNPM-Mandiri Perkotaan Panduan Teknik-teknik Pemetaan Swadaya* (4b ed.). Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya. Retrieved from <http://kotaku.pu.go.id>

LAMIRAN 3

Kajian Ekonomi

*Sumber Seri Siklus PNPB Mandiri Perkotaan Teknik-teknik Pemetaan Swadaya (PS)
Kajian Ekonomi
(Nes, 2008)*

Dalam refleksi kemiskinan, kondisi ekonomi masyarakat merupakan permasalahan yang menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan tingkat 4. Kondisi ekonomi keluarga sangat berkaitan erat dengan manajemen ekonomi keluarga, berapa besarnya pendapatan dan pengeluaran masing-masing keluarga, baik pendapatan istri maupun pendapatan suami; jenis-jenis mata pencaharian yang dipunyai dan peluang-peluang yang ada. Hal ini juga berkaitan dengan apakah sistem perekonomian masyarakat berpengaruh terhadap kemiskinan yang dialami oleh mereka serta dampak-dampak masalah-masalah ekonomi terhadap kondisi kehidupan warga, laki-laki dan perempuan.

Peluang untuk berpartisipasi dalam sektor ekonomi, seringkali tidak sama antara perempuan dan laki-laki terutama pada sektor-sektor formal atau sektorsektor tertentu yang dianggap sebagai "pekerjaan laki-laki". Pada sisi lain, tingkat upah harian antara perempuan dan laki-laki juga sering tidak sama. Pada sektor-sektor

tertentu upah kaum perempuan masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan upah kaum laki-laki.

Indeks daya beli, sebagai cerminan dari tingkat ekonomi masyarakat menjadi salah satu acuan perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menjadi ukuran kesejahteraan. Di sisi lain, target peningkatan daya beli (ekonomi) baik untuk kaum laki-laki maupun perempuan menjadi target nasional yang sejalan dengan kesepakatan Millienium (MDGs) di seluruh dunia, dimana Indonesia menjadi negara yang mendukung kesepakatan tersebut. Target peningkatan IPM dan MDG ini tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional dan RPJM Daerah (kota/kabupaten). Artinya target-target peningkatan ekonomi masyarakat menjadi sejalan antara di tingkat kelurahan/desa, tingkat kabupaten/kota dan nasional.

Guna kepentingan di atas diperlukan kajian-kajian pada tingkat basis terkecil, yang dilakukan oleh warga masyarakat, laki-laki dan perempuan, mengenai persoalan ekonomi mereka sehingga masyarakat menyadari permasalahannya, termasuk permasalahan yang mungkin berbeda yang dihadapi oleh kelompok perempuan dan yang dihadapi oleh kelompok laki-laki; bisa mencari jalan keluar yang tepat, terlibat di dalam pemecahan masalah dan terlibat dalam pemecahannya. Dengan keterlibatan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, permasalahan benar-benar merupakan permasalahan yang dirasakan oleh mereka, bukan permasalahan dari sudut pandang 'orang luar' sehingga pemecahan masalah benar-benar atas dasar kebutuhan yang ada dan akan lebih tepat sasaran. Akan tetapi dalam menganalisa dan memilih alternatif pemecahan masalah tentu harus dibarengi dengan kesadaran kritis, bukan sekehendak hati,

oleh karena itu fungsi fasilitator masih diperlukan untuk memberikan pendampingan (bimbingan) karena saat ini masyarakat dianggap masih belum mandiri. Pemecahan masalah tersebut akan dituangkan dalam Perencanaan Jangka Menengah Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis) tingkat kelurahan/desa.

Tabel
Deskripsi Tehnik kajian Ekonomi

No	Uraian	Keterangan
1	Tujuan Kajian	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memfasilitasi masyarakat, laki-laki dan perempuan untuk belajar mengenali berbagai permasalahan ekonomi yang dialami oleh mereka serta faktor-faktor penyebabnya yang selama ini terjadi akan tetapi seringkali tidak disadari atau tidak dirasakan sebagai masalah bersama. ▪ Memfasilitasi terjadinya komunikasi yang setara di antara warga masyarakat, laki-laki dan perempuan sehingga terjadi proses berbagi pengetahuan, pengalaman, nilai-nilai di antara mereka. ▪ Memfasilitasi tumbuhnya kepedulian masyarakat, laki-laki dan perempuan terhadap permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh pihak lain terutama warga miskin.
2	Keluaran	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya daftar permasalahan ekonomi baik itu yang dihadapi oleh perempuan maupun laki-laki. ▪ Adanya daftar potensi untuk pemecahan permasalahan ekonomi, baik itu potensi yang ada di masyarakat, pemerintah maupun pihak luar. ▪ Adanya kepedulian dari warga masyarakat, laki-laki dan perempuan yaitu kemauan warga masyarakat untuk terlibat dalam upaya-upaya pemecahan masalah. ▪ Adanya peta sebaran warga, laki-laki dan perempuan, yang mengalami masalah ekonomi dan prasarana dasar yang mendukung di lingkungan warga. ▪ Adanya kesadaran warga masyarakat, laki-laki dan perempuan terhadap permasalahan ekonomi, faktor-faktor penyebab dan keterkaitan antar berbagai faktor sampai akar masalah ekonomi. (Pohon Permasalahan Ekonomi).
3	Jenis Informasi	<p>Dalam kajian ekonomi ada beberapa hal yang bisa dikaji melalui proses pemetaan swadaya yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji lembaga-lembaga ekonomi, baik lembaga pemerintah, swasta maupun lembaga masyarakat dan pemanfaatan pelayanan lembaga-lembaga tersebut oleh masyarakat, laki-laki dan perempuan, serta kualitas pelayanannya. 2. Mengkaji masalah ekonomi masyarakat, laki-laki dan perempuan, menyangkut kesenjangan antara pendapatan dan pengeluaran, mata pencaharian termasuk pengangguran, masalah-masalah yang dihadapi untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Mengkaji pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat, laki-laki dan perempuan terhadap permasalahan yang dihadapi dan pemecahannya. 4. Memetakan keluarga yang mempunyai masalah ekonomi dan aksesibilitas terhadap lembaga-lembaga perekonomian yang ada. 5. Mengkaji akses dan kontrol warga miskin dan perempuan terhadap aspek-aspek ekonomi . 6. Mengkaji hubungan sebab akibat terjadinya masalah ekonomi sampai ke akarnya, termasuk permasalahan yang berbeda yang dihadapi oleh laki-laki dan perempuan. 7. Mengkaji upaya-upaya yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah ekonomi, baik oleh laki-laki maupun perempuan. 8. Mengkaji potensi-potensi yang ada yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah .
4	Teknik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Bagan Arus Masukan dan Keluaran</i> Kajian Mata Pencaharian Bagan Kecenderungan dan Perubahan Teknik ini dipakai untuk mengkaji sistem. Sistem adalah kesatuan dari berbagai bagian yang saling berhubungan. Sistem tersebut digambarkan ke dalam bagan yang memperlihatkan bagian-bagian dalam sistem, yaitu masukan (input) dan keluaran (output) serta hubungan antara bagian-bagian dalam sistem itu. Dalam kajian lingkungan perekonomian, teknik ini digunakan untuk menganalisa pendapatan dan pengeluaran dalam keluarga, baik pendapatan suami maupun istri, anak laki-laki dan perempuan; masalah yang dihadapi dan akan dipakai bagi perencanaan pemecahan masalah. ▪ <i>Kajian Mata Pencaharian</i> Mata pencaharian atau "pekerjaan" merupakan kegiatan mendasar masyarakat untuk kelangsungan hidupnya. Baik itu untuk kelangsungan hidup sendiri maupun untuk kelangsungan pertukaran atau diperjualbelikan dengan orang lain. Dalam mengkaji permasalahan kemiskinan, tentu mata pencaharian merupakan bagian yang harus dikaji. Mata pencaharian mempengaruhi tingkat pendapatan seseorang dan juga dipengaruhi oleh pola-pola pengambilan keputusan dalam memilih atau pergantian mata pencaharian. Kemampuan memilih dan perubahan-perubahan tersebut bisa dipengaruhi oleh tata-nilai masyarakat, penambahan wawasan dan pengalaman serta usaha untuk memperbaiki keadaan. ▪ <i>Bagan Kecenderungan dan Perubahan</i> Bagan Kecenderungan dan Perubahan digunakan untuk menggambarkan perubahan-perubahan berbagai keadaan,

	<p>kejadian, serta kegiatan masyarakat, laki-laki dan perempuan dari waktu ke waktu dalam hal ini yang berhubungan dengan mata pencaharian (pekerjaan) warga masyarakat terutama masyarakat miskin, laki-laki dan perempuan. Dengan teknik ini bisa dikaji apakah ada perubahan-perubahan jenis mata pencaharian warga, laki-laki dan perempuan dari tahun ke tahun dalam kurun waktu tertentu, sebab-sebab dan akibat - akibatnya. Dengan mengetahui perubahan dalam kurun waktu tertentu kecenderungan di masa yang akan datang bisa diperkirakan dan menjadi acuan untuk mengantisipasi masalah-masalah di masa yang akan datang.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Diagram Perbandingan Mata Pencaharian Teknik ini dipakai untuk membandingkan jumlah warga masyarakat, laki-laki dan perempuan yang mempunyai jenis-jenis pekerjaan tertentu atau bahkan jumlah pengangguran di wilayah kajian. Perbandingan ini juga bisa dipakai untuk membandingkan jenis pekerjaan antara laki-laki dan perempuan serta jumlah perempuan dan laki-laki yang bekerja. Kajian ini bisa dituangkan dalam bentuk visual yaitu diagram batang. Di samping itu analisa perbandingan ini juga bisa dilihat dari beban kerja perempuan dan laki-laki sehari-hari yang dituangkan ke dalam diagram kue (pie). Dengan kajian ini bisa dianalisa pola umum kegiatan laki-laki dan perempuan dalam suatu keluarga atau kelompok, apakah masih ada waktu-waktu luang yang bisa dipakai untuk kegiatan produktif dan keseimbangan beban kerja antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah keluarga. ▪ Kalender Musim Jenis-jenis pekerjaan tertentu seringkali dipengaruhi oleh musim, misalnya petani yang menggarap sawah tadah hujan pendapatan pada musim kemarau dan musim hujan akan berbeda, begitu juga pedagang-pedangan dengan jenis dagangan tertentu. Untuk melihat pengaruh musim pada mata pencaharian masyarakat, laki-laki dan perempuan digunakan analisa kalender musim sehingga bisa dikaji bersama dampak-dampak yang ditimbulkan oleh musim pada mata pencaharian dan upaya-upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi. ▪ Diagram Kelembagaan (Diagram Venn) Teknik diagram kelembagaan digunakan untuk memfasilitasi kajian hubungan antara lembaga-lembaga perekonomian yang terdapat di lingkungan warga dengan masyarakat, laki-laki dan perempuan. Dengan memetakan lembaga-lembaga tersebut, masyarakat bisa merenungkan kembali peranan-peranan dari lembaga perekonomian tersebut, pola hubungan antara masyarakat, laki-laki dan perempuan dengan lembaga-lembaga
--	--

		<p>tersebut, manfaat keberadaan lembaga, akses dan kontrol masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, terhadap lembaga-lembaga tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemetaan Warga Miskin dan Sarana Perekonomian Pemetaan dipakai untuk mendapatkan gambaran warga miskin, laki-laki dan perempuan yang mempunyai persoalan ekonomi dan sarana perekonomian yang ada di wilayah kajian. Dengan pemetaan tersebut akan didapat gambaran rumah tangga miskin yang mana yang paling parah tingkat ekonominya dan aksesibilitas mereka terhadap lembaga perekonomian yang ada. Hasil kajian akan menjadi dasar perencanaan untuk perumusan program-program peningkatan ekonomi masyarakat miskin, laki-laki dan perempuan
5	Sumber Informasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sumber informasi utama adalah warga masyarakat, terutama warga miskin baik laki-laki maupun perempuan. ▪ Pengurus lembaga-lembaga perekonomian setempat, laki-laki dan perempuan ▪ Perangkat pemerintahan desa/kelurahan
6	Satuan Analisa	RW/Dusun
	Alat & Bahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kertas plano ▪ Kertas roti/kertas minyak ▪ Spidol warna-warni Karton berwarna (kertas warna) ▪ Lembar Balik Konsep dan Siklus PNPM Mandiri Perkotaan ▪ Hasil Refleksi Kemiskinan

Tabel
Langkah-langkah Teknik kajian Ekonomi

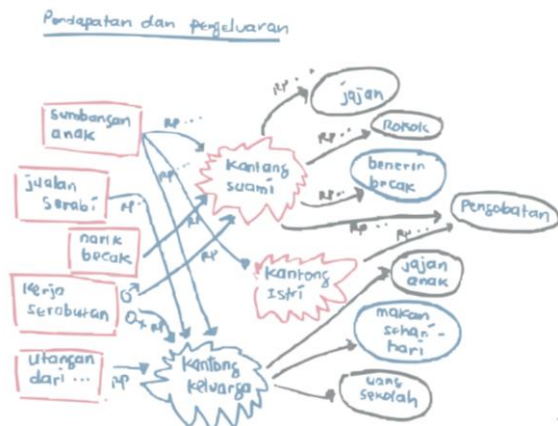
No	Jenis Kajian	Penjelasan
1.	Bagan Alir Pendapatan dan Pengeluaran Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berikan salam perkenalan kepada peserta, jelaskan maksud dan tujuan pertemuan. Sepakati bersama peserta, berapa lama waktu pertemuan akan berlangsung. Cek apakah terdapat perbezaan di antara kelompok perempuan dan laki-laki dalam menyepakati waktu pertemuan. ▪ Jelaskan kepada peserta bahwa kita sudah sampai pada kajian ekonomi. <ol style="list-style-type: none"> 1. Terangkan mengenai maksud dan tujuan kajian ekonomi dan 2. Mengapa masyarakat, laki-laki dan perempuan, harus terlibat dalam kegiatan ini. ▪ Ajaklah peserta untuk memulai kajian bidang ekonomi dengan menganalisa pola pola pendapatan dan pengeluaran keluarga secara umum. ▪ Tanyakan kepada peserta apa saja yang menjadi sumber pendapatan dalam rumah tangga?. ▪ Mintalah mereka menuliskan dalam kartu-kartu yang sudah disediakan (satu kartu untuk satu sumber pendapatan). ▪ Apabila peserta tidak terbiasa menulis, lebih baik fasilitator/relawan membantu untuk menuliskan pernyataan peserta. ▪ Beri mereka wawasan bahwa sumber pendapatan tersebut bisa dari suami, istri, anak perempuan maupun anak laki-laki dan sumber-sumber lainnya. ▪ Tempelkan kartu-kartu tadi pada kertas plano, papan tulis, atau lantai (sesuai dengan ketersediaan alat dan bahan di lokasi). ▪ Kemudian diskusikan sumber pendapatan keluarga tersebut dari siapa saja (bapak, anak, ibu atau sumber lain). Beri tanda. ▪ Tanyakan kembali kepada peserta, apa saja pengeluaran rutin dalam rumah tangga? Tuliskan dalam kartu-kartu yang sudah disediakan (satu kartu satu jenis pengeluaran). Beri wawasan kepada peserta untuk menuliskan pengeluaran rutin untuk keperluan suami saja, istri saja, anak atau untuk seluruh keluarga. ▪ Tanyakan kembali kepada peserta: <ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja pengeluaran yang tidak rutin dalam rumah tangga, misal untuk biaya sekolah, biaya pengobatan kalau sakit dan lainnya? 2. Tuliskan dalam kartu-kartu yang sudah disediakan (satu kartu satu jenis pengeluaran).

- Tempelkan kartu-kartu pengeluaran dalam kertas plano, papan tulis atau media lain (berdekatan dengan kartu pendapatan).
- Kemudian beri panah dari kartu pendapatan kepada kartu pengeluaran yang bisa menggambarkan aliran pengeluaran uang.


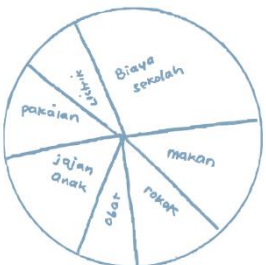
Catatan: Dalam menggali jenis pengeluaran, berikan pertanyaan untuk konsumsi makanan, biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya air bersih, sanitasi, biaya pemeliharaan rumah dan sebagainya.

- Ajak peserta untuk menganalisa:
 - a. Berapa jumlah pendapatan dan pengeluaran rata-rata?
 - b. Pendapatan: dari mana saja yang paling banyak jumlahnya?
 - c. Pengeluaran untuk apa saja yang laing banyak jumlahnya?
 - d. Apakah ada kesenjangan antara pendapatan dan pengeluaran?
 - e. Berapa rata-rata kesenjangan tersebut? (analisa berapa rata-rata pendapatan dan pengeluaran dalam kurun waktu tertentu, misal per minggu atau per bulan)
 - f. Mengapa terjadi kesenjangan antara pendapatan dan pengeluaran?
 - g. Apa akibat dari adanya kesenjangan pendapatan dan pengeluaran?
 - h. Apa upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk megatasinya?

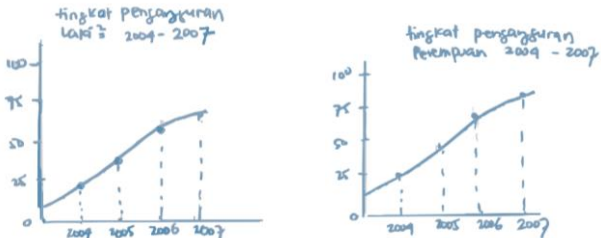

Contoh



2	Lingkaran (diagram kue)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ajaklah peserta untuk melihat perbandingan sumber pendapatan (polapola umumnya). ▪ Buatlah lingkaran (diagram kue) yang cukup besar. ▪ Kemudian jelaskan kepada peserta kalau keseluruhan lingkaran ini diibaratkan jumlah semua pendapatan, berapa bagian untuk setiap jenis pendapatan. ▪ Mintalah peserta untuk membagi lingkaran tersebut ke dalam bagian-bagian dari setiap jenis pendapatan berdasarkan perbandingan jumlah pendapatan yang sudah didiskusikan dalam "Bagan Alur". ▪ Beri judul lingkaran tersebut : Diagram pendapatan saat ini. ▪ Buatlah lingkaran pengeluaran, kemudian mintalah peserta untuk membagi lingkaran tersebut ke dalam bagian-bagian dari setiap jenis pengeluaran berdasarkan perbandingan jumlah pengeluaran yang sudah didiskusikan dalam "Bagan Alur". ▪ Jelaskan kepada peserta berhubungan dengan pendapatan tersebut, kita akan mencoba untuk mengkaji mata pencaharian dan masalah-masalah yang dihadapi. ▪ Tanyakan kepada peserta: <ol style="list-style-type: none"> 1. jenis-jenis mata pencaharian atau pekerjaan yang mereka miliki, terutama untuk warga miskin, laki-laki dan perempuan. 2. Mintalah mereka untuk menuliskannya dalam kartu-kartu, satu kartu untuk satu jenis pekerjaan. ▪ Bahaslah bersama peserta, mana pekerjaan-pekerjaan masyarakat yang paling utama (biasanya kriterianya adalah yang paling banyak menghasilkan atau paling banyak dilakukan). ▪ Kelompokkan berbagai tipologi pekerjaan tersebut, misal: usaha dagang, tukang becak, buruh dan sebagainya. Kemudian ajak mereka untuk membandingkan pekerjaan mana yang paling banyak dilakukan oleh warga miskin. Buatlah tabel untuk memudahkan. Identifikasi juga warga miskin yang tidak punya pekerjaan (menganggur), jumlah dihitung berdasarkan usia produktif (18-55 th) <p><i>Catatan</i> <i>Cermati setiap jenis pengeluaran apakah ada pengeluaran-pengeluaran yang sebenarnya tidak terlalu penting tapi seringkali menjadi bagian yang dianggap penting (misal : jajan anak-anak yang berlebihan dan lainnya). Apabila ada fenomena bahwa mereka cenderung boros, ajaklah peserta untuk merefleksikan kerugian-kerugian yang diderita akibat boros.</i></p>
---	-------------------------	---

		<p>Contoh:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p><u>Pendapatan</u></p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p><u>Pengeluaran</u></p>  </div> </div>
3	<p>Diagram batang</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Buatlah diagram batang untuk jenis-jenis mata pencaharian yang hanya dilakukan oleh laki-laki saja dan oleh perempuan saja. ▪ Dari kedua diagram tersebut, lakukan analisa bersama peserta apakah ada perbedaan antara mata pencaharian laki-laki dan perempuan: <ol style="list-style-type: none"> 1. mengapa ada perbedaan? 2. Tanyakan kepada peserta apakah setiap kelompok jenis pekerjaan di atas mempunyai masalah yang sama? 3. Ajaklah mereka berdiskusi untuk masing-masing kelompok pekerjaan. ▪ Bagilah peserta ke dalam kelompok berdasarkan jenis pekerjaan yang sama misalnya: <ol style="list-style-type: none"> 1. kelompok buruh, 2. kelompok tukang becak, 3. kelompok nelayan dan 4. kelompok lainnya ▪ Mintalah masing-masing kelompok untuk mendiskusikan hal-hal tersebut di bawah ini ke dalam bagan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek-aspek kajian yang perlu dibahas mengenai mata pencaharian (pekerjaan) misalnya: pemasaran, pencarian pelanggan, bagaimana memulai pekerjaan, dan sebagainya disesuaikan dengan karakteristik setiap kelompok mata pencaharian. 2. Bagaimana jumlah perbandingan jumlah (volume) pekerjaan perempuan dengan laki-laki untuk jenis mata pencaharian yang dilakukan bersama? 3. Apakah ada perbedaan upah untuk perempuan dan laki-laki untuk jenis pekerjaan yang sama? 4. Siapakah yang menentukan keputusan menentukan mata pencaharian keluarga (suami atau istri)?

		<p>5. Simbol-simbol topik bahasan yang akan dicantumkan ke dalam bagan.</p> <p>Contoh:</p>
4	Grafik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diskusikan lebih lanjut bagan yang sudah dibuat oleh setiap kelompok, terutama mengenai masalah-masalah yang dihadapi serta potensi-potensi untuk pengembangan. ▪ Diskusikan juga bagaimana caranya mengatasi pengangguran. ▪ Ajaklah peserta untuk mendiskusikan perubahan-perubahan yang terjadi sehubungan dengan mata pencaharian dalam kurun waktu tertentu. ▪ Mulailah dari tahun yang disepakati bersama. ▪ Dari bagan yang sudah dibuat cermati apakah ada perubahan-perubahan jenis mata pencaharian? Diskusikan mengapa hal tersebut terjadi?. ▪ Bahaslah secara khusus mengenai perubahan tingkat pengangguran warga masyarakat, laki-laki dan perempuan. ▪ Buatlah dalam bentuk grafik, agar lebih mudah dipahami tingkat perubahan yang terjadi. ▪ Selanjutnya, ajaklah peserta untuk mendiskusikan hasilnya: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengapa terjadi perubahan jumlah penganggur? 2. Manakah pengangguran yang paling banyak dari kelompok laki-laki atau perempuan? 3. Apa faktor penyebabnya? 4. Apabila masalah ini tidak diatasi kecenderungan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang? 5. Bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? 6. Apa potensi-potensi yang bisa dipakai untuk mengatasi masalah?

		<p>Contoh:</p> 
5	<p>Lingkaran Waktu (24Jam)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Informasikan kepada peserta bahwa kita akan mencoba menganalisa berapa banyak waktu yang dipakai untuk bekerja dalam satu hari, baik itu bagi perempuan maupun laki-laki. Bagilah peserta ke dalam dua kelompok yaitu kelompok laki-laki dan perempuan untuk mendiskusikan pola umum kegiatan laki-laki dan perempuan dalam waktu sehari. Mintalah masing-masing kelompok untuk membuat lingkaran yang cukup besar di dalam kertas plano, ibaratkan lingkaran tersebut adalah jumlah waktu dalam sehari (24 jam) bagilah lingkaran tersebut ke dalam 24 jam. <p>Contoh:</p> 

6	Kelender Musim	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ajaklah peserta untuk menganalisa kondisi-kondisi tersebut dengan membuat kelender musim, antara lain tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang hanya dilakukan pada musim-musim tertentu. ▪ Diskusikan bersama peserta: <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah kegiatan-kegiatan tersebut ada pengaruhnya terhadap pendapatan yang dihasilkan oleh mereka? 2. Apakah sudah ada upaya-upaya untuk memecahkan masalah? 3. Apabila ada, apa bentuknya? 4. Apa masalah-masalah yang dihadapi dalam melakukan upaya tersebut?
7	Diagram Venn	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lanjutkanlah kegiatan dengan mengkaji lembaga-lembaga perekonomian yang ada di masyarakat. ▪ Pakailah Kajian Kelembagaan (diagram venn) sebagai alat bantu diskusi. ▪ Tanyakan kepada peserta: <ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja lembaga perekonomian yang ada di lingkungan kita?, 2. Apakah ada lembaga perekonomian khusus yang melayani perempuan? 3. Tuliskan jawaban peserta dalam kertas plano. ▪ Ajaklah peserta untuk menentukan simbol-simbol dari lembaga perekonomian tersebut. ▪ Bila simbol yang digunakan adalah lingkaran, maka besar kecilnya lingkaran bisa dipakai untuk simbol besar kecilnya manfaat lembaga tersebut bagi masyarakat. ▪ Tulislah nama-nama lembaga perekonomian dengan pada simbol yang sudah dipilih. ▪ Buatlah lingkaran yang bertuliskan masyarakat, dan tempelkan lingkaran tersebut pada kertas plano atau media lainnya. ▪ Kemudian, mintalah peserta untuk menempelkan simbol-simbol yang lain, jauh-dekatnya simbol lembaga perekonomian dari lingkaran warga miskin menunjukkan tingkat interaksi lembaga tersebut dengan warga. ▪ Setelah selesai lanjutkan analisa kelembagaan dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja kegiatan lembaga-lembaga tersebut? 2. Siapa penerima manfaat dari lembaga-lembaga tersebut? ▪ Diskusikan bersama peserta: <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah kegiatan-kegiatan tersebut ada pengaruhnya terhadap pendapatan yang dihasilkan oleh mereka? 2. Apakah sudah ada upaya-upaya untuk memecahkan masalah?

		<p>3. Apabila ada, apa bentuknya? apa masalah-masalah yang dihadapi dalam melakukan upaya tersebut?</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lanjutkanlah kegiatan dengan mengkaji lembaga-lembaga perekonomian yang ada di masyarakat. Pakailah Kajian Kelembagaan (diagram venn) sebagai alat bantu diskusi. ▪ Tanyakan kepada peserta: <ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja lembaga perekonomian yang ada di lingkungan kita? 2. Apakah ada lembaga perekonomian khusus yang melayani perempuan? 3. Tuliskan jawaban peserta dalam kertas plano. ▪ Ajaklah peserta untuk menentukan simbol-simbol dari lembaga perekonomian tersebut. ▪ Bila simbol yang digunakan adalah lingkaran, maka besar kecilnya lingkaran bisa dipakai untuk simbol besar kecilnya manfaat lembaga tersebut bagi masyarakat. ▪ Tulislah nama-nama lembaga perekonomian dengan pada simbol yang sudah dipilih. ▪ Buatlah lingkaran yang bertuliskan masyarakat, dan tempelkan lingkaran tersebut pada kertas plano atau media lainnya. ▪ Kemudian, mintalah peserta untuk menempelkan simbol-simbol yang lain, jauh-dekatnya simbol lembaga perekonomian dari lingkaran warga miskin menunjukkan tingkat interaksi lembaga tersebut dengan warga. ▪ Setelah selesai lanjutkan analisa kelembagaan dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja kegiatan lembaga-lembaga tersebut? 2. Siapa penerima manfaat dari lembaga-lembaga tersebut? 3. Apakah warga miskin mempunyai akses terhadap lembaga perekonomian? 4. Lalu beri tanda Apakah perempuan mempunyai akses terhadap lembaga tersebut? 5. Lalu beri tanda Siapa yang memimpin dan mengambil keputusan untuk kegiatan pada lembaga tersebut? 6. Apakah ada warga miskin yang memimpin kegiatan pada lembaga tersebut? apabila ada 7. Apakah ada warga miskin yang terlibat dalam pengambilan keputusan dalam lembaga tersebut? <i>Lalu beri tanda apabila ada</i> 8. Apakah ada perempuan yang terlibat dalam pengambilan keputusan dalam lembaga tersebut? <i>Lalu beri tanda apabila ada</i> 9. Apa manfaat dari lembaga-lembaga tersebut, untuk laki-laki maupun perempuan?
--	--	---

		<p>10. Apa masalah-masalah yang dihadapi dalam berhubungan dengan lembaga-lembaga tersebut?</p> <p>11. Apakah ada masalah yang berbeda yang dihadapi oleh laki-laki dan perempuan?</p> <p>12. Bagaimana kualitas pelayanan lembaga-lembaga tersebut?</p>
8	Matriks	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informasikan kepada peserta bahwa kita akan melanjutkan kegiatan dengan memetakan: <ol style="list-style-type: none"> 1. siapa saja warga miskin, laki-laki dan perempuan, yang mengalami masalah-masalah ekonomi tadi dan 2. sumberdaya yang tersedia untuk memecahkan masalah tersebut. ▪ Ingatkan kembali kepada peserta pada peta sebaran warga miskin, laki-laki dan perempuan yang sudah dihasilkan pada pemetaan sebelumnya. ▪ Perlihatkan peta tersebut kepada peserta. ▪ Mintalah peserta untuk memindahkan peta tersebut ke dalam kertas yang lain (jiplaklah peta tersebut dengan memakai kertas roti atau kertas minyak supaya lebih mudah). ▪ Peta yang dipindahkan menyangkut rumah-rumah warga miskin, jalan, batas RT/RW/Dusun. ▪ Mintalah kepada peserta untuk memberikan tanda pada: <ol style="list-style-type: none"> 1. Rumah warga yang mempunyai anggota keluarga yang menganggur, laki-laki dan perempuan, dan 2. Rumah keluarga yang kepala keluarganya sudah tidak produktif ▪ Ingatkan kepada peserta mengenai lembaga-lembaga perekonomian yang sudah diidentifikasi dalam diagram venn. ▪ Ajaklah peserta untuk menentukan simbol-simbol dari lembaga perekonomian tersebut yang akan dipakai dalam peta. ▪ Tanyakan juga kepada peserta apakah ada pusatpusat kegiatan perekonomian di wilayah mereka. ▪ Tuliskan jika ada, dan sepakati simbol yang akan dipakai dalam peta. ▪ Mintalah kepada peserta untuk menempatkan letak lembaga dan pusatpusat perekonomian tersebut ke dalam peta. ▪ Berdasarkan pada peta hasil peserta, diskusikan mengenai: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebaran warga masyarakat, laki-laki dan perempuan yang mempunyai masalah-masalah ekonomi yang sangat parah 2. Berapa jauh Jarak antara warga miskin dengan lembaga perekonomian yang ada? Apakah jarak menjadi masalah?

		<p>3. Masalah-masalah lain yang dihadapi?</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ajaklah peserta untuk memetakan keseluruhan masalah ekonomi yang dihadapi berdasarkan pada hasil keseluruhan kajian yang sudah dilakukan. ▪ Bagilah peserta ke dalam 2 kelompok, yaitu kelompok perempuan dan kelompok laki-laki. Mintalah masing-masing kelompok untuk merumuskan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Masalah-masalah perekonomian yang terjadi. 2. Apakah ada masalah-masalah khusus yang dialami oleh perempuan? 3. Penyebab masalah 4. Kondisi ideal yang diharapkan 5. Upaya-upaya yang bisa dilakukan (gagasan awal) untuk mencapai kondisi ideal (memecahkan masalah) 6. Potensi dari diri sendiri yang bisa disumbangkan untuk memecahkan masalah, baik dari laki-laki maupun perempuan. 7. Potensi dari luar untuk memecahkan masalah. <p><i>Catatan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Gunakan matrik seperti contoh di samping ini untuk memudahkan. Identifikasi persoalan yang berbeda yang dialami perempuan dan laki-laki.</i> ✓ <i>Penting diingat: Dampingi masing-masing kelompok oleh satu orang pemandu proses (relawan/fasilitator)</i> <p><i>Contoh:</i></p> <table border="1" data-bbox="419 1023 993 1173"> <thead> <tr> <th colspan="2">Masalah (Kondisi saat ini)</th> <th colspan="2">Penyebab Masalah (kondisi saat ini)</th> <th colspan="2">Kondisi ideal (yang diharapkan)</th> <th colspan="2">Upaya-upaya yang bisa dilakukan (gagasan awal)</th> <th colspan="3">Potensi yang ada untuk memecahkan masalah</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>SDM</th> <th>Dana</th> <th>Alam</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Masalah (Kondisi saat ini)		Penyebab Masalah (kondisi saat ini)		Kondisi ideal (yang diharapkan)		Upaya-upaya yang bisa dilakukan (gagasan awal)		Potensi yang ada untuk memecahkan masalah			L	P	L	P	L	P	L	P	SDM	Dana	Alam																						
Masalah (Kondisi saat ini)		Penyebab Masalah (kondisi saat ini)		Kondisi ideal (yang diharapkan)		Upaya-upaya yang bisa dilakukan (gagasan awal)		Potensi yang ada untuk memecahkan masalah																																						
L	P	L	P	L	P	L	P	SDM	Dana	Alam																																				
9	Pohon Masalah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ajaklah peserta untuk kembali mengkaji semua masalah ekonomi yang terjadi dengan menggunakan pohon masalah. ▪ Tuliskan masalah-masalah yang sudah ditemukan dalam analisa sebelumnya, ▪ Kemudian, ajaklah mereka untuk membuat pohon masalah lingkungan (lihat panduan RK) sampai kepada akar penyebab terjadinya masalah-masalah tersebut. (penyebab masalah tingkat 1 sampai dengan tingkat 4). ▪ Perhatikan persoalan yang berbeda yang dihadapi kelompok perempuan dan laki-laki. 																																												

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apabila ada narasumber dari bidang-bidang yang berhubungan dengan perekonomian masyarakat, mintalah mereka untuk membahas permasalahan yang dihadapi oleh warga masyarakat dan upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk meminimalkan permasalahan tersebut. ▪ Jelaskan kepada peserta, bahwa hasil diskusi ini akan menjadi masukan dalam lokakarya tingkat kelurahan. Doronglah mereka untuk datang pada lokakarya PS di tingkat kelurahan. ▪ Mintalah pencatat proses untuk mencatat hasil diskusi, pindahkan petapeta, garfik dan bagan-bagan ke dalam kertas lain. ▪ Catatan ini digunakan sebagai dokumentasi Tim PS (masyarakat), akan dibahas dan menjadi masukan dalam lokakarya perencanaan.
--	--	---

Daftar Pustaka

Nes, M. (2008). Teknik-teknik Pemetaan Swadaya (PS) Kajian Ekonomi. In *SERI SIKLUS PNPM Mandiri Perkotaan* (4c ed.). Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya. Retrieved from <http://kotaku.pu.go.id>

LAMIRAN 4

Kajian Kelembagaan dan Kepemimpinan

*Sumber Seri Siklus PNPM-P2KP Panduan Teknik-teknik Pemetaan Swadaya
(Nes, 2008)*

Penyebab kemiskinan tingkat 2 dan 1, yang sudah didiskusikan melalui refleksi kemiskinan, memunculkan permasalahan kelembagaan dan kepemimpinan. Pada refleksi kemiskinan, lembaga-lembaga yang diharapkan adalah yang mampu menerapkan nilai-nilai luhur kemanusiaan dan kemasyarakatan, yang bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang adil bagi seluruh warga masyarakat termasuk masyarakat miskin.

Sadar atau tidak, selama ini dalam masyarakat banyak lembaga-lembaga lokal yang dibentuk oleh pihak lain, bukan atas kehendak warga. Walaupun di beberapa tempat terdapat lembaga tradisional yang tumbuh atas inisiatif warga, akan tetapi masyarakat yang terlibat lebih banyak kelompok elite-elite tertentu. Sayangnya lembaga-lembaga seperti ini karena tidak dibentuk oleh warga, dalam mengambil keputusan lebih berorientasi kepada kepentingan yang ikut membentuk bukan kepada kepentingan masyarakat banyak. Artinya masyarakat miskin dan marginal tidak pernah terlibat dalam proses pembentukan lembaga dan pengambilan keputusan.

Pertanyaannya: lembaga seperti apakah yang dapat efektif memberikan kontribusi untuk pengambilan keputusan dalam upaya penanggulangan kemiskinan? Berdasarkan kepada permasalahan kemiskinan yang dibahas dalam refleksi kemiskinan lembaga-lembaga yang diharapkan adalah yang mampu menerapkan nilai-nilai luhur kemanusiaan dan kemasyarakatan. Artinya keputusan yang diambil haruslah keputusan yang adil, dan pengambilan keputusannya dilandasi prinsip-prinsip partisipasi, demokrasi, transparan dan akuntabel.

Situasi sistem pembangunan seperti di atas yang terjadi saat ini menyebabkan pola-pola kepemimpinan yang hanya mementingkan sekelompok orang atau golongan tertentu yang memperkuat pola-pola kemasyarakatan yang terkotakkotak atas dasar penghasilan, suku, agama, politik dan sebagainya. Sadar atau tidak sadar hal ini menghasilkan keputusan-keputusan yang tidak dilandasi oleh nilai-nilai moral yang universal. Pemimpin hanya mendengarkan suara orang-orang tertentu yang mengangkat atau membayar mereka, sehingga keputusan-keputusannya berpihak kepada golongan tersebut dan seringkali mengorbankan rakyat kecil. Sistem semacam ini semakin lama semakin melunturkan nilai-nilai kemanusiaan, menyuburkan keserakahan dan ketidakpedulian dari sebagian orang-orang tertentu. Oleh karena itu diperlukan tauladan bagi masyarakat untuk kembali kepada fitrah manusia yang mengemban nilai-nilai luhur kemanusiaan. Untuk itu faktor pemimpin menjadi sangat penting artinya bagi upaya penanggulangan kemiskinan.

Perlu mengajak masyarakat dari berbagai kalangan untuk merefleksikan kelembagaan yang diharapkan oleh masyarakat yang mampu mengembangkan nilai-nilai keadilan bagi seluruh lapisan

masyarakat yang kemudian bisa menjadi motor penggerak penanggulangan kemiskinan. Refelksi ini menyangkut merenungkan lembaga-lembaga yang sekarang termasuk juga kelompok swadaya masyarakat, bagaimana akses dan kontrol warga masyarakat terhadap lembaga-lembaga tersebut baik itu kaum miskin, laki-laki maupun perempuan.

Berkaitan dengan kepentingan di atas PNPM Mandiri Perkotaan, memfasilitasi masyarakat untuk mendiskusikan hal tersebut di atas dalam kegiatan refleksi kelembagaan, kelompok swdaya masyarakat, nilai-nilai kemasyarakatan dan refleksi kepemimpinan.

Tabel
Diskripsi Kajian Kelembagaan dan Kepemimpinan

No	Uraian	Keterangan
1	Tujuan Kajian	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memfasilitasi masyarakat untuk belajar mengenali berbagai permasalahan kelembagaan, akses dan kontrol masyarakat terhadap lembaga penanggulangan kemiskinan, kelompok-kelompok kemasyarakatan, nilai-nilai kebersamaan dan kualitas kepemimpinan yang diharapkan. ▪ Memfasilitasi terjadinya komunikasi yang setara di antara warga masyarakat, sehingga terjadi proses berbagi pengetahuan, pengalaman, nilai-nilai di antara mereka. ▪ Memfasilitasi tumbuhnya kepedulian masyarakat terhadap permasalahan kelembagaan dan kepemimpinan yang memungkinkan teratasinya permasalahan kemiskinan.
2	Keluaran	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kesepakatan pada tingkat basis untuk menentukan lembaga yang diharapkan untuk menanggulangi kemiskinan, apakah itu memakai lembaga yang sudah ada atau membentuk lembaga baru. ▪ Kriteria kepemimpinan yang diharapkan oleh masyarakat sebagai pemimpin lembaga tersebut dan kesepakatan sistem pemilihannya. ▪ Daftar kelompok-kelompok swadaya masyarakat (kelompok kemasyarakatan), serta bagaimana akses dan kontrol masyarakat miskin baik laki-laki dan perempuan terhadap lembaga tersebut. ▪ Daftar permasalahan-permasalahan yang selama ini dihadapi dan potensipotensi yang bisa digunakan dalam pemecahan masalah.
3	Jenis Informasi	<p>Dalam kajian kelembagaan dan kepemimpinan ada beberapa hal yang bisa dikaji melalui proses pemetaan swadaya yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji lembaga-lembaga pembangunan, baik lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, swasta maupun lembaga masyarakat, proses pembentukan dan pola-pola pengambilan keputusannya 2. Mengkaji kelompok swadaya masyarakat yang ada di wilayah setempat, sejarah pembentukannya, akses dan kontrol warga miskin, laki-laki dan perempuan dalam lembaga (kelompok) tersebut. 3. Mengkaji nilai-nilai kemasyarakatan yang dianut oleh warga dan perubahan-perubahannya. 4. Mengkaji nilai-nilai dan kriteria kepemimpinan.
4	Teknik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diagram Kelembagaan (Diagram Venn) Teknik diagram kelembagaan digunakan untuk memfasilitasi kajian hubungan antara lembaga-lembaga pembangunan yang terdapat di lingkungan warga masyarakat. Dengan memetakan lembaga-lembaga tersebut, masyarakat bisa merenungkan

		<p>kembali peranan-peranan dari lembaga tersebut, pola-pola kepemimpinan lembaga, sejarah pembentukannya, pola hubungan antara masyarakat dengan lembaga-lembaga tersebut, manfaat keberadaan lembaga, akses dan kontrol masyarakat termasuk masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan terhadap lembaga-lembaga tersebut. Teknik ini juga dipakai untuk memetakan kelompok-kelompok swadaya masyarakat yang ada, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing kelompok dan keterlibatan warga miskin dalam kegiatan tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kajian Sejarah Teknik penelusuran sejarah adalah teknik yang dipergunakan untuk mengungkapkan kembali sejarah masyarakat di suatu lokasi tertentu berdasarkan kepada penuturan masyarakat sendiri. Peristiwa-peristiwa dalam sejarah wilayah tersebut disusun secara berurutan menurut waktu kejadiannya (secara kronologis), dimulai dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam waktu selampau mungkin yang masih dapat diingat, sampai dengan peristiwa-peristiwa saat ini. Teknik ini akan dipakai untuk melihat perkembangan nilai-nilai, modal sosial, serta keterlibatan masyarakat dalam kelompok-kelompok sosial yang ada di masyarakat. ▪ Kajian Kepemimpinan Kajian kepemimpinan dilakukan dengan teknik FGD, dimana akan digali pendapat, persepsi dan pola pikir masyarakat terhadap kepemimpinan dan kualitas pemimpin yang diharapkan. Hasil FGD akan dibahas dalam lokakarya PS tingkat kelurahan untuk mencapai kesepakatan mengenai kriteria pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat dan cara-cara mendapatkan pemimpin yang mempunyai kriteria tersebut
5	Sumber Informasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sumber informasi utama adalah warga masyarakat, terutama warga miskin baik laki-laki maupun perempuan. ▪ Perangkat pemerintahan desa/kelurahan
6	Satuan Analisa	RW/Dusun
7	Alat & Bahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kertas plano Spidol warna-warni ▪ Karton berwarna (kertas warna) ▪ Lembar Balik Konsep dan ▪ Siklus PNPM-Mandiri Perkotaan ▪ Hasil Refleksi Kemiskinan

Tabel
Langkah-langkah Teknik Kajian Kelembagaan dan Kepemimpinan

No	Jenis Kajian	Penjelasan
1.	Diagram Venn	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berikan salam perkenalan kepada peserta, jelaskan maksud dan tujuan pertemuan. ▪ Sepakati bersama peserta, berapa lama waktu pertemuan akan berlangsung. ▪ Buatlah suasana lebih santai dan informal dengan terlebih dahulu menanyakan kabar kepada peserta. ▪ Mulai dengan obrolan mengenai kehidupan sehari-hari mereka, agar peserta menjadi akrab dan tidak ada jarak dengan fasilitator/relawan, sehingga mereka menjadi lebih berani di dalam mengemukakan pendapatnya. ▪ Informasikan bahwa refleksi kelembagaan dan kepemimpinan ini merupakan lanjutan dari refleksi kemiskinan dan kajian-kajian yang sudah dilakukan dalam pemetaan swadaya. ▪ Perlihatkan kembali hasil analisa pohon persoalan kemiskinan, pohon persoalan kesehatan, pendidikan dan lainnya. ▪ Beri penekanan bahwa dari hasil diskusi tersebut selalu ada permasalahan kelembagaan dan kepemimpinan yang bersumber dari ketidakberdayaan seseorang untuk menjalankan fitrahnya sebagai manusia. ▪ Jelaskan bahwa kita akan memulai kegiatan ini dengan merefleksikan kelembagaan yang ada di wilayah kita. ▪ Ajak masyarakat untuk mendiskusikan jenis-jenis lembaga yang ada di wilayahnya. ▪ Mintalah peserta untuk menuliskan semuanya di dalam kertas besar (plano) yang ditempel di dinding. ▪ Bisa juga dengan menuliskan setiap jenis lembaga ke dalam kartu-kartu. ▪ Apabila ada peserta yang buta huruf, maka lembaga-lembaga tersebut bisa dituliskan ke dalam simbo-simbol yang dikenal dan mudah dipahami. ▪ Mintalah peserta untuk menyepakati lembaga mana yang paling bermanfaat bagi masyarakat. ▪ Sepakati simbolnya (misal dengan besar kecilnya lingkaran) tuliskan nama lembaga tersebut dalam lingkaran sesuai dengan manfaatnya. ▪ Buat lingkaran dan tulis "masyarakat" dalam kertas plano, kemudian mintalah peserta untuk menempelkan lingkaran-lingkaran yang sudah diisi nama lembaga. ▪ Jauh dekatnya lingkaran dari masyarakat menunjukkan jauh dekatnya hubungan masyarakat dengan lembaga tersebut. ▪ Setelah selesai lanjutkan analisa kelembagaan dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah warga miskin mempunyai akses terhadap lembaga-lembaga tersebut? 2. Beri tanda Apakah perempuan mempunyai akses terhadap lembaga-lembaga tersebut? <i>Beri tanda apabila ada.</i> 3. Siapa yang memimpin dan mengambil keputusan untuk kegiatan pada lembaga tersebut? 4. Apakah ada warga miskin yang memimpin kegiatan pada lembaga tersebut? <i>Beri tanda apabila ada.</i> 5. Apakah ada warga miskin yang terlibat dalam pengambilan keputusan dalam lembaga tersebut? <i>Beri tanda apabila ada.</i> 6. Apakah ada perempuan yang terlibat dalam pengambilan keputusan dalam lembaga tersebut? <i>Beri tanda apabila ada.</i> 7. Bagaimana proses pembentukannya? 8. Bagaimana proses pemilihannya pemimpinnya? 9. Keputusan (aturan) apa yang dikeluarkan dan apa pengaruh keputusan itu bagi kehidupan masyarakat termasuk untuk masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan. 10. Bagaimana proses pengambilan keputusan yang dilakukan? 11. Apa manfaat dari lembaga-lembaga tersebut? 12. Apa masalah-masalah yang dihadapi dalam berhubungan dengan lembaga-lembaga tersebut? 13. Bagaimana kualitas pelayanan lembaga-lembaga tersebut? 14. Tanyakan kepada peserta lembaga seperti apakah yang mereka butuhkan untuk menanggulangi kemiskinan? 15. Dari lembaga – lembaga yang sudah dikaji tadi apakah ada yang memenuhi prinsip – prinsip lembaga yang diharapkan masyarakat, terutama masyarakat miskin?
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ajaklah peserta untuk melanjutkan kegiatan dengan mengkaji kelompok-kelompok swadaya masyarakat yang selama ini ada . (arisan, kelompok tani, kelompok pengguna air, kelompok wanita dsb) ▪ Tanyakan kepada mereka kelompok swadaya apa saja yang ada di wilayah mereka. ▪ Tuliskan jawaban peserta dalam kertas plano. ▪ Sepakati bersama peserta untuk membuat simbol besar kecilnya manfaat dari kelompok-kelompok tersebut. ▪ Kemudian, nama-nama kelompok tersebut dalam kartu terpisah. ▪ Buatlah lingkaran masyarakat dalam kertas plano,

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemudian mintalah mereka menempatkan kartu-kartu yang sudah berisi nama-nama kelompok swadaya tadi dalam kertas plano yang sama. <i>“Jauh dekatnya kartu dari masyarakat menunjukkan hubungan kelompok tersebut dengan masyarakat”.</i> ▪ Diskusikan bersama tentang: <ol style="list-style-type: none"> 1. Apa tujuan kelompok tersebut? 2. Kegiatan atau program yang telah dikembangkan oleh masing-masing kelompok? 3. Apakah warga miskin mempunyai akses (menjadi anggota) terhadap kelompok sosial tersebut? <i>Beri tanda</i> 4. Apakah perempuan mempunyai akses (menjadi anggota) terhadap kelompok sosial tersebut? <i>Beri tanda</i> 5. Bagaimana hubungan antar anggota? 6. Bagaimana aturan untuk menjadi anggota? 7. Siapa yang memimpin dan mengambil keputusan untuk kegiatan pada kelompok tersebut? 8. Apakah ada warga miskin yang memimpin kegiatan kelompok? <i>Beri tanda apabila ada</i> 9. Apakah ada warga miskin yang terlibat dalam pengambilan keputusan dalam kelompok tersebut? <i>Beri tanda apabila ada.</i> 10. Apakah ada perempuan yang terlibat dalam pengambilan keputusan dalam lembaga tersebut? 11. <i>Beri tanda apabila ada</i> Apa manfaat kelompok tersebut bagi masyarakat secara umum dan masyarakat miskin? 12. Apa manfaat kelompok tersebut bagi laki-laki? 13. Apa manfaat kelompok tersebut bagi perempuan? 14. Apa masalah-masalah yang dihadapi?
	<p>Menggambar Simbol Kepemimpinan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bagilah peserta ke dalam beberapa kelompok, kemudian mintalah setiap kelompok untuk membuat gambar bersama atau simbol-simbol yang dapat mencitrakan atau memberikan ilustrasi apa dan bagaimana seorang pemimpin masyarakat yang berkualitas Diskusikan hasil gambar tersebut. ▪ Beri penekanan apakah sifat-sifat pemimpin berkualitas seperti yang digambarkan oleh mereka tersebut dipunyai oleh laki-laki saja, oleh perempuan saja atau oleh kedua-duanya. <p><i>Catatan: Penting diperhatikan apabila jawaban peserta bahwa karakter pemimpin yang berkualitas tersebut dipunyai baik laki-laki maupun perempuan, ajak mereka berdiskusi bahwa kedua-duanya bisa menjadi pemimpin.</i></p>

Pertanyaan kritis dalam merefleksikan kepemimpinan

- Lanjutkan diskusi dengan menggunakan pertanyaan kritis seperti yang terdapat di halaman berikut.

NO	Profil Warga	Pilih/tidak	Alasan
7	Seorang ibu rumah tangga miskin, dapat baca tulis, rendah hati, jujur dan dapat dipercaya, serta pekerja keras dan terkenal arif		
8	Seorang pedagang besar, warga keturunan, namun bersedia aktif dan sukarela menjadi pengurus koperasi warga setempat		
10	Tokoh masyarakat yang banyak pengalaman pengelolaan program/proyek kemiskinan dan suka KKN		
11	Seorang pemuda idola yang terkenal pintar dan suka membual		
12	Seorang tokoh yang kurang aktif dan kurang pengalaman dalam kegiatan kelurahan, namun sangat ikhlas, rendah hati dan dipecaya warga		
13	Seorang tokoh masyarakat yang sangat vokal dan sangat berambisi menjadi pengurus atau pengelola proyek bantuan dari pemerintah		
14	Seorang kaya yang sangat berpengaruh terkenal dermawan dan kurang jujur		

NO	Profil Warga	Pilih/tidak	Alasan
15	Seorang pengurus partai politik besar yang tinggal di kelurahan anda, dan kali ini mau hadir dalam pertemuan, supaya bisa dipilih sebagai pengurus/anggota BKM		
16	Seorang warga yang dianggap oposan oleh pemerintah, namun dikenal bersih dan aktif bergaul dengan masyarakat miskin		
17	Seorang yang pandai dan dermawan dia berjanji akan mengutamakan kepentingan pemilihnya		
18	Seorang tokoh masyarakat yang pemalu, rendah hati, namun terkenal dermawan dan jujur		
19	Seorang dengan cacat tubuh dan terkenal bijaksana serta adil		
20	Anda sendiri bagaimana bial dibandingkan dengan 19 orang yang lain ?		

Daftar Pustaka

- Nes, M. (2008). Kajian Kelembagaan dan Kepemimpinan. In *SERI SIKLUS PNPM Mandiri Perkotaan* (4f ed.). Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya. Retrieved from <http://kotaku.pu.go.id>

LAMIRAN 5

Kajian Pendidikan

*Sumber Seri Siklus PNPM-P2KP Panduan Teknik-teknik Pemetaan Swadaya
(Nes, 2008)*

Permasalahan kemiskinan, berkaitan erat dengan permasalahan pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan menunjukkan kualitas sumberdaya manusia yang rendah.

Banyak kasus kelompok masyarakat yang pendidikannya rendah menjadi sasaran penipuan dari kelompok lain yang mempunyai pendidikan lebih tinggi, contoh kasus kelompok pertama diminta untuk menandatangani dokumen jual beli tanah, padahal mereka tidak tahu isi perjanjian yang sebenarnya. Di sisi lain rendahnya tingkat pendidikan masyarakat menyebabkan mereka sulit untuk mengakses pekerjaan yang mensyaratkan pengetahuan dan keahlian tertentu.

Dalam refleksi kemiskinan, pada umumnya di berbagai wilayah selalu muncul permasalahan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang mereka anggap menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan tingkat 4. Kondisi ini lebih parah terjadi pada lokasi-lokasi di daerah pedalaman dan wilayah-wilayah tertentu yang masih jauh tertinggal dalam proses pembangunan. Di sisi lain kesempatan untuk memperoleh pendidikan juga seringkali tidak sama antara

perempuan dan laki-laki. Pada umumnya perempuan masih ketinggalan dalam pendidikan, karena peluang yang ada seringkali lebih diberikan kepada anak laki-laki untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Walaupun begitu setiap wilayah tentu mempunyai permasalahan yang khas sesuai dengan kondisi masing-masing, oleh karena itu perlu kajian yang lebih mendalam di setiap kelurahan/desa mengenai isu-isu pendidikan masyarakat.

Indeks pendidikan yang dicerminkan dari angka harapan hidup menjadi salah satu acuan perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menjadi ukuran kesejahteraan. Di sisi lain, target peningkatan pendidikan dasar baik untuk kaum laki-laki maupun perempuan menjadi target nasional yang sejalan dengan kesepakatan Millienium (MDGs) di seluruh dunia, dimana Indonesia menjadi negara yang mendukung kesepakatan tersebut. Target peningkatan IPM dan MDG ini tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional dan RPJM Daerah (kota/kabupaten). Artinya target-target peningkatan kualitas pendidikan masyarakat menjadi sejalan antara di tingkat kelurahan/desa, tingkat kabupaten/kota dan nasional.

Perlu kajian lebih jauh mengenai berbagai permasalahan pendidikan yang dihadapi berbagai kalangan masyarakat, baik kelompok miskin, perempuan dan laki-laki sehingga masyarakat menyadari permasalahannya, bisa mencari jalan keluar yang tepat, dan terlibat dalam pemecahannya. Dengan keterlibatan masyarakat, permasalahan benar-benar merupakan permasalahan yang dirasakan oleh mereka, bukan permasalahan dari sudut pandang 'orang luar' sehingga pemecahan masalah benar-benar atas dasar kebutuhan yang ada dan akan lebih tepat sasaran. Akan tetapi dalam menganalisa dan

memilih alternatif pemecahan masalah tentu harus dibarengi dengan kesadaran kritis, bukan sekehendak hati, oleh karena itu fungsi fasilitator masih diperlukan untuk memberikan pendampingan (bimbingan) karena saat ini masyarakat dianggap masih belum mandiri. Pemecahan masalah tersebut akan dituangkan dalam Perencanaan Jangka Menengah Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis) tingkat kelurahan/desa.

Tabel
Deskripsi Kajian Pendidikan

No	Uraian	Keterangan
1	Tujuan Kajian	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memfasilitasi masyarakat untuk belajar mengenali berbagai permasalahan pendidikan yang dialami oleh mereka, baik perempuan maupun laki-laki, serta faktor-faktor penyebabnya yang selama ini terjadi akan tetapi seringkali tidak disadari atau tidak dirasakan sebagai masalah bersama. ▪ Memfasilitasi terjadinya komunikasi yang setara di antara warga masyarakat, sehingga terjadi proses berbagi pengetahuan, pengalaman, nilai-nilai di antara mereka. ▪ Memfasilitasi tumbuhnya kepedulian masyarakat terhadap permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh pihak lain terutama warga miskin
2	Keluaran	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Daftar permasalahan pendidikan baik itu permasalahan yang dihadapi perempuan maupun laki-laki. ▪ Daftar potensi untuk pemecahan permasalahan pendidikan , baik itu potensi yang ada di masyarakat, pemerintah maupun pihak luar. ▪ Kepedulian dari warga masyarakat yaitu kemauan warga masyarakat untuk terlibat dalam upaya-upaya pemecahan masalah. ▪ Peta sebaran warga, perempuan dan laki laki, yang mengalami masalah pendidikan dan fasilitas pelayanan pendidikan di lingkungan warga. ▪ Kesadaran warga masyarakat terhadap permasalahan pendidikan, faktorfaktor penyebab dan keterkaitan antar berbagai faktor sampai akar masalah pendidikan, di samping aspek gender dari permasalahan tersebut (Pohon permasalahan pendidikan).
3	Teknik	<p>Dalam kajian kesehatan ada beberapa hal yang bisa dikaji melalui proses pemetaan swadaya yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji lembaga-lembaga pelayanan pendidikan baik lembaga pendidikan formal maupun informal dan kualitas pelayanannya. 2. Mengkaji akses dan kontrol masyarakat miskin, laki-laki dan perempuan terhadap pelayanan pendidikan dasar (9 tahun) 3. Mengkaji tingkat melek huruf masyarakat miskin, perempuan dan laki-laki, dan akses terhadap pendidikan informal (pendidikan alternatif). 4. Mengkaji pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, baik pendidikan dasar maupun lanjutan untuk laki-laki dan perempuan. 5. Memetakan keluarga yang mempunyai masalah pendidikan dan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan.

		<p>6. Mengkaji hubungan sebab akibat terjadinya masalah pendidikan, termasuk yang dihadapi secara berbeda oleh perempuan dan laki-laki, sampai ke akarnya.</p> <p>7. Mengkaji upaya-upaya yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah pendidikan, termasuk aspek gendernya</p> <p>8. 8. Mengkaji potensi-potensi yang ada yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah.</p>
4	Teknik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bagan Kecenderungan dan Perubahan Salah satu teknik analisa yang bisa diterapkan untuk mengkaji tingkat pendidikan masyarakat adalah adalah Bagan Kecenderungan dan Perubahan. Teknik ini digunakan untuk menggambarkan perubahan-perubahan keadaan pendidikan masyarakat dari waktu-ke waktu, sehingga bisa dianalisa peningkatan atau penurunan jumlah warga, terpilah berdaar jenis kelamin, yang bisa mengenyam pendidikan, alasan-alasannya dan upaya-upaya yang harus dilakukan apabila ada permasalahan. ▪ Diagram Batang Teknik ini dipakai untuk membandingkan tingkat dan jumlah pendidikan kaum perempuan dan laki-laki untuk dianalisa apabila ada perbedaan-perbedaan yang terjadi, mencari penyebab perbedaan, dan mencari gagasan untuk pemecahan masalahnya. ▪ Diagram Kelembagaan (Diagram Venn) Teknik diagram kelembagaan digunakan untuk memfasilitasi kajian hubungan antara lembaga-lembaga pelayanan pendidikan yang terdapat di lingkungan warga masyarakat. Dengan memetakan lembaga-lembaga tersebut , masyarakat bisa menganalisis peranan-peranan dari lembaga pendidikan tersebut, pola hubungan antara masyarakat dengan lembaga-lembaga tersebut, manfaat keberadaan lembaga, akses, partisipasi dan kontrol masyarakat (miskin, laki-laki dan perempuan) terhadap pelayanan lembagalembaga tersebut serta manfaat yang diperoleh masing-masing kelompok atas pelayanan lembaga pendidikan tersebut. ▪ Pemetaan Permasalahan dan Sarana Pelayanan Pendidikan Pemetaan dipakai untuk mendapatkan gambaran warga miskin, perempuan dan laki-laki, yang mempunyai persoalan pendidikan baik itu yang tidak dapat sekolah sama sekali, putus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu. Dengan pemetaan tersebut akan didapat gambaran rumah tangga miskin yang mana yang mempunyai masalah pendidikan, kelompok perempuan dan

		kelompok laki-laki yang mempunyai persoalan, serta aksesibilitas masyarakat, perempuan dan laki-laki, terhadap pelayanan pendidikan baik formal maupun non formal. Kecenderungan pelayanan pendidikan tertentu pada kelompok tertentu atau pada jenis kelamin tertentu perlu diperhatikan dalam proses ini.
5	Sumber Informasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sumber informasi utama adalah warga masyarakat, terutama warga miskin baik laki-laki maupun perempuan. ▪ Praktisi pendidikan seperti guru, kepala sekolah, pegawai dinas pendidikan, Dewan Pendidikan, dan lainnya yang ada di lingkungan warga setempat. ▪ Komite sekolah (bila terdapat), orang tua murid, tokoh masyarakat, wakil organisasi masyarakat setempat, dan murid, perempuan dan laki-laki. ▪ Perangkat pemerintahan desa/kelurahan. ▪ Berikan salam perkenalan kepada peserta, jelaskan maksud dan tujuan pertemuan. Sepakati bersama peserta, berapa lama waktu pertemuan akan berlangsung. Cek apakah terdapat perbedaan di antara kelompok perempuan dan laki-laki dalam menyepakati waktu pertemuan.
6	Alat & Bahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kertas plano ▪ Kertas roti/kertas minyak ▪ Spidol warna-warni ▪ Karton berwarna (kertas warna) ▪ Lembar Balik Konsep dan Siklus PNPM Mandiri Perkotaan ▪ Hasil Refleksi Kemiskinan

Tabel
Langkah-langkah Tehnik Kajian Kelembagaan dan
Kepemimpinan

No	Jenis Kajian	Penjelasan
	Pemetaan dan Matriks	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Buatlah suasana lebih santai dan informal dengan terlebih menanyakan kabar kepada peserta, ▪ mulai dengan obrolan mengenai kehidupan sehari-hari mereka, baik itu berkenaan dengan kehidupan kelompok perempuan maupun laki-laki, agar peserta menjadi akrab dan tidak ada jarak dengan fasilitator/relawan, sehingga mereka menjadi lebih berani di dalam mengemukakan pendapatnya. ▪ Terangkan mengenai maksud dan tujuan pemetaan ini dan mengapa masyarakat harus terlibat dalam kegiatan ini. ▪ Ingatkan kembali kepada penyebab kemiskinan yang sudah dibahas dalam refleksi kemiskinan. ▪ Ingatkan pula persoalan kemiskinan dan pendidikan yang berbeda yang dihadapi perempuan dan yang dihadapi laki-laki. ▪ Informasikan bahwa kajian pendidikan ini merupakan lanjutan dari kajian pemetaan sebelumnya yaitu kajian lingkungan. ▪ Jelaskan bahwa masalah pendidikan merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab kemiskinan. ▪ Jelaskan kepada peserta dalam pertemuan ini kita akan membahas dan menganalisis masalah pendidikan masyarakat, terutama mendapatkan gambaran keseluruhan mengenai: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat pendidikan masyarakat: <ol style="list-style-type: none"> a. baik perempuan maupun laki-laki, b. Tingkat pendidikan masyarakat miskin di lingkungan mereka: <ul style="list-style-type: none"> - tidak pernah bersekolah, - putus sekolah dasar, - SD, - SMP, - Kursus-kursus, - tidak sekolah , - putus sekolah , - dsb... c. Kualitas pelayanan lembaga-lembaga Pendidikan d. Kondisi bangunan, jumlah guru, sarana dan prasarana sekolah), dan e. Biaya Pendidikan f. Jarak tempat Pendidikan (jarak sekolah)

		<p>g. potensi-potensi yang ada di masyarakat untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan yang terjadi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tanyakan apakah hal tersebut berbeda antara yang dialami kelompok perempuan dan yang dialami kelompok laki-laki. ▪ Tuliskan setiap jenis pendidikan dan juga apa yang dihadapi perempuan dan laki-laki dalam kertas plano. ▪ Ajaklah peserta untuk memetakan kondisi pendidikan pada setiap keluarga dan jenis kelamin dan dituangkan ke dalam peta. ▪ Ingatkan kembali kepada peserta pada peta sebaran warga miskin yang sudah dihasilkan pada pemetaan sebelumnya. ▪ Perlihatkan peta tersebut kepada peserta. ▪ Mintalah peserta untuk memindahkan peta tersebut ke dalam kertas yang lain (lebih baik memakai kertas roti atau kertas minyak supaya bisa dijiplak). ▪ Peta yang dipindahkan menyangkut rumah-rumah warga miskin, jalan, batas RT/RW/Dusun. ▪ Mintalah kepada peserta untuk memberikan tanda pada rumah-rumah warga miskin: <ol style="list-style-type: none"> a. Beri rumah warga yang mempunyai anak usia sekolah, b. Beri tanda khusus rumah warga yang mempunyai anak usia sekolah tetapi belum sekolah, c. Beri tanda khusus untuk anak perempuan dan anak laki-laki Rumah warga yang mempunyai anggota keluarga yang putus sekolah , d. Beri tanda khusus yang berbeda untuk anak perempuan dan laki-laki Rumah warga yang mempunyai anggota keluarga yang tidak pernah bersekolah. e. Beri tanda khusus yang berbeda untuk anak perempuan dan laki-laki. ▪ Tanyakan kepada peserta, apakah ada lembaga pendidikan di lingkungan mereka? (SD, SMP, madrasah, kejar paket A, B, kursus atau lembaga pendidikan lainnya). ▪ Tuliskan apabila ada dalam kertas plano kemudian sepakati simbolnya. ▪ Mintalah peserta untuk meletakkan lembaga-lembaga tersebut ke dalam peta. ▪ Ajaklah peserta untuk mengkaji berapa jumlah warga miskin untuk setiap jenjang pendidikan, baik itu laki-laki maupun perempuan. ▪ Lakukan kajian khusus untuk angka partisipasi sekolah untuk anak-anak yang harus mendapatkan pendidikan dasar 9 tahun (wajib belajar).
--	--	--

Contoh:

a. Peta tematik bidang pendidikan



b. Matriks pendukung peta

Tingkat Pendidikan	Laki-Laki (miskin)	Perempuan (miskin)	Jumlah	Jumlah Penduduk miskin
Tidak Pernah sekolah				
Putus Sekolah Dasar				
Lulus SD				
Putus SLTP				
Lulus SLTP				
Putus SLTA				
Lulus SLTA				
Lulus Perguruan Tinggi				

Jumlah angka partisipasi sekolah	L	P	Jumlah anak usia sekolah 9 tahun (7-15 th)
SD			
SLTP			

Diagram batang

- Berdasarkan pada tabel data, ajaklah mereka untuk menerjemahkan secara visual ke dalam diagram batang:
 - Perbandingan antara berbagai tingkat pendidikan penduduk yang miskin dengan jumlah keseluruhan penduduk miskin.
 - Perbandingan antara tingkat pendidikan masyarakat miskin, laki-laki dan perempuan.
 - Perbandingan jumlah angka partisipasi sekolah (wajib belajar 9 tahun) dengan jumlah anak usia sekolah 9 tahun, baik laki-laki maupun perempuan.

Catatan

Dengan diagram batang, masyarakat bisa lebih mudah untuk membandingkan tingkat pendidikan masyarakat, laki-laki dan perempuan, agar lebih jelas bedakan warna diagram batang untuk menggambarkan perempuan dan laki-laki.

		<p><i>Dalam memfasilitasi prosesnya, biarkan masyarakat berdiskusi, peranan fasilitator/relawan hanya mendampingi proses dan menajamkan analisa dengan memberikan pertanyaan kritis. Catatlah semua diskusi yang terjadi.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Setelah selesai membuat bagan analisa bersama peserta diskusikan beberapa hal berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Bagaimana tingkat pendidikan warga masyarakat, perempuan dan laki-laki? - Mengapa ada perbedaan tingkat pendidikan warga? (<i>apakah terdapat persoalan ketersediaan sekolah, jarak dll</i>) - Mengapa terdapat perbedaan jenis sekolah yang dipilih? (<i>misalnya antara sekolah umum dan madrasah</i>). - Adakah perbedaan tingkat pendidikan perempuan dan laki-laki? - Mengapa ada perbedaan? - Berapa biaya pendidikan untuk masing-masing tingkat pendidikan? - Siapakah yang mengambil keputusan dalam keluarga untuk menyekolahkan anak? (suami, istri ataukah anggota keluarga yang lain?) - Siapakah yang mengambil keputusan dalam keluarga untuk memilih jenis sekolah yang akan ditempuh? - Apakah terdapat perbedaan pengambilan keputusan atas sekolah anak perempuan? Anak laki-laki? - Apa yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan tersebut? - Apa masalah-masalah yang dihadapi?
	<p>Bagan kecenderungan perubahan tingkat pendidikan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Setelah itu, Tanyakan kepada peserta: <ul style="list-style-type: none"> - bagaimana tingkat pendidikan warga miskin sekarang, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? - Tanyakan pula kecenderungan yang dialami anak perempuan? Anak laki-laki? - Ajaklah mereka untuk membuat kecenderungan perubahan tingkat pendidikan dasar (SLTP) warga miskin dari tahun ke tahun. - Mulailah dengan tahun tertentu yang disepakati bersama. Misal kajian akan dilakukan mulai tahun 2004. ▪ Mintalah kepada peserta (<i>pada tahun 2004 sampai dengan sekarang</i>) untuk berdiskusi: <ul style="list-style-type: none"> - Berapa jumlah warga miskin yang tidak pernah bersekolah

- Warga miskin yang putus sekolah SLTP (tidak tamat SLTP), anak perempuan dan laki-laki,.
- Dsb...
- Kemudian buatlah presentase dengan membandingkan dengan jumlah warga miskin.
- Gunakan tabel untuk memudahkan.

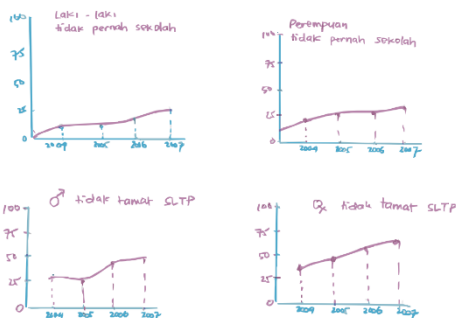
Contoh:

Tahun (2004)	Jenis Kelamin	Tidak Pernah Bersekolah (usia 7 tahun-16 tahun)	Tidak Tamat SLTP	Jumlah	Jumlah warga usia 7-16 tahun	Persentase
2004	L	30	25	55		
	P	40	50	90		
2005	L	30	20	50		
	P	40	50	90		
2006	L	35	20	55		
	P	45	60	105		
2007	L	35	25	55		
	P	45	65	110		

Grafik

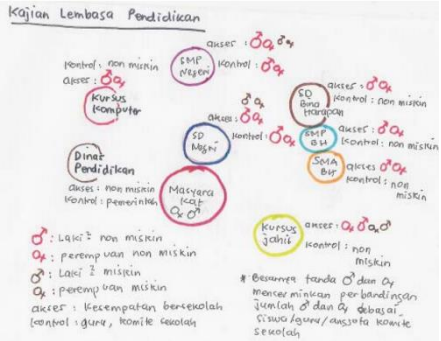
- Ajaklah peserta untuk memindahkan tabel tersebut ke dalam bentuk grafik,
- Pisahkan antara grafik kecenderungan untuk laki-laki dan perempuan:

Contoh



- Berdasarkan kepada grafik yang sudah dibuat, diskusikan:
 - Apakah ada perubahan tingkat angka sekolah dari tahun ke tahun,
 - Apabila ada apakah perubahan tersebut menurun atau meningkat?
 - Bandingkan antara perubahan-perubahan untuk kelompok perempuan dan laki-laki?

		<ul style="list-style-type: none"> - Mengapa hal tersebut terjadi? - Apa kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di tahun mendatang? - Apa masalah-masalah yang dihadapi? <p>Catatan <i>Dalam pembahasan tumbuhkan kesadaran peserta pada perbedaan-perbedaan perubahan tingkat pendidikan kaum perempuan dan laki-laki baik dari jenjang pendidikan, maupun jenisnya (apabila ada).</i></p>
	<p>Diagram venn</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lanjutkanlah kegiatan dengan mengkaji lembaga-lembaga pendidikan yang ada dengan kajian kelembagaan (diagram venn) sebagai alat bantu diskusi. ▪ Tanyakan kepada peserta: <ul style="list-style-type: none"> - Apa saja lembaga pendidikan yang ada baik lembaga formal maupun non formal? ▪ Tuliskan jawaban peserta ke dalam kertas plano. ▪ Ajaklah peserta untuk menentukan simbol-simbol dari lembaga pendidikan tersebut. ▪ Bila simbol yang digunakan adalah lingkaran, maka besar kecilnya lingkaran bisa dipakai untuk simbol besar kecilnya manfaat lembaga tersebut bagi masyarakat. ▪ Tulislah nama-nama lembaga pelayanan kesehatan pada simbol yang sudah dipilih. ▪ Buatlah lingkaran yang bertuliskan warga miskin, dan tempelkan lingkaran tersebut pada kertas plano atau media lainnya. ▪ kemudian mintalah peserta untuk menempelkan simbol-simbol yang lain, jauh-dekatnya simbol lembaga pendidikan dari lingkaran warga miskin menunjukkan tingkat interaksi lembaga tersebut dengan warga. ▪ Setelah selesai lanjutkan analisa kelembagaan dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Apakah warga miskin mempunyai akses terhadap lembaga pendidikan tersebut? Beri tanda. - Apakah perempuan mempunyai akses terhadap pelayanan pendidikan tersebut? Beri tanda. - Apakah laki-laki mempunyai akses terhadap lembaga pendidikan tersebut? Beri tanda - Berapa biaya pendidikan pada masing-masing lembaga pelayanan pendidikan tersebut? <i>Tuliskan besarnya biaya pada sebelah lingkaran lembaga.</i> - Siapa yang memimpin dan mengambil keputusan untuk kegiatan dan pembiayaan pada lembaga tersebut? - Apakah warga masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan? <p>Misalnya: komite sekolah, siapa yang menjadi anggota komite sekolah, bagaimana hubungan komite sekolah</p>

		<p>dengan masyarakat dan lembaga pendidikan tersebut, apakah warga masyarakat mengetahui adanya komite sekolah)?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apakah ada warga miskin yang terlibat dalam pengambilan keputusan dalam kegiatan pada lembaga tersebut? Beri tanda apabila ada - Apakah ada perempuan yang terlibat dalam pengambilan keputusan dalam lembaga tersebut? Beri tanda apabila ada - Apa manfaat dari lembaga-lembaga tersebut? - Apa masalah-masalah yang dihadapi dalam berhubungan dengan lembaga-lembaga tersebut? - Bagaimana kualitas pelayanan lembaga-lembaga tersebut? <p>(identifikasi variabel kualitas pelayanan sekolah, misalnya jumlah guru, mutu dan kualifikasi guru, ketersediaan buku, ketersediaan bahan ajar, bahan ajar apakah bias gender, ruang bocor, rasio guru dan murid, jam belajar, perbedaan kurikulum di antara sekolah, mutu madrasah dibanding sekolah umum, mutu sekolah negeri dibanding swasta, keberadaan komite sekolah, dll).</p> <p>Contoh:</p> 
Matrik Masalah		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Setelah itu, ajaklah peserta untuk memetakan keseluruhan masalah pendidikan yang dihadapi berdasarkan kepada hasil keseluruhan kajian yang sudah dilakukan. ▪ Bagilah peserta ke dalam 2 kelompok, yaitu kelompok perempuan dan kelompok laki-laki. ▪ Mintalah masing-masing kelompok untuk merumuskan masalah-masalah pendidikan yang terjadi (akan lebih mudah kalau masalah tersebut dikelompokkan, misalnya: <ul style="list-style-type: none"> - masalah putus sekolah, - masalah buta huruf,

- masalah kualitas pendidikan dan bagian-bagiannya seperti diidentifikasi sebelumnya dan sebagainya tergantung pada kesepakatan).
- Buat Matrik yang terdiri dari:
 - Penyebab masalah Kondisi ideal yang diharapkan
 - Upaya-upaya yang bisa dilakukan (gagasan awal) untuk mencapai kondisi ideal (memecahkan masalah)
 - Potensi dari diri sendiri yang bisa disumbangkan untuk memecahkan masalah.
 - Potensi dari luar untuk memecahkan masalah.
- Gunakan matrik seperti contoh di bawah ini untuk memudahkan. Identifikasi persoalan yang berbeda yang dialami perempuan dan laki-laki.

Contoh:

Masalah (Kondisi saat ini)		Penyebab Masalah (Kondisi saat ini)		Kondisi ideal (yang diharapkan)		Upaya-upaya yang bisa dilakukan (gagasan awal)		Potensi yang ada untuk memecahkan masalah		
L	P	L	P	L	P	L	P	SDM	Dana	Alam


Penting diingat:

- ✓ *Dampingi masing-masing kelompok oleh satu orang pemandu proses (relawan/fasilitator)*
- ✓ *Ajaklah peserta untuk kembali mengkaji semua masalah pendidikan yang terjadi dengan menggunakan pohon masalah.*
- ✓ *Tuliskan masalah-masalah yang sudah ditemukan dalam analisa sebelumnya, kemudian ajaklah mereka untuk membuat pohon masalah lingkungan (lihat panduan RK) sampai kepada akar penyebab terjadinya masalah-masalah tersebut. (penyebab masalah tingkat 1 sampai dengan tingkat 4).*
- ✓ *Perhatikan persoalan yang berbeda yang dihadapi kelompok perempuan dan laki-laki.*
- ✓ *Apabila ada narasumber dari bidang pendidikan, misal dari dinas pendidikan, Komite Sekolah, Dewan Pendidikan, orang tua murid, guru dan narasumber lain yang paham mengenai permasalahan pendidikan, mintalah mereka untuk membahas permasalahan yang dihadapi oleh warga masyarakat dan pencegahan-pencegahan yang seharusnya dilakukan untuk meminimalkan permasalahan tersebut.*
- ✓ *Jelaskan kepada peserta, bahwa hasil diskusi ini akan menjadi masukkan dalam lokakarya tingkat kelurahan.*

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Doronglah mereka untuk datang pada lokakarya hasil Pemetaan di tingkat kelurahan.</i> ✓ <i>Mintalah pencatat proses untuk mencatat hasil diskusi, pindahkan petapeta, garfik dan bagan-bagan ke dalam kertas lain.</i> ✓ <i>Catatan ini digunakan sebagai dokumentasi Tim PS (masyarakat), akan dibahas dan menjadi masukan dalam lokakarya perencanaan PJM Pronangkis bersama BKM/LKM.</i> ✓ <i>Ajaklah peserta untuk memindahkan tabel tersebut ke dalam bentuk grafik, pisahkan antara grafik kecenderungan untuk laki-laki dan perempuan</i>
--	--	--

Daftar Pustaka

- Nes, M. (2008). *Kajian Pendidikan*. In SERI SIKLUS PNPM Mandiri Perkotaan (4e). Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya. Retrieved from <http://kotaku.pu.go.id>



Bahwa sebagai makhluk sosial, dalam kehidupannya, manusia selalu dihadapkan pada berbagai masalah sosial. Sesungguhnya, masalah-masalah sosial merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari kehidupan manusia itu sendiri karena masalah-masalah sosial telah terwujud sebagai basil dari kebudayaan manusia itu sendiri, sebagai akibat dari hubungan-hubungannya dengan sesama manusia lainnya, dan juga sebagai akibat dari tingkah lakunya.

Di Indonesia masalah kemiskinan masih relatif tinggi yang perlu dilakukan penganan secara konprehensi karena masalah kemiskinan adalah masalah multidimensi. Sementara UUD 1945 mengamanatkan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kegagalan pembangunan diyakini karena salah satunya adalah kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka yang miskin. Kegagalan kebijakan yang dimaksud adalah kegagalan dalam proses perencanaan yang sebelumnya kegagalan dalam memetakan masalah dan potensi masyarakat. Maka hal inilah yang menjadi alasan untuk menyusun buku ini agar dapat melaksanakan tehnik pemetaan yang juga merupakan buku ajar bagi mahasiswa Pengembangan Masyarakat Islam IAIN Parepare dimana mahasiswa memahami tehnik pemetaan yang baik sebelum melangka pada proses perencanaan sosial.

